REVISI

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
Jalan AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520
KOTAK POS 7264 & 7301 / JKS PSM
Telepon : (021) 7806819, Faksimile : (021) 7806309
Website : http://www.tanamanpangan.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rancangan RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rancangan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L).

Rancangan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan penjabaran dari Rencana Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga disusun untuk pencapaian produksi tanaman pangan berupa 1) peningkatan produktivitas, 2) perluasan areal dan optimasi lahan, serta 4) perbaikan manajemen. Implementasi pencapaian produksi ini melibatkan semua stakeholder. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki 1 program sebagai wilayah tanggung jawab tugas pokok dan fungsi yaitu **Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.** Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL).

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menyusun program, kegiatan dan anggaran tahun 2018 dengan sistem pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan prioritas nasional.

Jakarta, 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		Iii
DAFTAR BAGAN		Iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	5
	B. Tujuan	5
	C. Sasaran	
BAB II	DASAR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DITJEN TANAMAN PANGAN	6
	A. Dasar Penyusunan Renja K/L	6
	B. Kronologis Penetapan Pagu Indikatif Tahun 2018	10
	C. Rancangan Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2018	13
BAB III	PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RANCANGAN RENJA) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2018	17
BAB IV	PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Pagu Per Kegiatan Tahun 2018	18
Tabel 2	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan Produksi AKABI 2018	19
Tabel 3	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 2018	22
Tabel 4	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman 2018	25
Tabel 5	Rincian Kegiatan dan Anggaran Penguatan Perlindungan TP dan Gangguan OPT dan DPI 2018	27
Tabel 6	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 2018	30
Tabel 7	Rincian Kegiatan dan Anggaran Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 2018	33
Tabel 8	Rincian Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih 2018	35
Tabel 9	Rincian Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan OPT 2018	36

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Dokumen Perencanaan Pembangunan Periode Lima Tahunan	1
Bagan 2	Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2015-2019	3
Bagan 3	Mekanisme Pertemuan Tiga Pihak	11

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan saat ini memerlukan kreativitas dan berbagai terobosan sehingga mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pemerintahan saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3 (Tahun 2015-2019), pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Dalam konteks integrasi perencanaan pembangunan, perlu disusun dokumen yang dapat menterjemahkan proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah ke dalam proses pembangunan jangka pendek (tahunan). Hal ini memerlukan suatu spirit yang konsisten dan taat atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang tidak dapat dipungkiri, dalam perjalanannya, proses perencanaan dapat mengalami perubahan baik bersifat fundamental atau bersifat non fundamental. Proses perencanaan tersebut dilakukan mulai dari RPJP – RPJM – Renstra – RKP – Renja K/L – RKA/KL – DIPA.

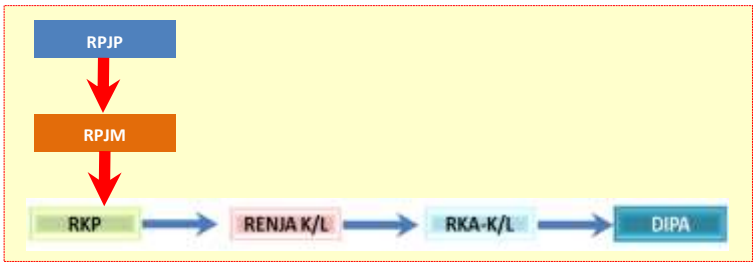

Bagan 1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Periode Lima Tahunan

Untuk memperkuat proses kinerja pembangunan, harus dilakukan evaluasi secara makro dan mikro, termasuk kebijakan yang ditetapkan. Hal ini sebagai bagian perbaikan secara berkelanjutan. Tetapi sering kali, karena faktor kebiasaan dan minimnya data menyebabkan proses perencanaan dilakukan sebagai proses biasa atau rutin setiap tahun. Dilematika ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pengambil kebijakan di suatu organisasi.

Sub sektor tanaman pangan sebagai salah satu sub sektor pertanian mempunyai arti yang strategis dalam perekonomian nasional. Arti strategis tersebut meliputi sumber kebutuhan paling pokok bagi kehidupan nasional yaitu bahan pangan dan menopang kehidupan lebih dari 60 persen pelaku usaha pertanian di Indonesia. Keberhasilan pembangunan tanaman pangan akan berdampak langsung terhadap ketahanan dan pertahanan nasional serta perekonomian nasional.

Dari segi perspektif ekonomi, sub sektor tanaman pangan masih memberikan sumbangan yang nyata terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional; penyerapan tenaga kerja di perdesaan; peningkatan pendapatan petani, dan penyumbang devisa. Laju pertumbuhan pembangunan sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan dibandingkan sub sektor lainnya. Kondisi ini disebabkan karena bergesernya orientasi pembangunan ekonomi nasional yang lebih menitikberatkan pada pengembangan industri yang tidak berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu visi yang tepat untuk menempatkan sub sektor tanaman pangan sebagai salah satu andalan strategis perekonomian nasional dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal.

Selain perspektif ekonomi, sub sektor tanaman pangan menjadi salah satu faktor politik dan sosial sehingga sub sektor tanaman pangan harus diterjemahkan dalam pilar utama bagi pembangunan nasional terutama berkaitan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan akan produk tanaman pangan yang cukup dan bermutu. Kapasitas atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan berhadapan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang sehat serta kebutuhan atas perkembangan industri olahan berbahan dasar

tanaman pangan, misalnya untuk pakan. Selain itu, kemampuan memenuhi kebutuhan berbasis sub sektor tanaman pangan masih dihadapkan pada perubahan iklim global dan terbatasnya sumber daya lahan, air dan teknologi. Dalam menghadapi dinamika globalisasi, pertambahan penduduk, penurunan kapasitas sumber daya, stagnasi teknologi, dan perubahan iklim saat ini maka diperlukan pembangunan yang dapat menjamin kehidupan berbangsa ke arah yang lebih baik.

Dalam mengoptimalkan kinerja dan mendorong akuntabilitas kinerja Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan serta sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2016, maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tanaman pangan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

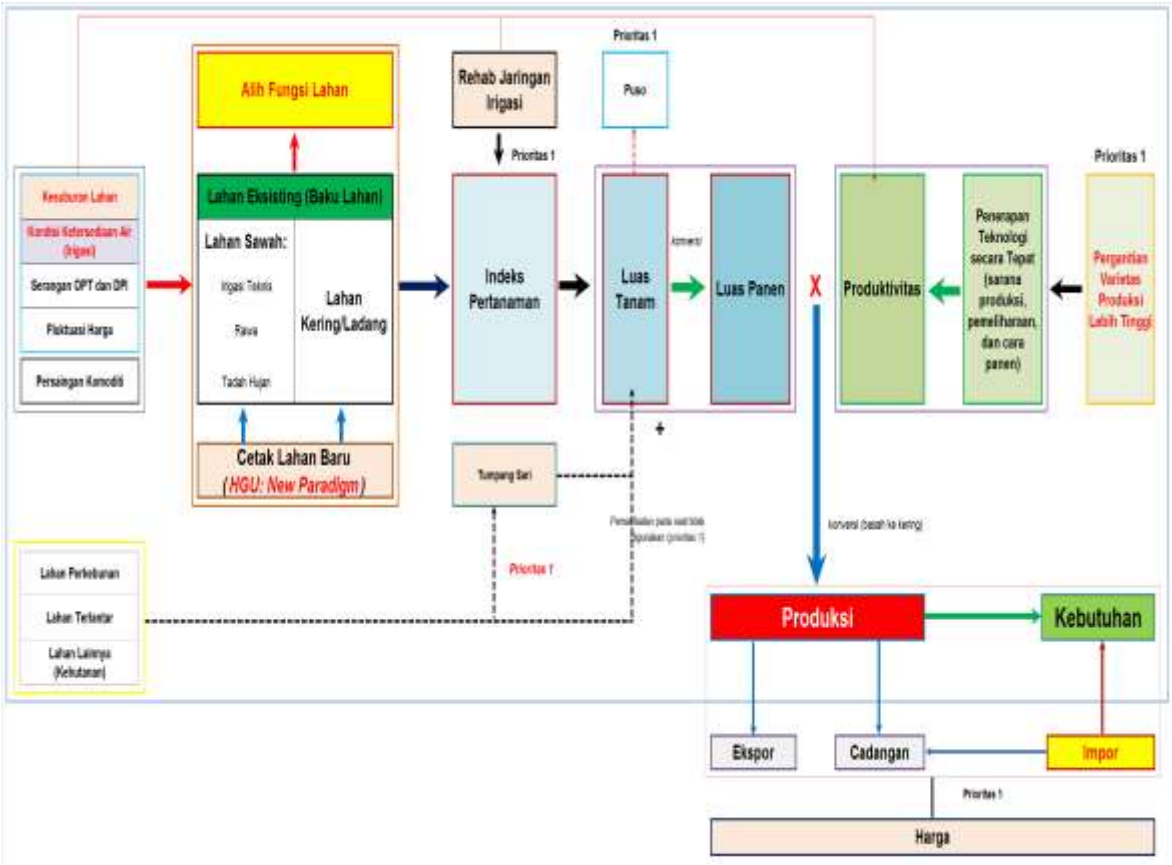

Bagan 2. Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun 2015-2019

RPJMN Tahun 2015-2019 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015-2019, pembangunan tanaman pangan diharapkan dapat memperkuat kedaulatan pangan nasional. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menetapkan prioritas pembangunan tanaman pangan untuk mendukung pencapaian kedaulatan pangan.

Untuk menindaklanjut hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 mendorong pencapaian peningkatan produksi Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018. Dalam rangka mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan, program pembangunan tanaman pangan perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Program Pembangunan Tanaman Pangan, yang didokumentasikan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 menjadi salah satu indikasi kesungguhan dalam mendorong pembangunan tanaman pangan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Proses penetapan RKP menjadi dasar awal dalam merumuskan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja-K/L oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Pagu tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN, dan PNBP.

Untuk mempertanggungjawabkan perencanaan kinerja tahun 2018 setelah pasca penetapan Rencana Kerja, dilakukan upaya menyusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018. Berbagai pertimbangan teknis dan non teknis dilakukan untuk mewujudkan target yang ditetapkan.

B. Tujuan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melaksanakan Penyusunan Renja KL dengan tujuan sebagai berikut mewujudkan pelaksanaan pembangunan tanaman pangan yang efisien, efektif, transparan, akutabel serta sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga adalah dokumen rencana kinerja program dan kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018 yang memuat penjabaran Rencana Kerja berbasis kinerja dan penganggaran terpadu untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan.

BAB II
DASAR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2018

A. Dasar Penyusunan Renja K/L

Tantangan utama pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah terbatasnya ruang gerak kapasitas fiskal sebagai akibat dari terbatasnya sumber pendanaan sehingga menambah kompleksitas pemilihan prioritas pembangunan nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, diterapkan kebijakan penganggaran dengan meningkatkan kualitas belanja *(Quality of Spending)* melalui pemantapan penerapan sistem penganggaran baru sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja disertai dengan penerapan penganggaran terpadu serta kerangka pengeluaran jangka menengah. Penerapan penganggaran berbasis Kinerja paling sedikit mengandung 3 (tiga) prinsip, yaitu:

a. Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi *(money follow function);*
b. Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja *(output and outcome oriented);* dan
C. Prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas *(let the manager manages).*

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

Perencanaan kegiatan tahunan oleh Kementerian/Lembaga dituangkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Renja K/L adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) serta disusun mengacu pada RKP. Penyusunan Renja K/L 2018 dilaksanakan setelah dikeluarkannya Awal RKP yang didalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak K/L. Matrik Rencana Tindak K/L merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan Pagu 2018. Pagu tersebut merupakan batas tertinggi indikasi pendanaan yang terdiri atas rupiah murni, PHLN, PNBP, BLU, PDN dan SBSN yang tidak dapat dilampaui

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L).

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja-K/L oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Pagu tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut

program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN, dan PNBP. Berkenaan dengan telah diberlakukannya penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM) secara penuh yang menggunakan struktur program dan kegiatan hasil restrukturisasi, maka mekanisme penyusunan Renja K/L menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Pada penyusunan Renja K/L tahun 2018, beberapa hal yang memerlukan perhatian sebagai berikut:

1. Penyusunan Renja K/L 2018 berpedoman pada Awal RKP 2018;
2. Target kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kinerja dari suatu K/L dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi K/L dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional.
3. Informasi kinerja yang ada dalam Renja K/L meliputi:
   a. Visi dan Misi K/L, Sasaran Strategis K/L, dan Misi unit Eselon I;
   b. Program, Sasaran Program (Outcome), Indikator Kinerja Program (IKP);
   c. Kegiatan, Sasaran Kegiatan (Output), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
   d. Perkiraan alokasi pendanaan baik untuk tahun yang direncanakan maupun prakiraan majunya;
4. Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaannya. Informasi tersebut juga telah tercantum dalam dokumen RPJMN dan Renstra K/L.
5. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan tugas-fungsi K/L dan/atau penugasan prioritas pembangunan nasional.
6. Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.
7. Peruntukan indikasi pendanaan harus memperhatikan urutan prioritas sebagai berikut:
   a. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019, Renstra K/L tahun 2015-2019, dan Awal RKP tahun 2018;

b. Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama;
c. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri;
d. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multiyears);
e. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan daerah tertinggal, perbatasan, pengurangan kesenjangan antar wilayah serta isu lainnya terkait kewilayahan;
f. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan peraturan perundangan.

8. Penuangan sumber dana dalam Renja K/L memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
   a. Pergeseran alokasi anggaran antar sumber dana tidak dapat dilakukan.
   b. Sumber dana yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) atau pinjaman dalam negeri (PDN), agar dipastikan sudah ada loan/grant agreement, cara penarikan, kategori penggunaan, tanggal efektif, tanggal closing date termasuk kewajiban untuk menyediakan Rupiah Murni Pendamping (RMP).
   c. Dalam hal PHLN atau PDN merupakan sumber dana baru dan belum ada loan/grant agreement-nya, maka dipastikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dan ditetapkan dalam RUU APBN TA 2018.
9. Peningkatan efisiensi dengan membatasi/mengurangi komponen yang bersifat administrasi (biaya administrasi keluaran-BAK) dalam pencapaian sebuah output;
10. Pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah, terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah.

Selanjutnya, implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyusunan Renja K/L oleh Kementerian/Lembaga harus didasarkan atas hasil kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak (*trilateral meeting*) yang telah

dilaksanakan sebelumnya. Renja K/L yang telah disusun Kementerian/Lembaga, selanjutnya disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai bahan penyempurnaan awal RKP dan penyusunan rincian pagu.

B. Kronologis Penetapan Pagu Tahun 2018

Dalam rangka menyusun Renja KL dan penyempurnaan Awal RKP, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga perlu dilakukan Pertemuan Tiga Pihak. Pertemuan ini merupakan suatu forum koordinasi yang melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2018.

Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan untuk memudahkan konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional di dalam RKP dan Renja K/L melalui forum pembahasan yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait. Adapun proses mekanisme pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak secara umum dilakukan dengan melakukan sinkronisasi isu-siu strategis.

Bagan 3. Mekanisme Pertemuan Tiga Pihak

Pertemuan tiga pihak diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang meliputi arah kebijakan, sasaran dan target, program dan kegiatan serta perkiraan kebutuhan pendanaan sesuai dengan arah kebijakan yang akan dituangkan dalam RKP. Untuk itu hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga tersebut, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
   a) Melakukan penyempurnaan terhadap Awal RKP sesuai dengan masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak;

b) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim Kementerian/Lembaga;
c) Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari Kementerian/Lembaga untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam penelaahan RKA-KL.

2. Kementerian Keuangan
   a) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim Kementerian/Lembaga;
   b) Menyempurnakan kebijakan anggaran yang terbagi kedalam jenis belanja dan satuan biaya yang dianggap perlu untuk disesuaikan dengan masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak;
   c) Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari Kementerian/Lembaga untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Pagu Anggaran.

3. Kementerian/Lembaga
   a) Melakukan konsolidasi internal untuk penyesuaikan terhadap masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak;
   b) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Renja K/L;
   c) Menyampaikan Renja K/L yang telah disusun kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
   d) Menggunakan Renja K/L sebagai pedoman penyusunan RKA-KL.

Setelah dilakukan Pertemuan Tiga Pihak ini, para pihak segera menandatangani dokumen kesepakatan yang telah disepakati dalam rangka penyusunan pagu indikatif.

C. Rencana Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 memiliki tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja

Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antar Wilayah". Hal-hal yang menjadi isu strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 antara lain :

1. Pemenuhan pencapaian target RPJMN 2015-2019
2. Melanjutkan direktif Presiden (sesuai sidang kabinet)
3. Menangani isu terkini yaitu kedaulatan pangan pada dimensi pembangunan sektor unggulan.

Dalam menuyusun Rencana Kerja Kementerian Pertanian perlu dilakukan *refocusing* baik dari sisi anggaran, program, kegiatan, komoditas, wilayah dan satker. Beberapa hal yang menjadi prioritas dalam penyusuan Rencana Kerja Kementerian Pertanian yaitu:

1. Alokasi Anggaran 2018, terdiri dari:
   - Program Prioritas dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia
   - Komoditas Strategis
   - Lokus Wilayah andalan
   - Pembangunan/Pengembangan (kawasan)
2. Penyusunan Program, terdiri dari:
   - Pencapaian Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai
   - Pembangunan pertanian di wilayah daerah perbatasan
   - Pembangunan Pertanian di wilayah daerah tertinggal.
3. Fokus Komoditas
   - Komoditas Strategis Padi, Jagung, Kedelai, Sapi/Kerbau, Tebu, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih.
4. Fokus Wilayah
   - Wilayah Program/Kegiatan sesuai dengan wilayah pengembangan kawasan andalan
   - Tidak dialokasikan tersebar hampir merata di Kabupaten/Kota
   - Wilayah kegiatan berupa kawasan atau non kawasan
   - Skalanya memadai dengan target sasaran nasional/regional
5. Refocusing Kegiatan

- Kegiatan di wilayah bukan refleksi kegiatan-kegiatan unit organisasi di Pusat, tetapi didasarkan atas kebutuhan lapangan sesuai target/sasaran nasional yang ditetapkan
- Tidak semua kegiatan direktorat hadir di wilayah/ sebagai satker, tetapi tergantung "need assessment" lapangan.
- Regulasi harus diperkuat, tidak hanya bertumpu pada instrumen bantuan.
- Pembangunan tidak dirancang tergantung pada APBN, tetapi APBN hanya sebagai "trigger" Replikasi Nasional, harus dirancang dengan melibatkan investasi masyarakat (swasta, petani) dan APBD.

6. Refocusing Satker
   - Tidak setiap eselon I memiliki satker di setiap Dinas Provinsi/Kabupaten.
   - Jumlah Satker dikurangi sesuai dengan fokus program, fokus komoditas, fokus wilayah.
   - Satker 2018 yang telah sesuai dengan rambu-rambu 2016 dipertahankan agar ada keberlanjutan.
   - Satker UPTD agar di integrasikan antar eselon I terkait.
   - Adanya komponen pendukung/ terkait di integrasikan pada Satker yang ada/yang programnya dominan.

Beberapa rambu-rambu umum kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2018 yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Memperhatikan kebutuhan anggaran untuk memenuhi kegiatan yang bersifat *multi-years* dan memperhatikan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang.
2. Melakukan *refocusing* dan efisiensi anggaran ke arah kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus sejalan dengan prioritas pembangunan dan Tupoksi Eselon-I guna mencapai sasaran pada Renstra Kementerian Pertanian.

4. RKA agar disusun secara cermat, dilengkapi TOR dan RAB, sehingga membantu memperbaiki penyerapan anggaran dan meminimalisir revisi DIPA/POK.
5. Penyelesaian RKA harus tepat waktu dan disiplin anggaran.
6. Efisiensi dalam alokasi anggaran pos belanja barang (perjalanan dan rapat-rapat), dan tingkatkan belanja modal dan bansos, termasuk untuk belanja infrastruktur.
7. Memberikan presentase/porsi anggaran untuk kegiatan di daerah yang lebih besar dibandingkan dengan alokasi daerah.
8. Untuk belanja pegawai, memperhitungkan: (a) kenaikan gaji pokok dan pensiun 10%; (b) kenaikan uang makan PNS; (c) pengangkatan CPNS mengacu pada prinsip *zero growth* (hanya untuk mengganti pegawai yang pensiun); dan (d) penuntasan Reformasi Birokrasi.
9. Untuk PNBP agar: (a) memperbaiki pemungutan dan penyetoran PNBP; (b) optimalisasi sumber-sumber PNBP dan besaran tarif; (c) peningkatan pemasukan PNBP dan pemanfaatan yang lebih seimbang.
10. Kegiatan PHLN agar: (a) membiayai kegiatan produktif mendorong ekonomi dan kesejahteraan petani; (b) penarikan LN tepat waktu dan mempertimbangkan kesiapan dan dana; (c) meningkatkan ketertiban dan ketaan dalam alokasi, pemanfaatan dan pelaporan hibah dan (d) harus mempertimbangkan penyediaan dana pendampingnya.
11. Pada pos belanja subsidi pertanian (benih dan pupuk) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas mendukung kedaulatan pangan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip alokasi yang tepat sasaran, sistem penyaluran pola tertutup dengan RDKK, menggunakan basis data yang tepat dan valid, dan penyaluran yang lebih akuntabel.

Beberapa komponen input yang dibatasi dalam APBN Kementerian Pertanian Tahun 2018 antara lain:

1. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
2. Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker yang belum ada sama sekali.
3. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tupoksi (antara lain mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan), kecuali untuk gedung yang bersifat pelayanan umum dan gedung/bangunan khusus (antara lain : laboratorium, gudang).
4. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali: (a) kendaraan fungsional (seperti ambulan untuk rumah sakit; kendaraan roda dua untuk petugas lapangan); (b) pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang sudah ada ketetapan Meneg-PAN dan RB dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia; (c) penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi; (d) penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung oleh berita acara penghapusan); (e) kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif.

BAB III
PENYUSUNAN REVISI RENCANA KERJA (RENJA) DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2018

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja-K/L oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta tema dan prioritas pembangunan nasional. Pagu tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN, PNBP, BLU, PDN dan SBSN.

1. Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP)

Alokasi Pagu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018 sebesar Rp. 6.486.964.351.000,- menjadi Rp. 6.682.058.351.000,- dengan sasaran program/indikator kinerja program sebagai berikut:

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2018	SEMULA ALOKASI 2018 (RIBU)	MENJADI ALOKASI 2018 (RIBU)
01	**Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan**		**6.486.964.351**	**6.682.058.351**
01.01	Tercapainya Produktivitas Padi	52,87		
01.02	Tercapainya Produktivitas Jagung	54,75		
01.03	Tercapainya Produktivitas Kedelai	16,50		
01.04	Tercapainya Produksi Padi	80.085.000		
01.05	Tercapainya Produksi Jagung	26.500.000		
01.06	Tercapainya Produksi Kedelai	2.340.000		
Total			**6.486.964.351**	**6.682.058.351**

Tabel 1. Sasaran Program / Indikator Kinerja Program (IKP) Tahun 2018

2. Rincian Pagu

Alokasi Pagu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2018 sebesar Rp. 6.486.964.351.000 menjadi Rp. 6.682.058.351.000 terdiri sebagai berikut :

KODE	KEGIATAN	SEMULA INDIKASI PENDANAAN			MENJADI INDIKASI PENDANAAN		
		RUPIAH	PNBP	TOTAL	RUPIAH	PNBP	TOTAL
1761	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	990.600.000	-	990.600.000	562.939.569	-	562.939.569
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	4.010.230.650	-	4.010.230.650	2.855.021.255	-	2.855.021.255
1763	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	113.000.000	-	113.000.000	810.152.800	-	810.152.800
1764	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	248.351.674	501.980	248.853.654	246.651.674	501.980	247.153.654
1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	292.748.701	-	292.748.701	295.120.288	-	295.120.288
1767	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	11.500.000	-	11.500.000	11.500.000	-	11.500.000
1768	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	15.362.846	-	15.362.846	15.668.846	-	15.668.846
5885	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	804.668.500	-	804.668.500	1.884.501.969	-	1.884.501.969
Total		**6.486.462.371**	**501.980**	**6.486.964.351**	**6.681.556.401**	**501.980**	**6.682.058.351**

Tabel 2. Rincian Pagu Per Kegiatan Tahun 2018

3. Rekapitulasi Daftar Kegiatan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan mempunyai 8 (delapan) kegiatan utama.

a. Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi

Kegiatan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi tahun 2018 sebesar Rp. 990.600.000.000,- dengan output: a) Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai seluas 1.000.000 Ha dengan pagu anggaran Rp. 975.443.500.000; b) Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Kayu seluas 1.500 Ha dengan pagu anggaran Rp. 1.512.500.000; c) Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar seluas 500 Ha dengan pagu anggaran Rp. 700.000.000; d) Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau seluas 5.000 Ha dengan pagu anggaran Rp. 4.450.000.000; e) Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya seluas 500 Ha dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000; f) Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 12 Bulan dengan pagu anggaran Rp. 8.194.150.000.

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan Produksi AKABI 2018

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA				MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas				990.600.000			562.939.569
01.611	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	1.000.000	Ha		974.497.500	546.000	Ha	546.644.386
01.611.001	Tanpa Sub Output				974.497.500			546.644.386
01.611.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai	191	Laporan	117.788	22.497.500	281	Laporan	23.354.400

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA				MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01.611.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kedelai	1.000.000	Ha	952	952.000.000	1.000.000	Ha	523.289.986
01.612	Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Kayu	1.500	Ha		1.302.500	1.500	Ha	1.440.800
01.612.001	Tanpa Sub Output				1.302.500			1.440.800
01.612.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Kayu	7	Laporan	57.500	402.500	12	Laporan	540.800
01.612.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Ubi Kayu	1.500	Ha	600	900.000	1.500	Ha	900.000
01.613	Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar	500	Ha		550.000	500	Ha	681.300
01.613.001	Tanpa Sub Output				550.000			681.300
01.613.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Jalar	3	Laporan	8.333	25.000	8	Laporan	381.300
01.613.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Ubi Jalar	500	Ha	600	300.000	500	Ha	300.000
01.615	Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau	5.000	Ha		5.175.000	5.000	Ha	3.214.000
01.615.001	Tanpa Sub Output				5.175.000			3.214.000
01.615.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Hijau	1	Laporan	75.000	75.000	3	Laporan	86.000
01.615.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kacang Hijau	5.000	Ha	1.020	5.100.000	5.000	Ha	3.128.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA				MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01.616	Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	500	Ha		300.000	500	Ha	300.000
01.616.001	Tanpa Sub Output				300.000			300.000
01.616.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	500	Ha	600	300.000	500	Ha	300.000
01.617	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	12	Bulan		8.775.000	12	Bulan	10.659.083
01.617.001	Tanpa Sub Output				8.775.000			10.659.083
01.617.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	12	BULAN LAYANAN	672.271	8.067.247	12	Laporan	10.459.365
01.617.001.103	Melaksanakan Pencanangan Tanam/Panen Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	12	BULAN LAYANAN	58.979	707.753	12	Laporan	199.718
Total		**-**	**-**	**-**	**990.600.000**	**-**	**-**	**562.939.569**

b. Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia tahun 2018 sebesar Rp. 4.010.230.650.000,- menjadi Rp. 2.855.021.650.000,- dengan output : a) Fasilitas Penerapan Budidaya Padi seluas 1.230.000 ha dengan pagu Rp. 647.352.500.000, b) Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya seluas 2.804.710 Ha dengan pagu Rp. 1.915.986.410.000 c) Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 12 Bulan di 416 Kab/Kota dengan pagu Rp. 81.214.800.000 d) Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik seluas 55.000 Ha dengan pagu Rp. 409.615.000.000 terdiri atas

Budidaya Padi Organik Seluas 55.000 Ha dengan pagu Rp. 34.615.000.000 dan UPPO sebanyak 1.500 Unit dengan Pagu Rp. 375.000.000.000.

Tabel 4. Rincian Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan Produksi Serealia 2018

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas			4.010.230.650			2.855.021.225
01.621	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1.695.000	Hektar	674.539.599	1.230.000	Hektar	647.352.500
01.621.001	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida			419.573.054			52.938.750
01.621.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Sawah	1.597.000	Hektar	411.227.501	172.500	Hektar	51.146.250
01.621.001.104	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Padi Inbrida Eks Cetak Sawah	5.000	Hektar	3.887.553	3.000	Hektar	1.792.500
01.621.001.105	Melaksanakan Bantuan Budidaya Padi Inbrida Corporate Farm	6.000	Hektar	-	6.000	Hektar	-
01.621.002	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Hibrida			-			-
01.621.002.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Hibrida	0,0	Hektar	0,0	0,0	Hektar	0,0
01.621.004	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi			192.750.000			437.500.000
01.621.004.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Lahan Suboptimal Spesifik Lokasi	50.000	Hektar	192.750.000	50.000	Hektar	437.500.000
01.621.005	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Salibu			6.765.000			
01.621.005.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Slibu	3.000	Hektar	6.765.000		Hektar	
01.621.006	Fasilitas Penerapan Budidaya Minapadi			7.777.545			3.243.750
01.621.006.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Mina Padi	3.000	Hektar	7.777.545	1.500	Hektar	3.243.750
01.621.007	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Lahan Kering			24.140.000			437.500.000
01.621.007.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Gogo	20.000	Hektar	24.140.000	20.000	Hektar	437.500.000
01.621.008	Fasilitas Penyaluran Budidaya Padi Khusus Lainnya			3.810.000			2.520.000
01.621.008.103	Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya padi khusus Lainnya	3.000	Hektar	3.810.000	3.000	Hektar	2.520.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01.621.009	Fasilitas Peningkatan Produksi Padi Berbasis Koorporasi			19.724.000			-
01.621.009.103	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Fasilitas Produksi Padi Berbasis Korporasi	8.000	Hektar	19.724.000	-	Hektar	-
01.622	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya	4.000.500	Hektar	2.844.861.251	2.804.710	Hektar	1.915.986.410
01.622.001	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 1			47.700.000			-
01.622.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Varietas Umum 1	60.000	hektar	47.700.000	-	hektar	-
01.622.002	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2			1.571.700.000			757.494.000
01.622.002.103	Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya jagung hibrida varietas umum 2	2.015.000	hektar	1.571.700.000	1.009.992	hektar	757.494.000
01.622.003	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Litbang			1.105.500.000			1.134.044.160
01.622.003.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Litbang	1.675.000	hektar	1.105.500.000	1.758.208	hektar	1.134.044.160
01.622.004	Fasilitas Penerapan Budidayda Jagung Komposit			49.912.501			7.562.500
01.622.004.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Komposi	165.000	hektar	49.912.501	25.000	hektar	7.562.500
01.622.005	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Perbatasan			62.400.000			-
01.622.005.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Hibrida Perbatasan	80.000	hektar	62.400.000	-	hektar	-
01.622.006	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Eks Lahan Tambang			2.975.000			10.697.000
01.622.006.103	Melaksanakan Bantuan Budidaya Jagung Lahan Eks Tambang	2.000	Hektar	2.975.000	7.000	Hektar	10.697.000
01.622.007	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Varietas Unggul Baru			3.480.000			3.480.000
01.622.007.103	Melaksanakan Penyaluran Sarana Produksi Bantuan Budidaya Jagung Varietas Unggul Baru	3.000	Hektar	3.480.000	3.000	Hektar	3.480.000
01.622.008	Fasilitas Penerapan Budidaya Serealia Lainnya			1.193.750			1.193.750

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01.622.008.103	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Budidaya Pengembangan Gandum	250,0	Hektar	782.500	250,0	Hektar	782.500
01.622.008.104	SorgumMelaksanakan Penyaluran Bantuan Budidaya Pengembangan	250,0	Hektar	411.250	250,0	Hektar	411.250
1,624	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	12	Bulan	81.214.800	12	Bulan	81.214.800
01.624.003	Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Serealia			81.214.800			81.214.800
01.624.003.105	Melaksanakan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia	5.508	Laporan	81.214.800	5.508	Laporan	81.214.800
1,625	Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik	55.000	Hektar	409.615.000	55.000	Hektar	409.615.000
01.625.625	Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik			409.615.000			409.615.000
01.625.625.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Budidaya Sarana Produksi Budidaya Padi Organik	55.000	Hektar	34.615.000	55.000	Hektar	34.615.000
01.625.625.106	Melaksanakan Penyaluran UPPO	1.500	Unit	375.000.000	1.500	Unit	375.000.000
Total				**4.010.230.650**			**2.855.021.225**

c. Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman

Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman tahun 2018 sebesar Rp. 113.000.000.000,- menjadi Rp. 810.152.800.000,- dengan output: a) Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan seluas 75.000 Ha degan pagu Rp. 44.589.108.000, b) Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan sebanyak 12 Bulan di 33 Provinsi dengan pagu Rp. 11.578.246. 000, c) Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Padi seluas 294 Ha dengan pagu Rp. 9.637.642.000 d) Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Jagung seluas 93 Hektar dengan pagu Rp. 1.648.601.000 e) Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Kedelai seluas 205 Ha dengan pagu Rp. 3.447.825.000 f) Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Palawija Lainnya seluas 8 Ha dengan pagu Rp. 163.680.000 dan g) Fasilitas Penyediaan Benih bersertifikat seluas 2.198.000 Ha dengan anggaran Rp. 697.467.553.000.

h) Fasilitas Desa Mandiri Benih sebanyank 205 unit dengan Pagu Rp. 41.620.145.000.

Tabel 5. Rincian Kegiatan dan Anggaran Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman 2018

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01	Terselenggaranya Sistem Pembinaan Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Efisien di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat			113.000.000			810.152.800
01.632	Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	75.000	hektar	44.692.600	75.000	hektar	44.589.108
01.632.001	Tanpa Sub Output			44.692.600			44.589.108
01.632.001.101	Melaksanakan Pengembangan dan Penilaian Varietas Benih Tanaman Pangan	473,0	Laporan	10.841.323	473,0	Laporan	10.459.565
01.632.001.102	Melaksanakan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	75.000	Hektar	33.851.277	75.000	Hektar	34.129.543
01.634	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	12	Bulan	17.214.150	12	Bulan	11.578.246
01.634.001	Tanpa Sub Output			17.214.150			11.578.246
01.634.001.101	Melaksanakan Program dan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan				1	Laporan	1.875.369
01.634.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1,0	Laporan	6.422.150	1,0	Laporan	2.232.135
01.634.001.103	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengelolaan	31,0	Laporan	9.652.665	1	Laporan	3.091.356

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
	Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan						
01.634.001.104	Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan	1,0	Laporan	1.139.335	1,0	Laporan	4.397.386
1,635	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Padi	294	hektar	4.116.000	294	hektar	9.637.642
01.635.001	Tanpa Sub Output			4.116.000			9.637.642
01.635.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Padi	294,0	hektar	4.116.000	294,0	hektar	4.078.334
01.635.001.101	Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber				31,0	Laporan	5.559.308
01.636	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Jagung	93	hektar	1.697.250	93	hektar	1.648.601
01.636.001	Tanpa Sub Output			1.697.250			1.648.601
01.636.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Jagung	93,0	hektar	1.697.250	93,0	hektar	1.648.601
01.637	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Kedelai	205	hektar	3.485.000	205	hektar	3.447.825
01.637.001	Tanpa Sub Output			3.485.000			3.447.825
01.637.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Kedelai	205,0	hektar	3.485.000	205,0	hektar	3.447.825
01.638	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Palawija Lainnya	8	hektar	176.000	8	hektar	163.680
01.638.001	Tanpa Sub Output			176.000			163.680
01.638.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Palawija Lainnya	8,0	hektar	176.000	8,0	hektar	163.680
01.639	Fasilitas Desa Mandiri Benih	205	unit	41.619.000	208	unit	41.620.145

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01.639.001	Tanpa Sub Output			41.619.000			41.620.145
01.639.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Benih Bersertifikat	205,0	unit	38.150.000	208,0	unit	37.400.000
01.639.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Produksi Benih Bersertifikat	33,0	Laporan	3.469.000	33,0	Laporan	4.220.145
Total				**113.000.000**			**810.152.800**

d. Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI tahun 2018 sebesar Rp. 248.853.654.000,- menjadi Rp. 247.153.654.000,- dengan output: a) Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT seluas 41.820 Ha dengan pagu Rp. 105.960.575.000, b) Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman 2.385 LHP/Sertifikat dengan pagu Rp. 7.000.000.000, c) Penerapan Penanganan DPI sebanyak 400 Ha dengan pagu Rp. 1.853.825.000, d) Fasilitas Dukungan Teknis Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI 12 Bulan dengan pagu Rp. 32.166.972.000 e) Sarana dan Bahan Pengendalian OPT seluas 25.000 Ha dengan pagu Rp. 100.172.282.000.

Tabel 6. Rincian Kegiatan dan Anggaran Penguatan Perlindungan TP dan Gangguan OPT dan DPI 2018

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01	Mengamankan Produksi Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan DPI			248.853.654			247.153.654
1,641	Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	41.820	Hektar	105.960.575	41.820	Hektar	105.960.575
01.641.001	Tanpa Sub Output			105.960.575			105.960.575

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01.641.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan	6.027	Laporan	46.340.870	6.027	Laporan	46.340.870
01.641.001.103	Melaksanakan Penguatan PHT	10.865	Hektar	18.895.756	10.865	Hektar	18.895.756
01.641.001.105	Melaksanakan Gerakan Pengendalian OPT	22.550	Hektar	5.609.500	22.550	Hektar	5.609.500
01.641.001.107	Operasional BPTPH, LPHP dan BPT dan Laboratorium Pestisida	31,0	Laporan	15.178.019	31,0	Laporan	15.178.019
01.641.001.108	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	3.266	Unit	19.936.430	3.266	Unit	19.936.430
01.642	Fasilitas Dukungan Teknis Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	12	Bulan	31.351.900	12	Bulan	32.166.972
01.642.001	Tanpa Sub Ouput			31.351.900			32.166.972
01.642.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	12,0	Laporan	1.047.025	12,0	Laporan	1.029.097
01.642.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	12,0	Laporan	1.753.658	12,0	Laporan	1.753.658
01.642.001.103	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	12,0	Laporan	1.692.941	12,0	Laporan	2.151.217
01.642.001.104	Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan	12,0	Laporan	500.000	12,0	Laporan	500.000
01.642.001.105	Gedung dan Bangunan	450,0	M2	26.358.276	450,0	M2	26.733.000

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01.643	Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman	2.385	LHP/Sertifikat	7.000.000	2.385	LHP/Sertifikat	7.000.000
01.643.001	Tanpa Sub Output			7.000.000			7.000.000
01.643.001.101	Melaksanakan Pengujian Mutu Produk Tanaman	2.385	Sertifikat	7.000.000	2.385	Sertifikat	7.000.000
01.644	Penerapan Penanganan DPI	400	Hektar	1.853.825	400	Hektar	1.853.825
01.644.644	Penerapan Penanganan DPI			1.853.825			1.853.825
01.644.644.101	Penerapan Penanganan DPI	400,0	Hektar	1.853.825	400,0	Hektar	1.853.825
01.645	Sarana dan Bahan Pengendalian OPT	32.592	Ha	102.687.354	25.000	Ha	100.172.282
01.645.001	Tanpa Sub Output			102.687.354			100.172.282
01.645.001.101	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pengendalian OPT	32.592	Hektar	102.687.354	24.000	Hektar	100.172.282
Total				**248.853.654**			**247.153.654**

e. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Kegiatan penanganan pascapanen tahun 2018 sebesar Rp. 804.668.500.000,- dengan output: a) Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan sebayak 9.664 unit dengan pagu Rp. 854.605.649.000, b) Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU sebanyak 1.146 unit dengan pagu Rp. 1.001.526.800.000, c) Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 85 unit dengan pagu Rp. 8.224.600.000, d) Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan sebanyak 60 sertifikat/registrasi dengan pagu Rp. 3.985.800.000 e) Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan sebanyak 225 Informasi dengan pagu Rp. 4.944.000.000 f) Fasilitas Dukungan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 12 Bulan dengan pagu Rp. 11.215.120.000.

Tabel 7. Rincian Kegiatan dan Anggaran Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 2018

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01	Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Melalui Bantuan Sarana Pasca Panen			779.672.925			1.856.132.449
01.851	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	9.047	Unit	747.665.225	9.664	Unit	854.605.649
01.851.001	Tanpa Sub Output			747.665.225			854.605.649
01.851.001.101	Melakasanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	334	Dokumen	8.548.247	32	Dokumen	10.358.925
01.851.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	9.047	Unit	739.116.978	9.664	Unit	844.246.724
01.856	Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	92	Unit	32.007.700	1.146	Unit	1.001.526.800
01.856.001	Tanpa sub Output			32.007.700			1.001.526.800
01.856.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	92	Unit	32.007.700	1.146	Unit	1.001.526.800
02	Meningkatnya nilai tambah produk tanaman pangan melalui bantuan fasilitas pengolahan hasil			8.040.100			8.224.600
02.852	Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	83	Unit	8.040.100	85	Unit	8.224.600
02.852.001	Tanpa Sub Output			8.040.100			8.224.600
02.852.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	14	Dokumen	429.600	14	Dokumen	429.600
02.852.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pengolahan Tanaman Pangan	83	Unit	7.610.500	85	Unit	7.795.000
03	Meningkatnya mutu hasil produk tanaman pangan melalui fasilitas sertifikasi dan uji mutu			3.983.300			3.985.800
03.853	Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	60	Sertifikasi/ Registrasi	3.983.300	60	Sertifikasi/ Registrasi	3.985.800

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
03.853.001	Tanpa Sub Output			3.983.300			3.985.800
03.853.001.103	Melaksanakan Fasilitasi Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	60	Sertifikasi Jaminan Mutu	2.835.000	60	Sertifikasi Jaminan Mutu	2.835.000
03.853.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	27	Laporan	1.148.300	27	Laporan	1.150.800
04	Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri (domestik) dan luar negeri (ekspor) melalui fasilitas informasi Informasi Harga Tanaman Pangan			4.944.000			4.944.000
04.854	Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	225	Informasi	4.944.000	225	Informasi	4.944.000
04.854.001	Tanpa Sub Output			4.944.000			4.944.000
04.854.001.103	Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Informasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	225	Informasi	4.944.000	225	Informasi	4.944.000
05	Meningkatnya dukungan teknis pada kegiatan PPHTP			8.028.175			11.215.120
05.855	Fasilitas Dukungan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	12	Bulan	8.028.175	12	Bulan	11.215.120
05.855.001	Pengamanan Susut Hasil Produksi Tanaman Pangan			1.687.860			3.237.555
05.855.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1	Dokumen	84.500	1	Dokumen	310.500
05.855.001.103	Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pascapanen Tanaman Pangan	1	Dokumen	478.260	1	Dokumen	1.750.710
05.855.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1	Dokumen	1.125.100	1	Dokumen	1.176.345

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
05.855.002	Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			1.580.935			3.102.435
05.855.002.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan Tanaman Pangan	1	Dokumen	416.495	1	Dokumen	1.712.835
05.855.002.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pengolahan	1	Dokumen	1.164.440	1	Dokumen	1.389.600
05.855.103	Pengembangan Standardisasi dan Mutu Tanaman Pangan			2.326.145			3.116.910
05.855.103.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1	Dokumen	875.795	1	Dokumen	1.456.560
05.855.103.103	Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1	Dokumen	1.450.350	1	Dokumen	1.660.350
05.855.104	Pengembangan Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan			996.195			996.195
05.855.104.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1	Bulan Layanan	248.900	1	Bulan Layanan	248.900
05.855.104.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1	Bulan Layanan	254.625	1	Bulan Layanan	254.625
05.855.104.103	Melaksanakan Koordinasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1	Bulan Layanan	299.520	1	Bulan Layanan	299.520
05.855.104.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1	Bulan Layanan	193.150	1	Bulan Layanan	193.150
05.855.105	Administrasi dan Ketatausahaan Dit PPHTP			1.437.040			762.025

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
05.855.105.101	Melaksanakan Ketatausahaan dan Kepegawaian Dit PPHTP	1	Bulan Layanan	302.800	1	Bulan Layanan	302.800
05.855.105.102	Melaksanakan Keuangan dan Perlengkapan Dit PPHTP	1	Dokumen	1.134.240	1	Dokumen	459.225
Total				**804.668.500**			**1.884.501.969**

f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya tahun 2018 sebesar Rp. 292.748.701.000,- menjadi Rp. 295.120.288.000,- dengan output yaitu a) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 12 Bulan Layanan dengan pagu Rp. 231.624.937.000 , b) Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan dengan pagu Rp. 5.877.201.000 c) Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan dengan pagu Rp. 58.405.251.000.

Tabel 8. Rincian Kegiatan dan Anggaran Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 2018

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01	Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan			292.748.701			295.120.288
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12	Bulan Layanan	228.466.249	12	Bulan Layanan	231.624.937
01.950.001	Layanan Perencanaan			143.617.574			145.723.161
01.950.001.101	Penyusunan Rencana Program	12,0	Dokumen	4.342.008	12,0	Dokumen	4.342.008
01.950.001.102	Penyusunan Rencana Anggaran	67,0	Dokumen	6.669.559	67,0	Dokumen	6.669.559
01.950.001.103	Penyusunan Rencana Kerjasama	12,0	Dokumen	2.442.008	12,0	Dokumen	2.442.008

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01.950.001.104	Koordinasi Instansi Terkait Mendukung Padi Jagung dan Kedelai	12,0	Bulan	130.164.000	12,0	Bulan	132.269.587
01.950.002	Layanan Keuangan dan Perlengkapan			37.526.014			37.526.014
01.950.002.101	Pengelolaan Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	45,0	Dokumen	6.417.008	45,0	Dokumen	6.417.008
01.950.002.102	Pengelolaan Perbendaharaan	519,0	Dokumen	25.594.168	519,0	Dokumen	25.594.168
01.950.002.103	Pengelolaan Perlengkapan	12,0	Dokumen	5.514.839	12,0	Dokumen	5.514.839
01.950.003	Layanan Umum			11.762.639			11.762.639
01.950.003.101	Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	12,0	Dokumen	3.342.008	12,0	Dokumen	3.342.008
01.950.003.102	Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	12,0	Dokumen	4.213.791	12,0	Dokumen	4.213.791
01.950.003.103	Pelayanan Hukum, Humas dan Protokol	12,0	Dokumen	4.206.840	12,0	Dokumen	4.206.840
01.950.004	Layanan Evaluasi dan Pelaporan			35.560.023			35.560.023
01.950.004.101	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	45,0	Dokumen	5.542.008	45,0	Dokumen	5.542.008
01.950.004.102	Pengelolaan Data dan Informasi	46,0	Dokumen	26.676.008	46,0	Dokumen	26.676.008
01.950.004.103	Pengelolaan Layanan Rekomendasi	12,0	Dokumen	3.342.008	12,0	Dokumen	3.342.008
01.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	5.877.201	1	Layanan	5.877.201
01.951.001	Tanpa Sub Output			5.877.201			5.877.201
01.951.001.051	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	290,0	Unit	2.896.201	290,0	Unit	2.896.201
01.951.001.052	Perbaikan Gedung dan Bangunan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	17,0	Paket	2.981.000	17,0	Paket	2.981.000
01.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	58.405.251	12	Bulan Layanan	58.405.251

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01.994.001	Tanpa Sub Output			58.405.251			58.405.251
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	12,0	Bulan	45.500.732	12,0	Bulan	45.500.732
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12,0	Bulan	12.904.519	12,0	Bulan	12.904.519
Total				**292.748.701**			**295.120.288**

g. Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih

Kegiatan pengembangan metode pengujian benih tahun 2018 sebesar Rp. 11.500.000.000,- dengan output utama : a) metode pengujian mutu benih sebanyak 10 metode dengan pagu Rp. 3.437.479.000, b) Layanan Interna (Overhead) 1 Layanan dengan pagu RP. 1.560.500.000 dan Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan Rp. 6.502.021.000.

Tabel 9. Rincian Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih 2018

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01	Berkembangnya Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			11.500.000			11.500.000
01.004	Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	10	Metode	3.437.479	10	Metode	3.437.479
01.004.001	Tanpa Sub Output			3.437.479			3.437.479
01.004.001.051	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih	5	Paket	1.663.979	5	Paket	1.663.979
01.004.001.052	Melaksanakan Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih	10	Metode	1.190.000	10	Metode	1.190.000
01.004.001.053	Melaksanakan Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih	5	Sertifikat	583.500	5	Sertifikat	583.500
01.951	Layanan Internal (Overhead)	12	Bulan Layanan	1.560.500	12	Bulan Layanan	1.560.500

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01.951.001	Tanpa Sub Output			1.560.500			1.560.500
01.951.001.051	Perencanaan Kegiatan	12	rancangan	115.000	12	rancangan	115.000
01.951.001.052	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	12	bulan	320.000	12	bulan	320.000
01.951.001.053	Pengelolaan Kepegawaian dan Tata Usaha	12	bulan	200.000	12	bulan	200.000
01.951.001.054	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	45	Laporan	425.500	45	Laporan	425.500
01.951.001.055	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	25	Unit	405.000	25	Unit	405.000
01.951.001.056	Rehabilisatasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	30	M2	95.000	30	M2	95.000
01.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	6.502.021	12	Bulan Layanan	6.502.021
01.994.001	Tanpa Sub Output			6.502.021			6.502.021
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	4.676.625	12	Bulan	4.676.625
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	1.825.396	12	Bulan	1.825.396
Total		**-**	**-**	**11.500.000,00**	**-**	**-**	**11.500.000,00**

h. Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan OPT

Kegiatan pengembangan peramalan serangan OPT tahun 2018 sebesar Rp. 15.362.847.000,- menjadi Rp. 15.668.846.000,- dengan output: a) Model Peramalan OPT sebanyak 15 model dengan pagu Rp. 5.661.400.000 b) Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan dengan pagu Rp. 2.085.546.000 dan Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan dengan pagu Rp. 7.921.900-.000.

Tabel 10. Rincian Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan OPT 2018

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	SEMULA			MENJADI		
		VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME/ TARGET	SATUAN	ALOKASI 2018 (RP RIBU)
01-	Tersedianya Informasi dan Model Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Sebagai Rujukan Dalam Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			15.362.847			15.668.846
01.007	Model Peramalan OPT	15	Model	5.519.597	15	Model	5.661.400
01.007.001	tanpa sub output			5.519.597			5.661.400
01.007.001.051	Menyusun kebijakan program dan anggaran kegiatan pengembangan Peramalan OPT	3	Rancangan	590.016	3	Rancangan	590.016
01.007.001.052	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Pengembangan Informasi Data Peramalan OPT	48	Data/Informasi	2.775.003	48	Data/Informasi	2.775.006
01.007.001.053	Melaksanakan Pengembangan Teknologi Pengamatan Peramalan dan Pengendalian OPT	15	Model	1.913.380	15	Model	2.055.180
01.007.001.054	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Peramalan OPT	18	Laporan	241.198	18	Laporan	241.198
01.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan	2.085.522	1	Layanan	2.085.546
01.951.001	Tanpa Sub Output			2.085.522			2.085.546
01.951.001.053	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	695	m2	1.140.847	695	m2	1.140.871
01.951.001.054	Rencana Anggaran Balai Besar Peramalan OPT	4	Rancangan	411.700	4	Rancangan	411.700
01.951.001.057	Layanan Manajemen Keuangan	12	Bulan	515.200	12	Bulan	515.200
01.951.001.058	Layanan Manajemen BMN	12	Bulan	17.775	12	Bulan	17.775
1,994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	7.757.728	12	Bulan Layanan	7.921.900
01.994.001	Tanpa Sub Output			7.757.728			7.921.900
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	12	bulan	5.964.268	12	bulan	5.964.240
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	bulan	1.793.460	12	bulan	1.957.660
Total				**15.362.847**			**15.668.846**

BAB IV
PENUTUP

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja-K/L oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Pagu tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN, dan PNBP.

Dalam rangka mewujudkan program pemerintah yang sudah terencana tersebut tidaklah mudah, banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian, peran pihak swasta terkait, masyarakat, serta harus didukung dengan komitmen yang kuat baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Kegiatan tahun 2018 dipengaruhi oleh tersediannya dana yang terbatas, kebutuhan, kebutuhan yang besar serta pendekatan penganggaran yang selalu mengalami perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi aspek politik, desentralisasi, dan tantangan pembangunan yang dihadapi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sudah berusaha semaksimal mungkin membuat sistem penganggaran yang berbasis kinerja dan memprioritaskan kegiatan nasional, sehingga diharapkan dengan sistem pendekatan anggaran ini maka program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan dapat terwujud dengan baik.

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula
3. PROGRAM : Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Ditjen Tanaman Pangan
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2018 (RIBU)
56	Ketahanan Pangan	5.070.261.862,00
56.21	Peningkatan Produksi Pangan	4.068.735.062,00
56.22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	1.001.526.800,00
Total		5.070.261.862,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan		6.682.058.351,00
01.01	Tercapainya Produktivitas Padi	52,87	
01.02	Tercapainya Produktivitas Jagung	54,75	
01.03	Tercapainya Produktivitas Kedelai	15,41	
01.04	Tercapainya Produksi Padi	80.085.000	
01.05	Tercapainya Produksi Jagung	26.500.000	
01.06	Tercapainya Produksi Kedelai	2.340.000	
Total			6.682.058.351,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Fasilitas Usaha Budidaya, Sarana Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	6.386.938.063,00
01.01	Luas Lahan yang Mendapatkan Fasilitas Penerapan Budidaya Tanaman Pangan	
01.02	Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
01.03	Jumlah Usulan Sertifikasi atau Registrasi Penerapan Jaminan Mutu Produk Hasil Tanaman Pangan	
01.04	Jumlah Informasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	
02	Output Internal Unit Eselon I	295.120.288,00
Total		6.682.058.351,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2019	2020	2021
1761	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	562.939.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.939.569,00	586.929.025,00	611.766.269,00	628.539.631,00
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	2.855.021.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.021.225,00	2.961.639.396,70	2.956.709.396,70	2.956.709.396,70
1763	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	810.152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.152.800,00	840.382.214,00	870.815.312,00	902.745.439,00
1764	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	246.651.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.980,00	0,00	0,00	0,00	247.153.654,00	231.543.299,00	238.086.799,00	246.276.799,00
1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	295.120.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.120.288,00	330.507.734,80	337.017.108,16	348.636.800,66
1767	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	12.579.098,00	13.763.947,00	15.065.049,00
1768	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	15.668.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668.846,00	15.947.997,00	17.544.991,00	19.299.496,00
5885	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1.884.501.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.501.969,00	1.883.455.495,00	1.885.294.775,00	1.886.004.575,00
Total		6.681.556.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.980,00	0,00	0,00	0,00	6.682.058.351,00	6.862.984.259,50	6.930.998.597,86	7.003.277.186,36

Jakarta, 11 Juli 2018

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : 06 - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan
4. KEGIATAN : 1761 - Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas		562.939.569,00
01.01	Jumlah fasilitas penerapan budidaya kedelai	546000	
01.02	Dokumen pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi	32	
	Total		562.939.569,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya perluasan penerapan budidaya aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas*											562.939.569,00
01.611	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai			Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik	Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Produksi Kedelai 2,3 juta ton	Pengembangan Teknologi Budidaya Kedelai di 10 Provinsi	000 - Bukan Tematik		tidak	546.644.386,00
01.611.001	Tanpa Sub Output											546.644.386,00
	101 - Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai											23.354.400,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									200.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Selatan									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tenggara									50.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Timur									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tengah									0,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar									50.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie									50.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Bireuen									50.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara									50.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat Daya									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tamiang									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Nagan Raya									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie Jaya									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kota Subulussalam									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									200.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal									50.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara									75.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Toba Samosir									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Asahan									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Simalungun									75.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Dairi									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Karo									50.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Langkat									50.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Pakpak Bharat									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Samosir									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Batu Bara									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara									50.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas									50.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan									30.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Barat									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai									15.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Padangsidimpuan									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									200.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan									75.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Sijunjung									50.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar									50.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman									50.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Agam									50.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota									40.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman									75.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan									30.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya									50.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Solok									30.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									200.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hulu									75.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hilir									0,00
		Provinsi Riau	Kab. Kampar									40.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hulu									50.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Bengkalis									40.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hilir									50.000,00
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru									0,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									200.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Kerinci									50.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Merangin									50.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Sarolangun									50.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Muaro Jambi									20.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jambi	Kab. Tebo									100.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Bungo									50.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									300.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu									50.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir									75.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim									0,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Lahat									50.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas									75.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin									50.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin									0,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan									50.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur									75.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir									50.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang									0,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir									50.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang									30.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Prabumulih									30.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam									0,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau									50.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									200.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan									75.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong									40.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kaur									40.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Seluma									40.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Lebong									40.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									512.500,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus									75.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan									125.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur									175.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah									150.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara									100.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan									75.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang									0,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pesawaran									40.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu									75.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Lampung	Kab. Mesuji									50.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat									100.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pesisir Barat									75.000,00
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung									40.000,00
		Provinsi Lampung	Kota Metro									50.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									885.790,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor									30.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi									123.950,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur									123.950,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung									98.600,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									123.950,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya									123.950,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis									49.930,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan									33.670,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon									50.020,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka									75.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									99.020,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu									0,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang									75.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Purwakarta									50.020,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									75.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat									75.050,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran									100.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya									30.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar									30.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									910.400,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap									133.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas									80.200,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga									108.200,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara									80.200,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen									80.200,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purworejo									76.900,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang									0,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Boyolali									80.200,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Klaten									80.200,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo									67.900,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonogiri									84.700,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Karanganyar									67.900,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sragen									87.700,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan									600.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Blora									80.200,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Rembang									94.300,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati									26.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kudus									78.200,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara									67.900,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Demak									97.300,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang									67.900,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kendal									67.900,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Batang									41.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pekalongan									67.900,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pemalang									87.200,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Tegal									10.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Brebes									0,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									150.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo									50.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul									40.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul									75.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman									25.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									650.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pacitan									0,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ponorogo									75.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tulungagung									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Blitar									75.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang									150.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Probolinggo									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pasuruan									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Mojokerto									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Nganjuk									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun									0,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Magetan									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bojonegoro									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tuban									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lamongan									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bangkalan									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sampang									0,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sumenep									150.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									300.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang									200.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Lebak									100.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Tangerang									0,00
		Provinsi Banten	Kab. Serang									100.000,00
		Provinsi Banten	Kota Cilegon									50.000,00
		Provinsi Banten	Kota Serang									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									425.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah									100.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa									100.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu									150.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima									100.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara									30.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram									30.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Bima									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									325.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya									75.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									150.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Landak									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Mempawah									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sanggau									0,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Ketapang									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sintang									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sekadau									30.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Melawi									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Singkawang									10.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									250.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut									75.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru									75.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Banjar									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tapin									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu									75.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Balangan									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									300.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow									75.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa									150.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud									60.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan									125.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									200.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai									100.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									150.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Takalar									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Maros									30.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone									100.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									150.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat									30.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau									30.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									150.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo									50.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Pohuwato									100.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									250.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene									150.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar									150.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa									150.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju									150.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu									150.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah									150.000,00
	102 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kedelai											523.289.986,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Selatan									157.080,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tenggara									0,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Timur									0,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar									952.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie									380.800,00
		Provinsi Aceh	Kab. Bireuen									337.960,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara									0,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat Daya									0,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tamiang									476.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Nagan Raya									0,00
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie Jaya									314.160,00
		Provinsi Aceh	Kota Subulussalam									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal									1.335.656,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan									408.408,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara									476.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Toba Samosir									142.800,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu									452.200,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Asahan									199.920,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Simalungun									1.084.328,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Dairi									95.200,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Karo									428.400,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Langkat									1.037.680,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan									134.232,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Pakpak Bharat									285.600,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Samosir									180.880,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Batu Bara									80.920,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara									718.760,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas									380.800,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan									59.976,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Barat									47.600,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai									38.080,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Padangsidimpuan									28.560,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan									1.031.016,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Sijunjung									530.264,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar									466.480,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman									476.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Agam									487.424,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota									328.440,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman									932.960,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan									114.240,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya									297.976,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Solok									95.200,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									0,00
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hulu									1.719.312,00
		Provinsi Riau	Kab. Kampar									160.888,00
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hulu									528.360,00
		Provinsi Riau	Kab. Bengkalis									95.200,00
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hilir									476.000,00
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru									227.528,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									0,00
		Provinsi Jambi	Kab. Kerinci									666.400,00
		Provinsi Jambi	Kab. Merangin									696.864,00
		Provinsi Jambi	Kab. Sarolangun									380.800,00
		Provinsi Jambi	Kab. Muaro Jambi									178.024,00
		Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur									725.424,00
		Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat									23.800,00
		Provinsi Jambi	Kab. Tebo									2.906.456,00
		Provinsi Jambi	Kab. Bungo									476.000,00
		Provinsi Jambi	Kota Jambi									23.800,00
		Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh									47.600,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									0,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu									1.904.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir									544.544,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Lahat									710.192,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas									3.817.520,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan									952.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur									2.110.797,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir									380.800,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir									618.800,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara									556.920,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Prabumulih									111.384,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau									476.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									0,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Seluma									238.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									12.167.512,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus									1.051.008,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan									0,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur									811.104,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah									14.936.880,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara									960.568,00
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan									0,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang									0,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pesawaran									23.800,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu									1.483.216,00
		Provinsi Lampung	Kab. Mesuji									238.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat									1.797.376,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pesisir Barat									1.038.632,00
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung									0,00
		Provinsi Lampung	Kota Metro									457.912,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor									476.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi									28.560.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur									14.280.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung									4.760.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									9.520.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya									13.737.360,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis									1.904.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan									468.384,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon									1.219.512,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka									1.614.592,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									4.760.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang									1.380.400,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Purwakarta									1.012.928,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									3.332.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat									2.537.080,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran									1.799.280,00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya									244.664,00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar									476.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap									19.040.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas									3.822.280,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga									9.520.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara									3.141.600,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen									3.284.400,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purworejo									1.561.280,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Boyolali									3.182.536,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Klaten									3.046.400,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo									982.464,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonogiri									5.508.272,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Karanganyar									1.088.136,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sragen									6.683.992,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan									58.627.968,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Blora									3.217.760,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Rembang									6.689.704,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kudus									2.735.096,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara									1.290.912,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Demak									7.931.112,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang									1.285.200,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kendal									1.107.176,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Batang									952.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pekalongan									1.090.992,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pemalang									6.114.696,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Tegal									461.720,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo									2.507.568,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul									831.096,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul									3.630.928,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman									142.800,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ponorogo									5.236.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek									1.904.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tulungagung									276.080,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Blitar									7.187.600,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang									4.760.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang									1.904.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember									1.904.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi									1.789.760,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo									4.188.800,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Probolinggo									1.071.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pasuruan									2.856.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo									238.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang									571.200,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Magetan									447.440,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi									1.822.128,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bojonegoro									952.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tuban									428.400,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lamongan									6.173.720,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bangkalan									1.951.600,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sumenep									2.856.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang									18.088.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Lebak									2.380.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Serang									1.428.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat									1.904.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah									4.760.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur									2.716.056,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa									4.025.056,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu									12.426.456,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima									12.289.363,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat									993.888,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara									180.880,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram									149.464,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Bima									476.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat									111.384,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur									476.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang									590.240,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan									328.440,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu									476.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende									204.680,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada									664.480,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai									895.978,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao									1.219.512,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat									718.760,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur									523.600,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka									847.280,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									0,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas									809.200,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Landak									238.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sanggau									0,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Ketapang									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sintang									142.800,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu									190.400,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Melawi									95.200,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara									95.200,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Singkawang									0,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									0,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut									443.632,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru									1.476.552,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Banjar									476.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala									363.664,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tapin									952.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah									476.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong									875.840,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu									1.694.560,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Balangan									3.808.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow									1.904.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa									1.904.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe									476.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud									476.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan									2.856.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara									952.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara									476.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara									2.856.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan									952.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur									952.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado									952.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung									359.856,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon									285.600,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu									190.400,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai									5.488.280,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali									238.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso									3.769.920,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala									1.213.800,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli									815.864,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol									928.200,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong									580.720,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una									114.240,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi									2.570.400,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara									1.577.464,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Takalar									142.800,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Maros									380.800,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone									7.735.952,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu									70.448,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									0,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna									120.904,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe									265.608,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka									1.204.280,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan									578.816,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana									47.600,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara									157.080,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara									79.016,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur									29.512,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat									225.624,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari									147.560,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									0,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo									183.736,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Pohuwato									1.985.872,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara									443.632,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									0,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene									2.856.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar									5.712.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa									952.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju									7.339.920,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu									2.332.400,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah									4.607.680,00
01.612	**Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Kayu**								000 - Bukan Tematik		tidak	1.440.800,00
01.612.001	**Tanpa Sub Output**											1.440.800,00
	101 - Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Kayu											540.800,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									100.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bintan									50.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam									50.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									98.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi									5.700,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung									5.700,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									5.700,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat									5.700,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pacitan									20.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									100.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari									50.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong Selatan									50.000,00
	102 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Ubi Kayu											900.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai									60.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin									60.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									120.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bintan									30.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam									30.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi									60.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung									60.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									60.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat									60.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap									60.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas									60.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati									60.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pacitan									60.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Blitar									60.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari									30.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong Selatan									30.000,00
01.613	**Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar**								000 - Bukan Tematik		tidak	681.300,00
01.613.001	**Tanpa Sub Output**											681.300,00
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Jalar											381.300,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									14.910,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									16.880,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan									26.330,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									13.180,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Mojokerto									10.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari									50.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong									50.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									200.000,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Ubi Jalar											300.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									30.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan									120.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									30.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang									30.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Mojokerto									30.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari									30.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong									30.000,00
01.614	**Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Tanah**								000 - Bukan Tematik		tidak	0,00
01.614.001	**Tanpa Sub Output**											0,00
	101 - Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Tanah											0,00
	102 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Kacang Tanah											0,00
01.615	**Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau**								000 - Bukan Tematik		tidak	3.214.000,00
01.615.001	**Tanpa Sub Output**											3.214.000,00
	101 - Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Hijau											86.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									26.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo									30.000,00
	102 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Kacang Hijau											3.128.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi									30.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur									30.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									61.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya									61.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis									61.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan									30.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon									61.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka									61.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu									30.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang									61.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									61.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran									30.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar									30.750,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen									123.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan									369.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati									123.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Demak									307.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo									123.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Nganjuk									123.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun									123.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lamongan									123.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sumenep									176.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka									307.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka									307.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba									276.750,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo									30.750,00
01.616	Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya								000 - Bukan Tematik		tidak	300.000,00
01.616.001	Tanpa Sub Output											300.000,00
	101 - Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Lainnya											0,00
	102 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya											300.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									180.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									120.000,00
01.617	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi								000 - Bukan Tematik		tidak	10.659.083,00
01.617.001	Tanpa Sub Output											10.659.083,00
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Lainnya											0,00
	102 - Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Lainnya											10.459.365,00
		Pusat	Pusat									10.459.365,00
	103 - Melaksanakan Pencanangan Tanam/Panen Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi											199.718,00
		Pusat	Pusat									199.718,00
	104 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Lainnya											0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
	105 - Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan											0,00
Total												562.939.569,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas				562.939.569,00				586.929.025,00	611.766.269,00	628.539.631,00
01.611	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	546000	Ha		546.644.386,00				570.068.442,00	594.319.838,00	610.487.367,00
01.611.001	Tanpa Sub Output				546.644.386,00				570.068.442,00	594.319.838,00	610.487.367,00
01.611.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai	281,00	Laporan	83.111,74	23.354.400,00	282,00	281,00	280,00	24.172.711,00	25.021.425,00	25.743.789,00
01.611.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kedelai	546.000,00	Ha	958,41	523.289.986,00	564.976,00	584.598,00	604.507,00	545.895.731,00	569.298.413,00	584.743.578,00
01.612	Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Kayu	1500	Ha		1.440.800,00				1.488.580,00	1.537.972,00	1.589.013,00
01.612.001	Tanpa Sub Output				1.440.800,00				1.488.580,00	1.537.972,00	1.589.013,00
01.612.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Kayu	12,00	Laporan	45.066,67	540.800,00	12,00	12,00	12,00	557.080,00	573.863,00	591.166,00
01.612.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Ubi Kayu	1.500,00	Hektar	600,00	900.000,00	1.559,00	1.607,00	1.663,00	931.500,00	964.109,00	997.847,00
01.613	Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar	500	Ha		681.300,00				703.511,00	725.896,00	749.301,00
01.613.001	Tanpa Sub Output				681.300,00				703.511,00	725.896,00	749.301,00
01.613.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Jalar	8,00		47.662,50	381.300,00	8,00	8,00	8,00	394.919,00	408.457,00	422.755,00
01.613.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Ubi Jalar	500,00		600,00	300.000,00	513,00	526,00	540,00	308.592,00	317.439,00	326.546,00
01.614	Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Tanah	0	Ha		0,00				0,00	0,00	0,00
01.614.001	Tanpa Sub Output				0,00				0,00	0,00	0,00
01.614.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Tanah	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.614.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Kacang Tanah	0,00	Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.615	Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau	5000	Ha		3.214.000,00				3.325.841,00	3.442.918,00	3.563.418,00
01.615.001	Tanpa Sub Output				3.214.000,00				3.325.841,00	3.442.918,00	3.563.418,00
01.615.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Hijau	3,00	Laporan	28.666,67	86.000,00	3,00	3,00	3,00	89.010,00	92.126,00	95.351,00
01.615.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Kacang Hijau	5.000,00	Hektar	625,60	3.128.000,00	5.124,00	5.259,00	5.394,00	3.236.831,00	3.350.792,00	3.468.067,00
01.616	Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	500	Ha		300.000,00				310.500,00	321.368,00	332.615,00
01.616.001	Tanpa Sub Output				300.000,00				310.500,00	321.368,00	332.615,00
01.616.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01.616.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	500,00	Hektar	600,00	300.000,00	518,00	535,00	555,00	310.500,00	321.368,00	332.615,00
01.617	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	12	Bulan		10.659.083,00				11.032.151,00	11.418.277,00	11.817.917,00
01.617.001	Tanpa Sub Output				10.659.083,00				11.032.151,00	11.418.277,00	11.817.917,00
01.617.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	0,00	LAPORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.617.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	12,00	LAPORAN	871.613,75	10.459.365,00	12,00	12,00	12,00	10.825.443,00	11.204.334,00	11.596.486,00
01.617.001.103	Melaksanakan Pencanangan Tanam/Panen Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	12,00	LAPORAN	16.643,17	199.718,00	12,00	12,00	12,00	206.708,00	213.943,00	221.431,00
01.617.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	0,00	LAPORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.617.001.105	Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan	0,00	LAPORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					562.939.569,00	-	-	-	586.929.025,00	611.766.269,00	628.539.631,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas		562.939.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.939.569,00
01.611	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai		546.644.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.644.386,00
01.611.001	Tanpa Sub Output		546.644.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.644.386,00
01.611.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai	Pendukung	23.354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354.400,00
01.611.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kedelai	Utama	523.289.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.289.986,00
01.612	Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Kayu		1.440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.800,00
01.612.001	Tanpa Sub Output		1.440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.800,00
01.612.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Kayu	Pendukung	540.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.800,00
01.612.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Ubi Kayu	Utama	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
01.613	Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar		681.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.300,00
01.613.001	Tanpa Sub Output		681.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.300,00
01.613.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Produksi Ubi Jalar		381.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.300,00
01.613.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Ubi Jalar		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.614	Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.614.001	Tanpa Sub Output		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.614.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Tanah	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.614.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Kacang Tanah	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.615	Fasilitas Penerapan Budidaya Kacang Hijau		3.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.000,00
01.615.001	Tanpa Sub Output		3.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.000,00
01.615.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Hijau	Pendukung	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
01.615.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Kacang Hijau	Utama	3.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.000,00
01.616	Fasilitas Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.616.001	Tanpa Sub Output		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.616.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.616.001.102	Melaksanakan Penyaluran Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Utama	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.617	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi		10.659.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659.083,00
01.617.001	Tanpa Sub Output		10.659.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659.083,00
01.617.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.617.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Pendukung	10.459.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.459.365,00
01.617.001.103	Melaksanakan Pencanangan Tanam/Panen Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Pendukung	199.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.718,00
01.617.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Lainnya	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.617.001.105	Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			562.939.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.939.569,00

Jakarta, 11 Juli 2018

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : 06 - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan
4. KEGIATAN : 1762 - Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Serealia
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas		2.855.021.225,00
01.01	Produksi Padi	82500000	
01.02	Produktivitas Padi	52,72	
01.03	Produksi Jagung	28484775	
01.04	Produktivitas Jagung	53,68	
	Total		2.855.021.225,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas*											2.855.021.225,00
01.621	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi				Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Produksi Padi 79.3 juta ton	Pengembangan teknologi budidaya padi di 15 provinsi	000 - Bukan Tematik		tidak	647.352.500,00
01.621.001	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida											52.938.750,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Sawah											51.146.250,00
		Pusat	Pusat									7.500.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									1.287.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									3.605.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									2.575.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									2.060.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									2.575.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									4.892.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									4.763.750,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									1.287.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									1.873.312,50
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang									225.312,50
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo									772.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Probolinggo									50.212,50
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pasuruan									772.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang									95.275,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi									132.612,50
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lamongan									1.143.300,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bangkalan									84.975,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									1.287.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									1.287.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									1.287.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									772.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									1.287.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Paser									109.437,50
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat									55.362,50
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara									154.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur									103.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Berau									119.737,50
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara									194.412,50
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu									3.862,50
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda									32.187,50
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									112.012,50
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow									231.750,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa									193.125,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan									206.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara									193.125,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara									25.750,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan									42.487,50
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur									25.750,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai									244.625,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali									90.125,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso									115.875,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala									90.125,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli									115.875,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol									38.625,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong									115.875,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una									12.875,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi									128.750,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara									64.375,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu									12.875,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									4.635.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									772.500,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									1.287.500,00
	104 - Melaksanakan Penyaluran Bantuan Padi Inbrida Eks Cetak Sawah											1.792.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar									14.937,50
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara									14.937,50
		Provinsi Aceh	Kab. Gayo Lues									14.937,50
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Agam									14.937,50
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota									14.937,50
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan									14.937,50
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat									14.937,50
		Provinsi Riau	Kab. Kepulauan Meranti									14.937,50
		Provinsi Jambi	Kab. Merangin									14.937,50
		Provinsi Jambi	Kab. Batanghari									14.937,50
		Provinsi Jambi	Kab. Tebo									14.937,50
		Provinsi Jambi	Kab. Bungo									14.937,50
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu									14.937,50
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir									14.937,50
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas									14.937,50

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kaur									14.937,50
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang									14.937,50
		Provinsi Lampung	Kab. Mesuji									14.937,50
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan									89.625,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna									14.937,50
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Lingga									14.937,50
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya									14.937,50
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis									14.937,50
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									14.937,50
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat									14.937,50

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang									20.912,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao									8.962,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur									14.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua									14.937,50

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka									14.937,50
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									59.750,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									59.750,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut									11.950,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru									11.950,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Banjar									11.950,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan									11.950,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong									11.950,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara									29.875,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur									14.937,50
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Berau									14.937,50
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Malinau									14.937,50
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Bulungan									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow									11.950,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa									11.950,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan									11.950,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara									11.950,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan									11.950,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai									11.950,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali									11.950,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso									11.950,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol									11.950,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong									11.950,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									89.625,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo									29.875,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Pohuwato									29.875,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu									14.937,50
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah									14.937,50
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah									29.875,00
		Provinsi Maluku	Kab. Buru									14.937,50
		Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Barat									14.937,50
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara									29.875,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur									29.875,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai									29.875,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Fak Fak									11.950,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Teluk Wondama									11.950,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni									11.950,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari									11.950,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong Selatan									11.950,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong									11.950,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Raja Ampat									11.950,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Tambrauw									11.950,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Maybrat									11.950,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan									11.950,00
		Provinsi Papua	Kab. Merauke									29.875,00
		Provinsi Papua	Kab. Nabire									29.875,00
		Provinsi Papua	Kab. Keerom									29.875,00
	105 - Melaksanakan Bantuan Budidaya Padi Inbrida Corporate Farm											0,00
	106 - Melaksanakan Penyaluran Bantuan Peningkatan Produksi Padi Melalui Varietas Unggul Baru											0,00
01.621.002	**Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Hibrida**											0,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Hibrida											0,00
01.621.004	**Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi**											151.150.000,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Lahan Suboptimal Spesifik Lokasi											151.150.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									12.092.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas									45.345.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang									9.069.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Landak									9.069.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Mempawah									6.046.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sanggau									4.987.950,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Ketapang									15.115.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sintang									1.511.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu									906.900,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sekadau									1.511.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Melawi									151.150,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Singkawang									3.023.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat									2.418.400,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur									2.418.400,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas									3.778.750,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan									2.418.400,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara									4.836.800,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan									2.418.400,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan									4.836.800,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau									3.778.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur									7.859.800,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut									604.600,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru									604.600,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala									604.600,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan									604.600,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah									604.600,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Paser									453.450,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara									906.900,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur									453.450,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Berau									604.600,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara									1.813.800,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda									302.300,00
01.621.005	**Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Salibu**											0,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Salibu											0,00
01.621.006	**Fasilitas Penerapan Budidaya Minapadi**											3.243.750,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Minapadi											3.243.750,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias									21.625,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal									216.250,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Simalungun									43.250,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli									43.250,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau									108.125,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Mukomuko									43.250,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Lebong									43.250,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang									43.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi									129.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur									43.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung									108.125,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									86.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya									86.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis									43.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									129.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu									43.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang									86.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Purwakarta									43.250,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonosobo									21.625,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Klaten									108.125,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									475.750,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang									43.250,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Gresik									108.125,00
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang									54.062,50
		Provinsi Banten	Kab. Lebak									54.062,50
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur									43.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat									259.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende									21.625,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Landak									43.250,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Bulungan									21.625,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara									21.625,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon									21.625,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba									21.625,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone									43.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng									64.875,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo									21.625,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang									108.125,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Palopo									21.625,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe									43.250,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa									216.250,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai									21.625,00
		Provinsi Papua	Kab. Keerom									21.625,00
01.621.007	**Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Lahan Kering**											437.500.000,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Lahan Kering											437.500.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									9.886.625,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									54.556.687,50
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									3.771.250,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									4.375.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									4.375.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									26.250.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									6.125.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									27.350.312,50
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									3.142.562,50

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									251.562,50
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									6.562.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									4.375.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									437.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									5.632.812,50
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									11.473.437,50
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									206.937,50
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									30.625.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									27.923.437,50
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									49.389.375,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									8.750.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									14.518.437,50
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									8.750.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									4.593.750,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									10.333.750,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									14.682.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									63.675.937,50
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									4.375.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									4.375.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									10.615.937,50
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									6.713.437,50
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									3.281.250,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									875.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									5.250.000,00
01.621.008	**Fasilitas Penyaluran Budidaya Padi Khusus Lainnya**											2.520.000,00
	103 - Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya padi khusus lainnya											2.520.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara									84.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tamiang									210.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Jaya									84.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal									126.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan									84.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara									42.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang									126.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Barat									42.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Agam									42.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas									84.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat									21.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor									21.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur									42.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung									42.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									21.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya									21.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									21.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang									42.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									21.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara									21.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul									21.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Blitar									42.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang									21.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi									84.000,00
		Provinsi Bali	Kab. Tabanan									21.000,00
		Provinsi Bali	Kab. Gianyar									21.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat									42.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah									42.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur									42.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu									42.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat									42.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat									42.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende									21.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur									147.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua									21.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas									42.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Landak									42.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan									42.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Malinau									42.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Bulungan									42.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow									21.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan									21.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba									63.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng									42.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Takalar									21.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara									42.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara									42.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton									21.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna									21.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe									42.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka									42.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan									42.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat									21.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan									21.000,00
01.621.009	**Fasilitas Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi**											0,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Bantuan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi											0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.622	**Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya**				Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Produksi Jagung 23,4 juta ton	Pengembangan teknologi budidaya jagung di 10 provinsi	000 - Bukan Tematik		tidak	1.915.986.410,00
01.622.002	**Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2**											757.494.000,00
	103 - Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya jagung hibrida varietas umum 2											757.494.000,00
		Pusat	Pusat									73.409.250,00
		Provinsi Aceh	Kab. Simeulue									262.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Singkil									131.250,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Selatan									116.250,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tenggara									1.443.750,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Timur									4.200.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tengah									79.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat									131.250,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar									694.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie									171.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Bireuen									213.750,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara									1.312.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat Daya									325.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Gayo Lues									538.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tamiang									315.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Nagan Raya									39.750,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Jaya									787.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Bener Meriah									64.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie Jaya									262.500,00
		Provinsi Aceh	Kota Subulussalam									244.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias									277.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal									3.384.750,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan									2.430.750,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara									3.000.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Toba Samosir									5.498.250,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu									330.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Asahan									131.250,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Simalungun									2.625.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Dairi									8.222.250,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Karo									11.812.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang									297.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Langkat									1.863.750,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan									793.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan									4.017.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Pakpak Bharat									1.503.750,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Samosir									1.184.250,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai									1.968.750,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Batu Bara									1.116.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara									963.750,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas									2.645.250,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan									127.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara									285.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Utara									267.750,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Barat									27.750,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi									10.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Binjai									36.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Padangsidimpuan									105.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli									199.500,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan									1.250.250,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok									1.134.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Sijunjung									240.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar									954.750,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman									264.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Agam									692.250,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota									618.750,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman									1.932.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan									282.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya									197.250,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat									5.435.250,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang									52.500,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Solok									10.500,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Sawahlunto									10.500,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Payakumbuh									37.500,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman									13.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hulu									656.250,00
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hilir									834.750,00
		Provinsi Riau	Kab. Siak									29.250,00
		Provinsi Riau	Kab. Kampar									393.750,00
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hulu									656.250,00
		Provinsi Riau	Kab. Bengkalis									120.750,00
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hilir									262.500,00
		Provinsi Riau	Kab. Kepulauan Meranti									131.250,00
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru									590.250,00
		Provinsi Riau	Kota Dumai									262.500,00
		Provinsi Jambi	Kab. Kerinci									281.250,00
		Provinsi Jambi	Kab. Tebo									1.428.750,00
		Provinsi Jambi	Kab. Bungo									765.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu									1.567.500,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir									2.910.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim									1.042.500,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Lahat									652.500,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas									2.088.750,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin									3.168.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin									2.981.250,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan									2.441.250,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur									5.658.750,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir									1.305.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang									783.750,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir									431.250,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara									183.750,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang									63.750,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Prabumulih									405.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam									131.250,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau									285.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan									1.837.500,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong									262.500,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara									262.500,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kaur									142.500,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Seluma									131.250,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Mukomuko									262.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bengkulu	Kab. Lebong									152.250,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang									198.750,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah									142.500,00
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu									52.500,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									11.025.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus									210.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan									3.018.750,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur									3.733.500,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah									4.134.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara									3.150.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan									1.312.500,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang									1.706.250,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pesawaran									1.237.500,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu									420.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Mesuji									2.362.500,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat									1.181.250,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pesisir Barat									427.500,00
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung									18.750,00
		Provinsi Lampung	Kota Metro									187.500,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									1.016.250,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat									558.750,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Karimun									75.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna									187.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor									91.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi									2.362.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur									1.050.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung									2.193.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									4.668.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya									2.625.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis									525.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan									138.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon									20.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka									211.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									2.695.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu									101.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang									48.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Purwakarta									452.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									198.750,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat									131.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran									101.250,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar									18.750,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.241.250,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap									829.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas									59.250,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga									64.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara									1.016.250,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen									88.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purworejo									264.750,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonosobo									66.750,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Karanganyar									3.750,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan									3.513.750,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Blora									1.757.250,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Rembang									372.750,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati									1.312.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kudus									157.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara									211.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Demak									138.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung									24.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kendal									210.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pemalang									495.750,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo									198.750,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul									60.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul									609.750,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman									186.750,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									13.125.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang									14.936.250,00
		Provinsi Banten	Kab. Lebak									7.215.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Tangerang									26.250,00
		Provinsi Banten	Kab. Serang									1.387.500,00
		Provinsi Banten	Kota Cilegon									26.250,00
		Provinsi Banten	Kota Serang									33.750,00
		Provinsi Bali	Kab. Jembrana									52.500,00
		Provinsi Bali	Kab. Karangasem									553.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									13.125.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat									618.750,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah									2.343.750,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur									1.983.750,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa									14.411.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu									13.837.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima									14.865.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat									2.970.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara									918.750,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Bima									551.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat									753.750,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur									772.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang									1.447.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan									1.327.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara									1.155.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu									405.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor									618.750,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata									517.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur									288.750,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka									375.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada									1.447.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai									288.750,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao									1.155.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat									1.211.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah									390.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya									1.155.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo									1.155.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur									1.155.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua									288.750,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka									1.155.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas									2.100.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang									2.625.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Landak									3.885.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Mempawah									236.250,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sanggau									3.150.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Ketapang									1.312.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sintang									2.887.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu									183.750,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sekadau									1.706.250,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Melawi									787.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara									78.750,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya									525.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Singkawang									157.500,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat									232.500,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur									810.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas									2.066.250,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan									101.250,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara									2.583.750,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara									18.750,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau									18.750,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan									15.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan									386.250,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau									1.290.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas									7.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur									78.750,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya									3.750,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya									1.425.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									28.272.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut									3.495.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru									2.902.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Banjar									637.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tapin									851.250,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan									165.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah									157.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong									1.219.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu									3.892.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Balangan									2.362.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									3.172.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Paser									150.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat									161.250,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara									562.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur									161.250,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Berau									1.286.250,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara									281.250,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu									116.250,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan									18.750,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda									56.250,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Bontang									7.500,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Bulungan									378.750,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Nunukan									933.750,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow									9.285.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa									7.492.500,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe									2.527.500,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud									1.680.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan									9.723.750,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara									6.735.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara									4.207.500,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara									3.705.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan									2.745.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur									3.705.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado									337.500,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung									1.305.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon									1.680.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu									900.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									6.255.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan									146.250,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai									3.663.750,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali									288.750,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso									2.883.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala									2.306.250,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli									660.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol									1.440.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong									2.883.750,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una									3.461.250,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi									2.883.750,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara									1.005.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu									146.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar									29.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba									1.837.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng									787.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto									9.502.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Takalar									2.063.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Gowa									3.928.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai									164.250,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Maros									1.890.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan									188.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Barru									204.750,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone									5.063.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng									335.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo									1.312.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang									470.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang									6.509.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu									3.153.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja									211.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara									1.102.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur									105.750,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara									117.750,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Pare Pare									97.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Palopo									90.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton									37.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna									2.850.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe									56.250,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka									686.250,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan									2.062.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana									138.750,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi									7.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara									5.891.250,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara									56.250,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara									960.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur									686.250,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan									277.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat									1.372.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah									71.250,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan									33.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari									11.250,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau									401.250,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									24.218.250,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo									11.388.750,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo									1.368.750,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Pohuwato									7.695.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Bone Bolango									551.250,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara									2.617.500,00
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo									3.750,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									23.100.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene									1.957.500,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar									4.755.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa									1.815.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju									7.211.250,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu									6.521.250,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah									7.140.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat									575.250,00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara									1.335.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah									1.335.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Buru									667.500,00
		Provinsi Maluku	Kab. Kepulauan Aru									510.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Barat									468.750,00
		Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Timur									1.335.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Barat Daya									573.750,00
		Provinsi Maluku	Kab. Buru Selatan									468.750,00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon									7.500,00
		Provinsi Maluku	Kota Tual									18.750,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat									9.408.750,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah									4.706.250,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula									3.765.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan									2.823.750,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara									4.706.250,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur									4.706.250,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai									9.408.750,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu									4.706.250,00
		Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan									5.643.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Papua Barat	Kab. Kaimana									41.250,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Teluk Wondama									86.250,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni									78.750,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari									412.500,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong Selatan									78.750,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong									285.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Raja Ampat									78.750,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Tambrauw									41.250,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Maybrat									270.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan									461.250,00
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong									3.750,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									1.968.750,00
		Provinsi Papua	Kab. Jayawijaya									750.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Nabire									750.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Mimika									93.750,00
		Provinsi Papua	Kota Jayapura									375.000,00
01.622.003	**Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Litbang / Umum 3**											1.134.044.160,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Litbang / Umum 3											1.134.044.160,00
		Pusat	Pusat									16.179.180,00
		Provinsi Aceh	Kab. Simeulue									419.250,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Singkil									209.625,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Selatan									187.050,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tenggara									2.305.875,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Timur									6.708.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tengah									127.710,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat									209.625,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar									1.108.755,00
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie									272.835,00
		Provinsi Aceh	Kab. Bireuen									341.850,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara									2.096.250,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat Daya									519.870,00
		Provinsi Aceh	Kab. Gayo Lues									859.785,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tamiang									503.100,00
		Provinsi Aceh	Kab. Nagan Raya									63.210,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Jaya									1.257.750,00
		Provinsi Aceh	Kab. Bener Meriah									102.555,00
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie Jaya									419.250,00
		Provinsi Aceh	Kota Subulussalam									390.225,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias									436.665,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal									5.387.685,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan									3.335.295,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah									322.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara									4.791.060,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Toba Samosir									8.942.925,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu									522.450,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Asahan									209.625,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Simalungun									4.192.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Dairi									13.130.265,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Karo									18.866.250,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang									473.430,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Langkat									2.976.675,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan									1.258.395,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan									6.455.160,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Pakpak Bharat									2.401.335,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Samosir									1.948.545,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai									3.144.375,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Batu Bara									1.620.240,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara									1.413.840,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas									4.175.085,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan									203.175,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara									455.370,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Utara									421.185,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Barat									43.860,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai									32.250,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi									16.770,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Binjai									56.760,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Padangsidimpuan									167.700,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli									318.630,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai									1.259.685,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan									3.615.870,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok									822.375,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Sijunjung									764.325,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar									1.654.425,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman									421.185,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Agam									1.973.700,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota									1.666.680,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman									4.567.890,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan									449.565,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya									343.140,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat									3.225.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang									83.850,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Solok									16.770,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Sawahlunto									16.770,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Payakumbuh									59.340,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman									21.930,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									23.058.750,00
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hulu									1.048.125,00
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hilir									1.333.215,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Riau	Kab. Siak									46.440,00
		Provinsi Riau	Kab. Kampar									628.875,00
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hulu									1.048.125,00
		Provinsi Riau	Kab. Bengkalis									193.500,00
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hilir									419.250,00
		Provinsi Riau	Kab. Kepulauan Meranti									209.625,00
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru									942.345,00
		Provinsi Riau	Kota Dumai									419.250,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									4.302.150,00
		Provinsi Jambi	Kab. Kerinci									645.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Merangin									967.500,00
		Provinsi Jambi	Kab. Sarolangun									322.500,00
		Provinsi Jambi	Kab. Batanghari									129.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Muaro Jambi									903.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur									967.500,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									41.925,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu									1.864.050,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir									2.934.750,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim									896.550,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Lahat									619.200,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas									2.838.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin									3.384.960,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan									2.956.680,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur									11.205.585,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir									1.228.725,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang									596.625,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir									274.125,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara									117.390,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang									41.925,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Prabumulih									263.160,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam									83.850,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau									209.625,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									4.483.395,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan									2.934.750,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong									419.250,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara									419.250,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kaur									230.910,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Seluma									209.625,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Mukomuko									419.250,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Lebong									243.165,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang									314.115,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah									228.330,00
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu									83.850,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									19.285.500,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus									322.500,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan									5.160.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur									5.934.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah									5.160.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara									5.160.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan									2.580.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang									2.580.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pesawaran									2.580.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu									645.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Mesuji									5.160.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat									645.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pesisir Barat									645.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									1.628.625,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat									886.875,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bintan									419.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor									147.060,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi									3.773.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur									1.677.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung									3.508.800,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									7.407.825,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya									4.192.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis									838.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan									222.525,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon									22.575,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka									337.335,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									4.260.225,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu									235.425,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang									64.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Purwakarta									459.240,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									312.825,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat									209.625,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran									209.625,00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar									235.425,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.978.215,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap									1.324.830,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas									94.170,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga									102.555,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara									1.627.335,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen									141.255,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purworejo									423.120,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonosobo									106.425,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Karanganyar									5.160,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan									5.611.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Blora									2.806.395,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Rembang									594.690,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati									2.096.250,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kudus									251.550,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara									337.335,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Demak									219.300,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung									38.700,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kendal									335.400,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pemalang									791.415,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo									317.340,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul									96.105,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul									973.950,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman									297.990,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									20.962.500,00
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang									23.571.525,00
		Provinsi Banten	Kab. Lebak									11.181.075,00
		Provinsi Banten	Kab. Tangerang									41.925,00
		Provinsi Banten	Kab. Serang									2.199.450,00
		Provinsi Banten	Kota Cilegon									41.925,00
		Provinsi Banten	Kota Serang									51.600,00
		Provinsi Bali	Kab. Jembrana									83.850,00
		Provinsi Bali	Kab. Karangasem									883.650,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									20.962.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat									980.400,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah									3.715.200,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur									3.144.375,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa									22.826.550,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu									22.607.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima									23.542.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat									4.708.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara									1.451.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Bima									873.975,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat									1.283.550,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur									1.238.400,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang									2.702.550,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan									2.064.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara									1.967.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu									638.550,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor									980.400,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata									851.400,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur									403.125,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka									586.950,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende									245.100,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada									2.038.200,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai									245.100,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao									1.470.600,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat									1.909.200,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah									590.175,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya									1.967.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo									1.651.200,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur									1.967.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka									2.451.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas									3.354.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang									4.192.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Landak									6.204.900,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Mempawah									377.325,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sanggau									5.031.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Ketapang									2.096.250,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sintang									4.611.750,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu									293.475,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sekadau									2.725.125,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Melawi									1.257.750,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara									125.775,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya									838.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Singkawang									251.550,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat									361.200,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur									1.322.250,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas									3.386.250,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan									170.925,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara									4.289.250,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara									29.025,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau									29.025,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan									22.575,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan									564.375,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau									1.580.250,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas									9.675,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur									135.450,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya									12.900,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya									2.760.600,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									47.070.165,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut									6.759.600,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru									4.882.650,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Banjar									1.215.825,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tapin									1.615.725,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan									319.275,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah									303.150,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong									1.747.950,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu									7.401.375,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Balangan									4.489.200,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									3.721.650,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Paser									332.175,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat									380.550,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara									1.260.975,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur									380.550,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Berau									2.899.275,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara									632.100,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu									232.200,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan									41.925,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda									125.775,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Bontang									12.900,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Malinau									693.375,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung									1.402.875,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow									16.857.075,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa									1.354.500,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe									4.585.950,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud									3.057.300,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan									17.662.680,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara									12.235.650,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara									7.720.650,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara									6.727.350,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan									4.902.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur									6.727.350,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado									612.750,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Bitung									2.360.700,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon									3.057.300,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu									1.625.400,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									9.990.405,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan									225.750,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai									5.827.575,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali									457.950,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso									4.585.950,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala									3.670.050,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli									1.044.900,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol									2.292.975,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong									4.585.950,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una									5.505.075,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi									4.585.950,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara									1.609.275,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu									228.975,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar									46.440,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba									2.934.750,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng									1.257.750,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto									15.176.850,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Takalar									3.295.305,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Gowa									6.274.560,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai									263.160,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Maros									3.018.600,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan									301.215,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Barru									327.015,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone									8.086.365,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng									535.995,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo									2.096.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang									751.425,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang									10.396.755,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu									5.034.870,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja									338.625,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara									1.760.850,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur									168.990,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara									188.985,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Pare Pare									154.800,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Palopo									143.190,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton									54.825,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna									4.527.900,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe									87.075,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka									1.077.150,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan									3.270.150,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana									219.300,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi									12.900,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara									9.352.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara									87.075,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara									1.525.425,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur									1.096.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan									448.275,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat									2.180.100,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah									116.100,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan									58.050,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari									19.350,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau									635.325,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									38.680.650,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo									17.995.500,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo									2.167.200,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Pohuwato									12.158.250,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Bone Bolango									877.200,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara									4.140.900,00
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo									6.450,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									36.507.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene									3.125.025,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar									7.591.650,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa									2.899.275,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju									11.519.700,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu									10.419.975,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah									11.400.375,00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat									645.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara									279.930,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah									2.802.525,00
		Provinsi Maluku	Kab. Buru									1.399.650,00
		Provinsi Maluku	Kab. Kepulauan Aru									1.061.025,00
		Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Barat									980.400,00
		Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Timur									2.802.525,00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Barat Daya									645.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Buru Selatan									980.400,00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon									12.900,00
		Provinsi Maluku	Kota Tual									41.925,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat									15.028.500,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah									7.514.250,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula									6.017.850,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan									4.508.550,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara									7.514.250,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur									7.514.250,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai									15.028.500,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu									7.514.250,00
		Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan									9.017.100,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									2.631.600,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Fak Fak									12.900,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari									32.250,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong									258.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									3.144.375,00
		Provinsi Papua	Kab. Merauke									1.209.375,00
		Provinsi Papua	Kab. Kepulauan Yapen									645.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Mappi									645.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Keerom									645.000,00
01.622.004	**Fasilitas Penerapan Budidayda Jagung Komposit**											7.562.500,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Komposit											7.562.500,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka									75.625,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung									75.625,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan									151.250,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur									151.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur									302.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang									302.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan									151.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara									151.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata									151.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka									605.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende									151.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada									151.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat									302.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah									302.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya									302.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo									151.250,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa									605.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe									1.512.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan									605.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon									302.500,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.058.750,00
01.622.006	**Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Eks Lahan Tambang**											10.697.000,00
	103 - Melaksanakan Bantuan Budidaya Jagung Lahan Eks Tambang											10.697.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									140.750,00
		Provinsi Jambi	Kab. Merangin									140.750,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									281.500,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									1.126.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									281.500,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									281.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									7.037.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara									281.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Berau									281.500,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									281.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									281.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									281.500,00
01.622.007	**Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Pilot Project Berbasis Korporasi untuk Mendukung Peningkatan Produksi Jagung melalui Pemanfaatan Varietas Unggul Baru dan Populasi**											5.200.000,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Sarana Produksi Bantuan Budidaya Jagung Pilot Project Berbasis Korporasi untuk Mendukung Peningkatan Produksi Jagung melalui Pemanfaatan Varietas Unggul Baru dan Populasi											5.200.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									520.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									520.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Lebak									1.040.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									624.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									624.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									624.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo									156.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo									156.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Pohuwato									156.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara									156.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									624.000,00
01.622.008	**Fasilitas Penerapan Budidaya Serealia Lainnya**											988.750,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Bantuan Budidaya Pengembangan Gandum											691.250,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									691.250,00
	104 - Melaksanakan Penyaluran Bantuan Budidaya Pengemabangan Sorgum											297.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur									297.500,00
01.624	**Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia**								000 - Bukan Tematik		tidak	86.752.315,00
01.624.001	**Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Padi Jagung dan Serealia Lainnya**											0,00
	101 - Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Padi Jagung dan Serealia Lainnya											0,00
01.624.003	**Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Serealia**											86.752.315,00
	105 - Melaksanakan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia											86.752.315,00
		Pusat	Pusat									35.782.835,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									1.006.901,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									4.541.813,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									798.672,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									480.978,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									530.959,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									1.661.629,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									505.625,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									3.037.801,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									309.185,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									186.028,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									2.458.044,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.429.591,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									252.738,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									1.877.693,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									1.772.927,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									182.643,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									3.196.816,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									2.182.508,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									2.686.673,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									1.026.241,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									1.759.497,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									531.816,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									302.733,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									3.208.187,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.545.640,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									4.573.046,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									1.089.242,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									1.277.900,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									2.868.334,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									584.935,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									2.467.235,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									170.284,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									465.166,00
01.625	**Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik**			Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik	Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Produksi Padi 79.3 juta ton	Pengembangan teknologi budidaya padi di 15 provinsi	000 - Bukan Tematik	004 - Desa Organik (1000 desa)	tidak	204.930.000,00
01.625.625	**Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik**											204.930.000,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Budidaya Sarana Produksi Budidaya Padi Organik / Wilayah Perbatasan											4.930.000,00
		Pusat	Pusat									266.220,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Simalungun									29.580,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang									29.580,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai									29.580,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor									9.860,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi									29.580,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur									19.720,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung									19.720,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									19.720,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya									29.580,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis									19.720,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan									19.720,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon									9.860,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka									9.860,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									19.720,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu									9.860,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang									19.720,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Purwakarta									19.720,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									9.860,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi									9.860,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat									19.720,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran									9.860,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									98.600,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo									29.580,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									19.720,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu									123.250,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas									271.150,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang									295.800,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sanggau									493.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu									295.800,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									1.311.380,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Malinau									98.600,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Nunukan									394.400,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara									345.100,00
		Provinsi Papua	Kab. Merauke									345.100,00
		Provinsi Papua	Kab. Keerom									147.900,00
	106 - Melaksanakan Penyaluran UPPO											200.000.000,00
		Pusat	Pusat									25.400.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									3.000.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									15.600.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									4.000.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									3.000.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									1.000.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									7.000.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									3.200.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									3.600.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									400.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									400.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									20.000.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									17.000.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									3.000.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									17.000.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									2.400.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									4.000.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									4.000.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									3.000.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									7.000.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									5.000.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									4.000.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									4.400.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									400.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									1.000.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									3.000.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									12.000.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									6.000.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									3.400.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									5.000.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									1.000.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									1.000.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									5.400.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									4.400.000,00
Total												2.855.021.225,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas				2.855.021.225,00				2.961.639.396,70	2.956.709.396,70	2.956.709.396,70
01.621	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1230000	Hektar		647.352.500,00				692.678.554,50	692.678.554,50	692.678.554,50
01.621.001	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida				52.938.750,00				1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00
01.621.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Sawah	172.500,00	Hektar	296,50	51.146.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.621.001.104	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Padi Inbrida Eks Cetak Sawah	3.000,00	Hektar	597,50	1.792.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00
01.621.001.105	Melaksanakan Bantuan Budidaya Padi Inbrida Corporate Farm	0,00	Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.001.106	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Peningkatan Produksi Padi Melalui Varietas Unggul Baru	0,00	Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.002	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Hibrida				0,00				0,00	0,00	0,00
01.621.002.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Hibrida	0,00	Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.004	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi				151.150.000,00				0,00	0,00	0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01.621.004.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Lahan Suboptimal Spesifik Lokasi	50.000,00	Hektar	3.023,00	151.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.005	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Salibu				0,00				0,00	0,00	0,00
01.621.005.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Salibu	0,00	Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.006	Fasilitas Penerapan Budidaya Minapadi				3.243.750,00				3.243.750,00	3.243.750,00	3.243.750,00
01.621.006.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Minapadi	1.500,00	Hektar	2.162,50	3.243.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.243.750,00	3.243.750,00	3.243.750,00
01.621.007	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Lahan Kering				437.500.000,00				687.642.304,50	687.642.304,50	687.642.304,50
01.621.007.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Lahan Kering	1.000.000,00	Hektar	437,50	437.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	687.642.304,50	687.642.304,50	687.642.304,50
01.621.008	Fasilitas Penyaluran Budidaya Padi Khusus Lainnya				2.520.000,00				0,00	0,00	0,00
01.621.008.103	Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya padi khusus lainnya	3.000,00	Hektar	840,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.009	Fasilitas Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi				0,00				0,00	0,00	0,00
01.621.009.103	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi	0,00	Hektar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.622	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya	2804710	Hektar		1.915.986.410,00				1.977.278.526,20	1.977.278.526,20	1.977.278.526,20
01.622.002	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2				757.494.000,00				784.762.020,00	784.762.020,00	784.762.020,00
01.622.002.103	Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya jagung hibrida varietas umum 2	1.009.992,00	hektar	750,00	757.494.000,00	1.009.992,00	1.009.992,00	1.009.992,00	784.762.020,00	784.762.020,00	784.762.020,00
01.622.003	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Litbang / Umum 3				1.134.044.160,00				1.167.915.256,20	1.167.915.256,20	1.167.915.256,20
01.622.003.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Litbang / Umum 3	1.758.208,00	hektar	645,00	1.134.044.160,00	1.758.208,00	1.758.208,00	1.758.208,00	1.167.915.256,20	1.167.915.256,20	1.167.915.256,20
01.622.004	Fasilitas Penerapan Budidayda Jagung Komposit				7.562.500,00				7.562.500,00	7.562.500,00	7.562.500,00
01.622.004.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Komposit	25.000,00	hektar	302,50	7.562.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.562.500,00	7.562.500,00	7.562.500,00
01.622.006	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Eks Lahan Tambang				10.697.000,00				10.775.000,00	10.775.000,00	10.775.000,00
01.622.006.103	Melaksanakan Bantuan Budidaya Jagung Lahan Eks Tambang	7.600,00	Hektar	1.407,50	10.697.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	10.775.000,00	10.775.000,00	10.775.000,00
01.622.007	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Pilot Project Berbasis Korporasi untuk Mendukung Peningkatan Produksi Jagung melalui Pemanfaatan Varietas Unggul Baru dan Populasi				5.200.000,00				5.275.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00
01.622.007.103	Melaksanakan Penyaluran Sarana Produksi Bantuan Budidaya Jagung Pilot Project Berbasis Korporasi untuk Mendukung Peningkatan Produksi Jagung melalui Pemanfaatan Varietas Unggul Baru dan Populasi	5.000,00	Hektar	1.040,00	5.200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00	5.275.000,00
01.622.008	Fasilitas Penerapan Budidaya Serealia Lainnya				988.750,00				988.750,00	988.750,00	988.750,00
01.622.008.103	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Budidaya Pengembangan Gandum	250,00	Hektar	2.765,00	691.250,00	250,00	250,00	250,00	691.250,00	691.250,00	691.250,00
01.622.008.104	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Budidaya Pengemabangan Sorgum	250,00	Hektar	1.190,00	297.500,00	250,00	250,00	250,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
01.624	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	12	Bulan		86.752.315,00				86.752.316,00	86.752.316,00	86.752.316,00
01.624.001	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Padi Jagung dan Serealia Lainnya				0,00				0,00	0,00	0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01.624.001.101	Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Padi Jagung dan Serealia Lainnya	0,00	Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.624.003	Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Serealia				86.752.315,00				86.752.316,00	86.752.316,00	86.752.316,00
01.624.003.105	Melaksanakan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia	0,00	Laporan	NaN	86.752.315,00	0,00	0,00	0,00	86.752.316,00	86.752.316,00	86.752.316,00
01.625	Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik	10000	Hektar		204.930.000,00				204.930.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
01.625.625	Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik				204.930.000,00				204.930.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
01.625.625.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Budidaya Sarana Produksi Budidaya Padi Organik / Wilayah Perbatasan	10.000,00	Hektar	493,00	4.930.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00
01.625.625.106	Melaksanakan Penyaluran UPPO	1.000,00	Unit	200.000,00	200.000.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
Total					2.855.021.225,00	-	-	-	2.961.639.396,70	2.956.709.396,70	2.956.709.396,70

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman serealia yang tepat untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas		2.855.021.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.021.225,00
01.621	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi		647.352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.352.500,00
01.621.001	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida		52.938.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.938.750,00
01.621.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Sawah	Utama	51.146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.146.250,00
01.621.001.104	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Padi Inbrida Eks Cetak Sawah	Utama	1.792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.500,00
01.621.001.105	Melaksanakan Bantuan Budidaya Padi Inbrida Corporate Farm	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.001.106	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Peningkatan Produksi Padi Melalui Varietas Unggul Baru	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.002	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Hibrida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.002.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Hibrida	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.004	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi		151.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.150.000,00
01.621.004.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Inbrida Lahan Suboptimal Spesifik Lokasi	Utama	151.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.150.000,00
01.621.005	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Salibu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.005.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Salibu	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.006	Fasilitas Penerapan Budidaya Minapadi		3.243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.750,00
01.621.006.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Minapadi	Utama	3.243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243.750,00
01.621.007	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Lahan Kering		437.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.500.000,00
01.621.007.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Lahan Kering	Utama	437.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.500.000,00
01.621.008	Fasilitas Penyaluran Budidaya Padi Khusus Lainnya		2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
01.621.008.103	Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya padi khusus lainnya	Utama	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.621.009	Fasilitas Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.621.009.103	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Korporasi	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.622	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya		1.915.986.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.986.410,00
01.622.002	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2		757.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.494.000,00
01.622.002.103	Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya jagung hibrida varietas umum 2	Utama	757.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.494.000,00
01.622.003	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Litbang / Umum 3		1.134.044.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.044.160,00
01.622.003.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Litbang / Umum 3	Utama	1.134.044.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.044.160,00
01.622.004	Fasilitas Penerapan Budidayda Jagung Komposit		7.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562.500,00
01.622.004.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Jagung Komposit	Utama	7.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562.500,00
01.622.006	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Eks Lahan Tambang		10.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697.000,00
01.622.006.103	Melaksanakan Bantuan Budidaya Jagung Lahan Eks Tambang	Utama	10.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697.000,00
01.622.007	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Pilot Project Berbasis Korporasi untuk Mendukung Peningkatan Produksi Jagung melalui Pemanfaatan Varietas Unggul Baru dan Populasi		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
01.622.007.103	Melaksanakan Penyaluran Sarana Produksi Bantuan Budidaya Jagung Pilot Project Berbasis Korporasi untuk Mendukung Peningkatan Produksi Jagung melalui Pemanfaatan Varietas Unggul Baru dan Populasi	Utama	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
01.622.008	Fasilitas Penerapan Budidaya Serealia Lainnya		988.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.750,00
01.622.008.103	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Budidaya Pengembangan Gandum	Utama	691.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.250,00
01.622.008.104	Melaksanakan Penyaluran Bantuan Budidaya Pengemabangan Sorgum	Utama	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00
01.624	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia		86.752.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.752.315,00
01.624.001	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Padi Jagung dan Serealia Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.624.001.101	Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Padi Jagung dan Serealia Lainnya	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.624.003	Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Serealia		86.752.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.752.315,00
01.624.003.105	Melaksanakan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia	Pendukung	86.752.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.752.315,00
01.625	Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik		204.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.930.000,00
01.625.625	Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik		204.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.930.000,00
01.625.625.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Budidaya Sarana Produksi Budidaya Padi Organik / Wilayah Perbatasan	Utama	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00
01.625.625.106	Melaksanakan Penyaluran UPPO	Utama	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Total			2.855.021.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.021.225,00

Jakarta, 11 Juli 2018

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : 06 - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan
4. KEGIATAN : 1763 - Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Terselenggaranya Sistem Pembinaan Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Efisien di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat		810.152.800,00
01.01	Jumlah Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Tanaman Pangan	600	
01.02	Jumlah Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	75000	
01.03	Jumlah Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	205	
01.04	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Penyeddiaan Benih Tanaman Pangan	8	
	Total		810.152.800,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terselenggaranya Sistem Pembinaan Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Efisien di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat*											810.152.800,00
01.632	Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan								000 - Bukan Tematik		tidak	44.589.108,00
01.632.001	Tanpa Sub Output											44.589.108,00
	101 - Melaksanakan Pengembangan dan Penilaian Varietas Benih Tanaman Pangan											10.459.565,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									342.400,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									139.620,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									355.200,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									140.855,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									301.298,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									429.600,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									188.956,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									396.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									185.600,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									443.660,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.032.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									259.900,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									758.500,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									241.960,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									92.200,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									722.751,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									204.880,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									293.090,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									332.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									410.400,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									204.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									56.200,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									335.200,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									463.050,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									289.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									92.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									282.400,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									386.745,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									336.800,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									466.500,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									276.800,00
	102 - Melaksanakan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan											34.129.543,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									1.262.600,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									1.099.380,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									1.181.800,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									492.645,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									1.173.702,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									1.395.400,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									711.044,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									1.192.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									314.400,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									3.636.340,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									2.610.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									540.100,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									2.448.767,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									1.003.040,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									432.800,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									2.286.949,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									1.170.120,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									506.910,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									408.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									1.189.241,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									396.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									443.800,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.058.300,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									3.479.450,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									546.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									408.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									585.600,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									688.255,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									393.200,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									552.500,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									523.200,00
01.633	**Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat**			Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik	Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Produksi Padi 79.3 juta ton	Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi	000 - Bukan Tematik		tidak	697.467.553,00
01.633.001	**Tanpa Sub Output**											697.467.553,00
	101 - Melaksanakan Penyaluran Benih Bersertifikat											683.599.000,00
		Pusat	Pusat									390.049.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									25.750.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									14.162.500,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									1.802.500,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									7.042.625,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									25.750.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									3.862.500,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									20.600.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									386.250,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									51.500.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									3.862.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									25.556.875,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									10.300.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									2.060.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									7.725.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									12.102.500,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									5.150.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									14.548.750,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									2.446.250,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									515.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									4.248.750,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									6.926.750,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									38.625.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									3.991.250,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									2.060.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									0,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									515.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									643.750,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									128.750,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									1.287.500,00
	102 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyaluran Benih Bersertifikat											13.868.553,00
		Pusat	Pusat									5.618.553,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									600.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									28.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									400.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									120.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									175.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									626.250,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									165.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									471.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									80.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									87.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									927.500,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									165.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									637.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									345.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									110.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									21.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									350.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									367.500,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									200.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									417.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									130.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									80.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									200.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									300.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									676.250,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									150.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									110.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									80.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									80.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									100.000,00
01.634	**Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan**								000 - Bukan Tematik		tidak	11.578.246,00
01.634.001	**Tanpa Sub Output**											11.578.246,00
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan											1.875.369,00
		Pusat	Pusat									1.875.369,00
	102 - Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan											2.232.135,00
		Pusat	Pusat									2.232.135,00
	103 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan											3.091.356,00
		Pusat	Pusat									3.091.356,00
	104 - Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan											4.379.386,00
		Pusat	Pusat									4.379.386,00
01.635	**Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Padi**				Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Produksi Padi 79.3 juta ton	Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi	000 - Bukan Tematik		tidak	9.637.642,00
01.635.001	**Tanpa Sub Output**											9.637.642,00
	101 - Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Padi											4.078.334,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									224.885,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									84.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									252.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									65.489,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									140.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									126.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									43.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									196.020,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									322.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									84.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									84.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									84.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									56.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									280.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									182.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									196.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									42.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									84.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									98.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									70.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									196.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									280.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									342.940,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									98.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									168.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									98.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									56.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									84.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									42.000,00
	102 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber											5.559.308,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									150.699,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									512.633,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									149.335,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									119.608,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									93.699,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									129.738,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									190.510,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									386.348,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									53.081,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									284.953,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									941.205,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									41.589,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									264.399,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									134.647,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									53.444,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									326.058,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									182.007,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									97.529,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									99.905,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									116.409,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									60.507,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									114.739,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									112.785,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									252.514,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									240.049,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									71.218,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									57.573,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									127.573,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									98.349,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									57.574,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									38.631,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.636	**Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Jagung**				Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Produksi Jagung 23,4 juta ton	Pengembangan sistem perbenihan jagung di 10 provinsi	000 - Bukan Tematik		tidak	1.648.601,00
01.636.001	**Tanpa Sub Output**											1.648.601,00
	101 - Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Jagung											1.648.601,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									219.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									36.500,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									12.612,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									54.750,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									29.205,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									30.475,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									36.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									109.500,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									36.500,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									36.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									146.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									292.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									54.750,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									237.250,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									36.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									98.059,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									54.750,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									18.250,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									36.500,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									54.750,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									18.250,00
01.637	**Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Kedelai**			Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik	Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Produksi Kedelai 2,3 juta ton	Pengembangan Sistem Perbenihan Kedelai di 10 Provinsi	000 - Bukan Tematik		tidak	3.447.825,00
01.637.001	**Tanpa Sub Output**											3.447.825,00
	101 - Melaksanakan Perbanyakan Benih Kedelai											3.447.825,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									136.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									170.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									51.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									136.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									27.130,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									16.345,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									425.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									340.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									34.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									476.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									68.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									34.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									255.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									34.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									51.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									51.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									204.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									34.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									68.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									34.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									289.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									106.350,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									119.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									17.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									34.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									170.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									51.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									17.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.638	**Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Palawija Lainnya**								000 - Bukan Tematik		tidak	163.680,00
01.638.001	**Tanpa Sub Output**											163.680,00
	101 - Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Palawija Lainnya											163.680,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									31.680,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									88.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									44.000,00
01.639	**Fasilitas Desa Mandiri Benih**			Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik	Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan	Produksi Kedelai 2,3 juta ton	Pengembangan Sistem Perbenihan Kedelai di 10 Provinsi	000 - Bukan Tematik	003 - Desa Mandiri Benih (1000 desa)	tidak	41.620.145,00
01.639.001	**Tanpa Sub Output**											41.620.145,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Benih Bersertifikat											37.400.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									1.750.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									875.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									875.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									525.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									1.750.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									1.750.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									2.625.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									3.800.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									2.625.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									1.225.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									2.625.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									2.575.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									1.750.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									875.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									875.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									1.750.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									2.050.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									2.600.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									2.925.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									700.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									875.000,00
	104 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Produksi Benih Bersertifikat											4.220.145,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									159.825,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									151.881,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									89.267,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									67.023,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									118.404,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									197.060,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									66.975,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									273.744,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									32.714,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									258.181,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									265.709,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									61.962,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									223.407,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									166.234,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									37.025,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									228.184,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									119.139,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									90.290,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									101.863,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									212.427,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									78.973,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									62.412,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									184.948,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									153.955,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									196.508,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									129.719,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									70.500,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									97.524,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									87.207,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									93.053,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									68.168,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									75.864,00
Total												810.152.800,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Terselenggaranya Sistem Pembinaan Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Efisien di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat				810.152.800,00				840.382.214,00	870.815.312,00	902.745.439,00
01.632	Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	75000	hektar		44.589.108,00				46.931.020,00	49.277.571,00	52.014.449,00
01.632.001	Tanpa Sub Output				44.589.108,00				46.931.020,00	49.277.571,00	52.014.449,00
01.632.001.101	Melaksanakan Pengembangan dan Penilaian Varietas Benih Tanaman Pangan	473,00		22.113,25	10.459.565,00	504,00	535,00	566,00	10.982.545,00	11.531.672,00	12.108.257,00
01.632.001.102	Melaksanakan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	75.000,00		455,06	34.129.543,00	78.745,00	82.613,00	86.690,00	35.948.475,00	37.745.899,00	39.906.192,00
01.633	Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	2198000	Hektar		697.467.553,00				721.878.902,00	747.144.651,00	773.334.677,00
01.633.001	Tanpa Sub Output				697.467.553,00				721.878.902,00	747.144.651,00	773.334.677,00
01.633.001.101	Melaksanakan Penyaluran Benih Bersertifikat	2.198.250,00	Hektar	310,97	683.599.000,00	2.274.934,00	2.354.563,00	2.436.964,00	707.524.957,00	732.288.325,00	757.958.385,00
01.633.001.102	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyaluran Benih Bersertifikat	32,00	Laporan	433.392,28	13.868.553,00	32,00	32,00	32,00	14.353.945,00	14.856.326,00	15.376.292,00
01.634	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	12	Bulan		11.578.246,00				12.585.590,00	12.924.153,00	13.274.566,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01.634.001	Tanpa Sub Output				11.578.246,00				12.585.590,00	12.924.153,00	13.274.566,00
01.634.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1,00	Laporan	1.875.369,00	1.875.369,00	1,00	1,00	1,00	1.941.006,00	2.008.942,00	2.079.255,00
01.634.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1,00	Laporan	2.232.135,00	2.232.135,00	1,00	1,00	1,00	2.912.367,00	2.912.367,00	2.912.367,00
01.634.001.103	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1,00	Laporan	3.091.356,00	3.091.356,00	1,00	1,00	1,00	3.199.553,00	3.311.537,00	3.427.441,00
01.634.001.104	Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan	1,00	Laporan	4.379.386,00	4.379.386,00	1,00	1,00	1,00	4.532.664,00	4.691.307,00	4.855.503,00
01.635	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Padi	294	hektar		9.637.642,00				10.119.122,00	10.625.503,00	11.156.781,00
01.635.001	Tanpa Sub Output				9.637.642,00				10.119.122,00	10.625.503,00	11.156.781,00
01.635.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Padi	294,00	Hektar	13.871,88	4.078.334,00	294,00	294,00	294,00	4.281.850,00	4.496.364,00	4.721.186,00
01.635.001.102	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber	31,00	Laporan	179.332,52	5.559.308,00	31,00	31,00	31,00	5.837.272,00	6.129.139,00	6.435.595,00
01.636	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Jagung	93	hektar		1.648.601,00				1.731.035,00	1.817.584,00	1.908.462,00
01.636.001	Tanpa Sub Output				1.648.601,00				1.731.035,00	1.817.584,00	1.908.462,00
01.636.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Jagung	93,00		17.726,89	1.648.601,00	93,00	93,00	93,00	1.731.035,00	1.817.584,00	1.908.462,00
01.637	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Kedelai	205	hektar		3.447.825,00				3.620.217,00	3.801.232,00	3.991.288,00
01.637.001	Tanpa Sub Output				3.447.825,00				3.620.217,00	3.801.232,00	3.991.288,00
01.637.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Kedelai	205,00		16.818,66	3.447.825,00	205,00	205,00	205,00	3.620.217,00	3.801.232,00	3.991.288,00
01.638	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Palawija Lainnya	8	hektar		163.680,00				171.864,00	180.457,00	189.481,00
01.638.001	Tanpa Sub Output				163.680,00				171.864,00	180.457,00	189.481,00
01.638.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Palawija Lainnya	8,00		20.460,00	163.680,00	8,00	8,00	8,00	171.864,00	180.457,00	189.481,00
01.639	Fasilitas Desa Mandiri Benih	208	unit		41.620.145,00				43.344.464,00	45.044.161,00	46.875.735,00
01.639.001	Tanpa Sub Output				41.620.145,00				43.344.464,00	45.044.161,00	46.875.735,00
01.639.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Benih Bersertifikat	208,00		179.807,69	37.400.000,00	208,00	208,00	208,00	38.918.200,00	40.384.840,00	41.983.077,00
01.639.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Produksi Benih Bersertifikat	32,00		131.879,53	4.220.145,00	43,00	32,00	32,00	4.426.264,00	4.659.321,00	4.892.658,00
Total					810.152.800,00	-	-	-	840.382.214,00	870.815.312,00	902.745.439,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terselenggaranya Sistem Pembinaan Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Efisien di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat		810.152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.152.800,00
01.632	Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan		44.589.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.589.108,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.632.001	Tanpa Sub Output		44.589.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.589.108,00
01.632.001.101	Melaksanakan Pengembangan dan Penilaian Varietas Benih Tanaman Pangan	Utama	10.459.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.459.565,00
01.632.001.102	Melaksanakan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan		34.129.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.129.543,00
01.633	Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat		697.467.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.467.553,00
01.633.001	Tanpa Sub Output		697.467.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.467.553,00
01.633.001.101	Melaksanakan Penyaluran Benih Bersertifikat	Utama	683.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.599.000,00
01.633.001.102	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyaluran Benih Bersertifikat	Pendukung	13.868.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868.553,00
01.634	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan		11.578.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578.246,00
01.634.001	Tanpa Sub Output		11.578.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578.246,00
01.634.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Utama	1.875.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.369,00
01.634.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Utama	2.232.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.135,00
01.634.001.103	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Utama	3.091.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.356,00
01.634.001.104	Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan	Utama	4.379.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.386,00
01.635	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Padi		9.637.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637.642,00
01.635.001	Tanpa Sub Output		9.637.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637.642,00
01.635.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Padi	Utama	4.078.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.334,00
01.635.001.102	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perbanyakan Benih Sumber	Pendukung	5.559.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559.308,00
01.636	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Jagung		1.648.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.601,00
01.636.001	Tanpa Sub Output		1.648.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.601,00
01.636.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Jagung	Utama	1.648.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.601,00
01.637	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Kedelai		3.447.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.825,00
01.637.001	Tanpa Sub Output		3.447.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.825,00
01.637.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Kedelai	Utama	3.447.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.825,00
01.638	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Palawija Lainnya		163.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.680,00
01.638.001	Tanpa Sub Output		163.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.680,00
01.638.001.101	Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Palawija Lainnya	Utama	163.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.680,00
01.639	Fasilitas Desa Mandiri Benih		41.620.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.620.145,00
01.639.001	Tanpa Sub Output		41.620.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.620.145,00
01.639.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Benih Bersertifikat	Utama	37.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400.000,00
01.639.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Produksi Benih Bersertifikat	Utama	4.220.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.145,00
Total			810.152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.152.800,00

Jakarta, 11 Juli 2018

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : 06 - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan
4. KEGIATAN : 1764 - Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Mengamankan Produksi Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan DPI		247.153.654,00
01.01	Jumlah Luasan Lahan yang Mendapatkan Penerapan Pemantapan PHT	10845	
01.02	Jumlah Luasan Lahan yang Mendapatkan Penerapan Penanganan DPI	400	
01.03	Jumlah Luasan Lahan yang Mendapatkan Gerakan Pengendalian OPT	27460	
01.04	Jumlah LHP/Sertifikat Mutu Produk	2385	
Total			247.153.654,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Mengamankan Produksi Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan DPI*											247.153.654,00
01.641	Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT								000 - Bukan Tematik		tidak	105.960.575,00
01.641.001	Tanpa Sub Output											105.960.575,00
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan											46.340.870,00
		Pusat	Pusat									4.885.370,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									2.206.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									3.105.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									1.360.500,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									1.150.500,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									916.500,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									1.411.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									426.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									1.321.500,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									189.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									19.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									2.713.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									3.252.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									610.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									3.954.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									1.138.500,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									396.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									1.081.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									1.459.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									1.296.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									843.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									1.338.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									1.084.500,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									1.191.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.192.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									2.430.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									1.384.500,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									657.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									588.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									652.500,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									664.500,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									780.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									642.000,00
	102 - Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan											0,00
	103 - Melaksanakan Penguatan PHT											18.895.756,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									593.592,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									834.288,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									577.692,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									152.448,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									280.680,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									1.099.188,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									192.564,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									1.202.988,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									40.116,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									1.171.284,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									2.181.804,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									425.112,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									2.558.784,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									529.344,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									120.348,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									1.122.936,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									422.596,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									593.592,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									320.796,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									729.924,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									216.564,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									601.644,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									409.128,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									1.234.572,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									465.180,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									336.948,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									112.332,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									206.064,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									42.816,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									42.816,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									77.616,00
	105 - Melaksanakan Gerakan Pengendalian OPT											5.609.500,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									221.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									305.500,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									221.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									39.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									45.500,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									357.500,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									39.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									299.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									6.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									617.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									552.500,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									45.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									617.500,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									123.500,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									32.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									325.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									162.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									195.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									71.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									214.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									39.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									162.500,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									104.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									520.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									78.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									91.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									52.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									32.500,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									13.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									6.500,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									19.500,00
	106 - Melaksanakan Database dan Bahan Informasi perlindungan tanaman pangan											0,00
	107 - Operasional BPTPH, LPHP dan BPT dan Laboratorium Pestisida											15.178.019,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									362.300,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									653.300,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									685.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									302.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									279.300,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									635.150,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									250.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									834.200,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									262.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									825.300,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.504.200,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									514.919,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									1.414.500,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									399.450,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									396.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									499.750,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									257.150,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									354.300,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									288.300,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									533.450,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									277.150,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									519.300,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									440.150,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									835.250,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									279.450,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									331.150,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									221.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									326.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									212.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									192.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									294.000,00
	108 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI											19.936.430,00
		Pusat	Pusat									17.878.430,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									84.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									76.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									101.500,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									59.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									67.500,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									76.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									50.500,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									76.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									42.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									118.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									110.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									59.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									110.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									67.500,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									50.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									67.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									53.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									59.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									42.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									84.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									50.500,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									76.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									76.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									84.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									67.500,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									50.500,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									50.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									44.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									34.500,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									34.500,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									34.500,00
	109 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan											0,00
01.642	Fasilitas Dukungan Teknis Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT								000 - Bukan Tematik		tidak	32.166.972,00
01.642.001	Tanpa Sub Ouput											32.166.972,00
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI											1.029.097,00
		Pusat	Pusat									1.029.097,00
	102 - Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI											1.753.658,00
		Pusat	Pusat									1.753.658,00
	103 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI											2.151.217,00
		Pusat	Pusat									2.151.217,00
	104 - Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan											500.000,00
		Pusat	Pusat									500.000,00
	105 - Gedung dan Bangunan											26.733.000,00
		Pusat	Pusat									26.733.000,00
01.643	Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman								000 - Bukan Tematik		tidak	7.000.000,00
01.643.001	Tanpa Sub Output											7.000.000,00
	101 - Melaksanakan Pengujian Mutu Produk Tanaman											7.000.000,00
		Pusat	Pusat									7.000.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									0,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									0,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									0,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									0,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									0,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									0,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									0,00
01.644	**Penerapan Penanganan DPI**								007 - Adaptasi perubahan iklim		tidak	1.853.825,00
01.644.644	**Penerapan Penanganan DPI**											1.853.825,00
	101 - Penerapan Penanganan DPI											1.853.825,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									75.600,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									95.070,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									151.200,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									85.335,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									47.535,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									142.605,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									142.605,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									95.070,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									47.535,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									209.610,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									95.070,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									37.800,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									47.535,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									47.535,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									47.535,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									190.140,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									190.140,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									47.535,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									58.370,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.645	Sarana dan Bahan Pengendalian OPT								000 - Bukan Tematik		tidak	100.172.282,00
01.645.001	Tanpa Sub Output											100.172.282,00
	101 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pengendalian OPT											100.172.282,00
		Pusat	Pusat									100.172.282,00
Total												247.153.654,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Mengamankan Produksi Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan DPI				247.153.654,00				231.543.299,00	238.086.799,00	246.276.799,00
01.641	Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	41820	Hektar		105.960.575,00				116.405.945,00	122.159.445,00	129.659.445,00
01.641.001	Tanpa Sub Output				105.960.575,00				116.405.945,00	122.159.445,00	129.659.445,00
01.641.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan	6.027,00	Laporan	7.688,88	46.340.870,00	6.027,00	6.027,00	6.027,00	46.340.870,00	46.340.870,00	46.340.870,00
01.641.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.641.001.103	Melaksanakan Penguatan PHT	10.865,00	Hektar	1.739,14	18.895.756,00	12.055,00	13.690,00	15.445,00	19.585.000,00	21.435.000,00	23.865.000,00
01.641.001.105	Melaksanakan Gerakan Pengendalian OPT	22.550,00	Hektar	248,76	5.609.500,00	23.940,00	25.520,00	27.085,00	6.713.000,00	7.780.000,00	8.870.000,00
01.641.001.106	Melaksanakan Database dan Bahan Informasi perlindungan tanaman pangan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.641.001.107	Operasional BPTPH, LPHP dan BPT dan Laboratorium Pestisida	31,00	Laporan	489.613,52	15.178.019,00	62,00	93,00	124,00	18.240.000,00	20.920.000,00	23.880.000,00
01.641.001.108	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	3.266,00	Unit	6.104,23	19.936.430,00	3.786,00	4.316,00	4.846,00	25.527.075,00	25.683.575,00	26.703.575,00
01.641.001.109	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.642	Fasilitas Dukungan Teknis Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	12	Bulan		32.166.972,00				5.600.000,00	6.100.000,00	6.500.000,00
01.642.001	Tanpa Sub Ouput				32.166.972,00				5.600.000,00	6.100.000,00	6.500.000,00
01.642.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	12,00	Laporan	85.758,08	1.029.097,00	12,00	12,00	12,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
01.642.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	12,00	Laporan	146.138,17	1.753.658,00	12,00	12,00	12,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
01.642.001.103	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	12,00	Laporan	179.268,08	2.151.217,00	12,00	12,00	12,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
01.642.001.104	Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan	12,00	Laporan	41.666,67	500.000,00	12,00	12,00	12,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
01.642.001.105	Gedung dan Bangunan	8.062,00	M2	3.315,93	26.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.643	Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman	2385	LHP/Sertifikat		7.000.000,00				4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
01.643.001	Tanpa Sub Output				7.000.000,00				4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01.643.001.101	Melaksanakan Pengujian Mutu Produk Tanaman	2.385,00	Sertifikat	2.935,01	7.000.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
01.644	Penerapan Penanganan DPI	400	Hektar		1.853.825,00				1.950.000,00	2.140.000,00	2.330.000,00
01.644.644	Penerapan Penanganan DPI				1.853.825,00				1.950.000,00	2.140.000,00	2.330.000,00
01.644.644.101	Penerapan Penanganan DPI	400,00	Hektar	4.634,56	1.853.825,00	610,00	800,00	990,00	1.950.000,00	2.140.000,00	2.330.000,00
01.645	Sarana dan Bahan Pengendalian OPT	25000	Ha		100.172.282,00				102.687.354,00	102.687.354,00	102.687.354,00
01.645.001	Tanpa Sub Output				100.172.282,00				102.687.354,00	102.687.354,00	102.687.354,00
01.645.001.101	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pengendalian OPT	24.000,00	Hektar	4.173,85	100.172.282,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102.687.354,00	102.687.354,00	102.687.354,00
Total					247.153.654,00	-	-	-	231.543.299,00	238.086.799,00	246.276.799,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Mengamankan Produksi Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan DPI		246.651.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.980,00	0,00	0,00	0,00	247.153.654,00
01.641	Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT		105.960.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.960.575,00
01.641.001	Tanpa Sub Output		105.960.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.960.575,00
01.641.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan	Pendukung	46.340.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.340.870,00
01.641.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.641.001.103	Melaksanakan Penguatan PHT	Pendukung	18.895.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895.756,00
01.641.001.105	Melaksanakan Gerakan Pengendalian OPT	Pendukung	5.609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609.500,00
01.641.001.106	Melaksanakan Database dan Bahan Informasi perlindungan tanaman pangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.641.001.107	Operasional BPTPH, LPHP dan BPT dan Laboratorium Pestisida	Utama	15.178.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.019,00
01.641.001.108	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Pendukung	19.936.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.936.430,00
01.641.001.109	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.642	Fasilitas Dukungan Teknis Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT		32.166.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.166.972,00
01.642.001	Tanpa Sub Ouput		32.166.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.166.972,00
01.642.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Pendukung	1.029.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.097,00
01.642.001.102	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Pendukung	1.753.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.658,00
01.642.001.103	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Pendukung	2.151.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.217,00
01.642.001.104	Melaksanakan Administrasi dan Ketatausahaan	Pendukung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
01.642.001.105	Gedung dan Bangunan	Utama	26.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733.000,00
01.643	Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman		6.498.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.980,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.643.001	Tanpa Sub Output		6.498.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.980,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
01.643.001.101	Melaksanakan Pengujian Mutu Produk Tanaman	Pendukung	6.498.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.980,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
01.644	Penerapan Penanganan DPI		1.853.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.825,00
01.644.644	Penerapan Penanganan DPI		1.853.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.825,00
01.644.644.101	Penerapan Penanganan DPI	Utama	1.853.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.825,00
01.645	Sarana dan Bahan Pengendalian OPT		100.172.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.172.282,00
01.645.001	Tanpa Sub Output		100.172.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.172.282,00
01.645.001.101	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pengendalian OPT	Utama	100.172.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.172.282,00
Total			246.651.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.980,00	0,00	0,00	0,00	247.153.654,00

Jakarta, 11 Juli 2018

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : 06 - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan
4. KEGIATAN : 1766 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan		295.120.288,00
01.01	Jumlah Dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I	74	
01.02	Dokumen layanan perkantoran	12	
	Total		295.120.288,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan*											295.120.288,00
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I								000 - Bukan Tematik		tidak	231.624.937,00
01.950.001	Layanan Perencanaan											145.723.160,71
	101 - Penyusunan Rencana Program											4.342.007,71
		Pusat	Pusat									4.342.007,71
	102 - Penyusunan Rencana Anggaran											6.669.558,50
		Pusat	Pusat									4.919.558,50
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									50.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									50.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									50.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									50.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									50.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									50.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									50.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									50.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									50.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									50.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									50.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									50.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									50.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									50.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									50.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									100.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									100.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									50.000,00
	103 - Penyusunan Rencana Kerjasama											2.442.007,50
		Pusat	Pusat									2.442.007,50
	104 - Koordinasi Instansi Terkait Mendukung Padi Jagung dan Kedelai											132.269.587,00
		Pusat	Pusat									132.269.587,00
01.950.002	**Layanan Keuangan dan Perlengkapan**											37.526.014,00
	101 - Pengelolaan Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan											6.417.007,50
		Pusat	Pusat									3.842.007,50
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									75.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									100.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									75.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									75.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									75.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									75.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									75.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									75.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									25.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									25.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									100.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									100.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									25.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									100.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									75.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									75.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									75.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									100.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									75.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									75.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									75.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									75.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									100.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									75.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									75.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									100.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									100.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									100.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									100.000,00
	102 - Pengelolaan Perbendaharaan											25.594.167,50
		Pusat	Pusat									5.794.607,50
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									68.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									86.520,00
		Provinsi Aceh	Kab. Simeulue									32.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Singkil									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Selatan									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tenggara									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Timur									57.840,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tengah									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat									32.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar									42.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie									32.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Aceh	Kab. Bireuen									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Utara									40.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat Daya									32.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Gayo Lues									32.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tamiang									32.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Nagan Raya									32.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Jaya									32.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Bener Meriah									36.960,00
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie Jaya									30.000,00
		Provinsi Aceh	Kota Langsa									20.000,00
		Provinsi Aceh	Kota Lhokseumawe									20.000,00
		Provinsi Aceh	Kota Subulussalam									20.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									68.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									86.520,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Toba Samosir									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Asahan									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Simalungun									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Dairi									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Karo									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Langkat									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Pakpak Bharat									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Samosir									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai									42.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Batu Bara									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara									32.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas									40.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Utara									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Nias Barat									20.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi									27.360,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Binjai									30.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli									30.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									68.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									75.480,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai									20.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok									30.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Sijunjung									30.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar									30.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman									30.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Agam									40.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota									30.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman									40.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan									40.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya									30.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat									40.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang									20.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang Panjang									20.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman									20.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									68.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									59.280,00
		Provinsi Riau	Kab. Kuantan Singingi									20.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hulu									30.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hulu									12.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Indragiri Hilir									30.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Pelalawan									32.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Siak									30.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Kampar									30.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hulu									30.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Bengkalis									20.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Rokan Hilir									30.000,00
		Provinsi Riau	Kab. Kepulauan Meranti									20.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru									20.000,00
		Provinsi Riau	Kota Dumai									20.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									54.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									67.440,00
		Provinsi Jambi	Kab. Kerinci									40.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Merangin									40.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Sarolangun									30.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Batanghari									30.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Muaro Jambi									40.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur									40.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat									30.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Tebo									40.000,00
		Provinsi Jambi	Kab. Bungo									30.000,00
		Provinsi Jambi	Kota Sungai Penuh									30.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									64.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									97.440,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu									32.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir									40.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim									30.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Lahat									40.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas									40.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin									40.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin									40.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan									40.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir									20.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang									30.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir									20.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara									30.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang									20.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Prabumulih									20.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam									30.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Lubuk Linggau									30.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									54.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									59.280,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan									30.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Rejang Lebong									30.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara									30.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kaur									30.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Seluma									30.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Mukomuko									30.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Lebong									30.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Kepahiang									30.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah									30.000,00
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu									20.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									68.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									97.440,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat									21.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tanggamus									40.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan									6.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur									60.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah									50.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Utara									40.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Way Kanan									40.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang									40.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pesawaran									40.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu									40.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Mesuji									50.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat									40.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pesisir Barat									40.000,00
		Provinsi Lampung	Kota Metro									20.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									40.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									42.960,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka									20.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung									20.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat									20.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah									27.360,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan									20.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur									20.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									40.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									32.880,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Karimun									21.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna									30.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Lingga									21.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas									20.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									128.400,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									97.440,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bogor									32.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sukabumi									50.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cianjur									50.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung									32.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Garut									50.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya									40.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis									40.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Kuningan									30.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon									40.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka									40.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Sumedang									40.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu									60.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Subang									40.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Purwakarta									40.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									30.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bekasi									20.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung Barat									48.240,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Pangandaran									40.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya									21.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar									21.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									80.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									86.520,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Cilacap									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banyumas									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purbalingga									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara									30.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kebumen									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purworejo									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonosobo									30.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Magelang									30.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Boyolali									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Klaten									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo									30.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Wonogiri									57.840,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Karanganyar									30.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Sragen									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan									66.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Blora									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Rembang									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pati									46.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kudus									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Jepara									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Demak									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Semarang									32.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Temanggung									30.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Kendal									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Batang									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pekalongan									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Pemalang									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Tegal									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Brebes									40.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang									20.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Pekalongan									20.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									50.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									59.280,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Kulon Progo									40.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Bantul									42.600,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Gunungkidul									30.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									80.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									97.440,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pacitan									30.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ponorogo									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Trenggalek									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tulungagung									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Blitar									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Kediri									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Malang									30.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lumajang									32.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Banyuwangi									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bondowoso									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Situbondo									30.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Probolinggo									30.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pasuruan									30.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo									20.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Mojokerto									30.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jombang									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Nganjuk									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Madiun									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Magetan									32.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Ngawi									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bojonegoro									60.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tuban									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lamongan									50.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Gresik									30.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Bangkalan									62.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sampang									40.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Pamekasan									30.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sumenep									46.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kota Probolinggo									20.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									50.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									75.480,00
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang									60.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Lebak									50.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Tangerang									30.000,00
		Provinsi Banten	Kab. Serang									40.000,00
		Provinsi Banten	Kota Cilegon									36.960,00
		Provinsi Banten	Kota Serang									20.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									40.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									51.120,00
		Provinsi Bali	Kab. Jembrana									30.000,00
		Provinsi Bali	Kab. Tabanan									30.000,00
		Provinsi Bali	Kab. Badung									21.000,00
		Provinsi Bali	Kab. Gianyar									20.000,00
		Provinsi Bali	Kab. Klungkung									30.000,00
		Provinsi Bali	Kab. Bangli									21.000,00
		Provinsi Bali	Kab. Karangasem									30.000,00
		Provinsi Bali	Kab. Buleleng									30.000,00
		Provinsi Bali	Kota Denpasar									20.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									80.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									108.480,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa									60.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu									60.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara									30.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram									20.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Bima									32.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									65.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									97.440,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor									30.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende									30.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao									30.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo									40.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua									30.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									86.520,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sambas									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Landak									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Mempawah									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sanggau									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Ketapang									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sintang									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Sekadau									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Melawi									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Singkawang									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									86.520,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara									20.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Katingan									42.600,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas									20.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur									20.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya									20.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya									20.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									86.520,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Banjar									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tapin									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara									32.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Balangan									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									67.440,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Paser									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat									30.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Berau									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara									46.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan									20.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda									20.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Bontang									19.320,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									40.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									51.120,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Malinau									20.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Bulungan									20.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung									20.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Nunukan									30.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan									32.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									97.440,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									75.480,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan									20.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Donggala									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Buol									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una Una									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Sigi									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara									32.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu									20.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									80.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									97.440,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng									46.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Takalar									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Gowa									46.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Maros									46.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Barru									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng									46.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo									46.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang									46.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang									46.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar									20.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Pare Pare									20.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Palopo									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									97.440,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton									32.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka									32.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur									32.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan									20.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah									20.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan									20.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari									20.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau									20.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									50.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									86.520,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo									40.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo									40.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Pohuwato									40.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Bone Bolango									40.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara									40.000,00
		Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo									20.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									75.480,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Majene									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamasa									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu									40.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah									40.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									50.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									75.480,00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat									30.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tenggara									40.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Tengah									40.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Buru									40.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Kepulauan Aru									30.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Barat									30.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Seram Bagian Timur									40.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Maluku Barat Daya									20.000,00
		Provinsi Maluku	Kab. Buru Selatan									20.000,00
		Provinsi Maluku	Kota Ambon									20.000,00
		Provinsi Maluku	Kota Tual									20.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									50.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									86.520,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat									50.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah									40.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula									48.240,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan									30.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara									40.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur									40.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai									40.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu									20.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate									20.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan									40.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									50.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									51.120,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Fak Fak									30.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Kaimana									30.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Teluk Wondama									40.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni									20.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari									40.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong Selatan									30.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong									40.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Raja Ampat									20.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Tambrauw									20.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Maybrat									20.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan									32.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong									20.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									50.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									41.040,00
		Provinsi Papua	Kab. Merauke									40.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Jayawijaya									20.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura									30.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Nabire									32.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Papua	Kab. Biak Numfor									20.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Mimika									32.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Keerom									40.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Waropen									20.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Mamberamo Raya									19.320,00
		Provinsi Papua	Kota Jayapura									20.000,00
	103 - Pengelolaan Perlengkapan											5.514.839,00
		Pusat	Pusat									5.514.839,00
01.950.003	**Layanan Umum**											11.762.638,79
	101 - Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi											3.342.007,50
		Pusat	Pusat									3.342.007,50
	102 - Pelayanan Umum dan Rumah Tangga											4.213.791,00
		Pusat	Pusat									4.213.791,00
	103 - Pelayanan Hukum, Humas dan Protokol											4.206.840,29
		Pusat	Pusat									4.206.840,29
01.950.004	**Layanan Evaluasi dan Pelaporan**											36.613.123,50
	101 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi											5.542.007,50
		Pusat	Pusat									3.842.007,50
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									50.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									75.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									50.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									50.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									50.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									50.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									50.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									50.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									25.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									25.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									75.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									75.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									25.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									75.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									50.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									50.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									50.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									75.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									50.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									50.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									50.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									50.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									50.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									50.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									50.000,00
	102 - Pengelolaan Data dan Informasi											27.729.108,50
		Pusat	Pusat									6.124.108,50
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									893.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									1.383.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									587.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									518.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									434.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									740.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									419.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									581.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									166.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									202.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									132.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									1.893.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.794.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									232.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									2.709.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									515.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									392.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									398.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									968.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									560.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									419.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									494.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									359.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									155.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									551.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									569.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									975.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									695.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									257.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									248.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									404.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									155.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									410.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									398.000,00
	103 - Pengelolaan Layanan Rekomendasi											3.342.007,50
		Pusat	Pusat									3.342.007,50
01.951	Layanan Internal (Overhead)								000 - Bukan Tematik		tidak	5.090.100,00
01.951.001	Tanpa Sub Output											5.090.100,00
	007 - Peralatan dan Mesin											0,00
	051 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran											2.896.201,00
		Pusat	Pusat									2.896.201,00
	052 - Perbaikan Gedung dan Bangunan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan											1.927.899,00
		Pusat	Pusat									1.927.899,00
	053 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4											0,00
	054 - Pengadaan Kendaraan Roda 2											266.000,00
		Pusat	Pusat									266.000,00
01.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		tidak	58.405.251,00
01.994.001	Tanpa Sub Output											58.405.251,00
	001 - Gaji dan Tunjangan											45.500.732,00
		Pusat	Pusat									45.500.732,00
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor											12.904.519,00
		Pusat	Pusat									12.904.519,00
Total												295.120.288,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018	PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018				VOLUME / TARGET			KEBUTUHAN (RIBU)	ALOKASI (RIBU)	
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	2019	2020	2021	2019	2020	2021
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan				295.120.288,00				330.507.734,80	337.017.108,16	348.636.800,66
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12	Bulan Layanan		231.624.937,00				264.148.718,80	268.791.403,16	278.486.538,66
01.950.001	Layanan Perencanaan				145.723.160,71				153.512.060,40	155.123.174,16	156.883.670,66
01.950.001.101	Penyusunan Rencana Program	12,00	Dokumen	361.833,98	4.342.007,71	12,00	12,00	12,00	5.876.208,25	6.463.829,08	7.110.211,00
01.950.001.102	Penyusunan Rencana Anggaran	67,00	Dokumen	99.545,65	6.669.558,50	67,00	67,00	67,00	12.852.164,35	13.690.869,79	14.612.805,36
01.950.001.103	Penyusunan Rencana Kerjasama	12,00	Dokumen	203.500,63	2.442.007,50	12,00	12,00	12,00	4.619.687,80	4.804.475,30	4.996.654,30
01.950.001.104	Koordinasi Instansi Terkait Mendukung Padi Jagung dan Kedelai	12,00	Bulan Layanan	11.022.465,58	132.269.587,00	12,00	12,00	12,00	130.164.000,00	130.164.000,00	130.164.000,00
01.950.002	Layanan Keuangan dan Perlengkapan				37.526.014,00				50.034.816,80	51.814.800,00	54.218.342,00
01.950.002.101	Pengelolaan Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	45,00	Dokumen	142.600,17	6.417.007,50	45,00	45,00	45,00	7.690.512,00	7.973.237,00	8.268.563,00
01.950.002.102	Pengelolaan Perbendaharaan	519,00	Dokumen	49.314,39	25.594.167,50	519,00	519,00	519,00	34.916.617,00	36.116.768,00	37.915.992,00
01.950.002.103	Pengelolaan Perlengkapan	12,00	Dokumen	459.569,92	5.514.839,00	12,00	12,00	12,00	7.427.687,80	7.724.795,00	8.033.787,00
01.950.003	Layanan Umum				11.762.638,79				19.669.205,00	19.735.974,00	20.845.412,00
01.950.003.101	Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	12,00	Dokumen	278.500,63	3.342.007,50	12,00	12,00	12,00	5.555.687,00	5.777.915,00	6.009.031,00
01.950.003.102	Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	12,00	Dokumen	351.149,25	4.213.791,00	12,00	12,00	12,00	7.517.831,00	7.098.544,00	7.702.486,00
01.950.003.103	Pelayanan Hukum, Humas dan Protokol	12,00	Dokumen	350.570,02	4.206.840,29	12,00	121,00	12,00	6.595.687,00	6.859.515,00	7.133.895,00
01.950.004	Layanan Evaluasi dan Pelaporan				36.613.123,50				40.932.636,60	42.117.455,00	46.539.114,00
01.950.004.101	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	45,00	Dokumen	123.155,72	5.542.007,50	45,00	45,00	45,00	6.788.387,80	6.967.847,00	7.309.258,00
01.950.004.102	Pengelolaan Data dan Informasi	46,00	Dokumen	602.806,71	27.729.108,50	46,00	46,00	46,00	29.628.561,80	30.453.293,00	34.345.689,00
01.950.004.103	Pengelolaan Layanan Rekomendasi	12,00	Dokumen	278.500,63	3.342.007,50	12,00	12,00	12,00	4.515.687,00	4.696.315,00	4.884.167,00
01.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan		5.090.100,00				6.143.201,00	6.143.201,00	6.143.201,00
01.951.001	Tanpa Sub Output				5.090.100,00				6.143.201,00	6.143.201,00	6.143.201,00
01.951.001.007	Peralatan dan Mesin	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.051	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	290,00	Unit	9.986,90	2.896.201,00	290,00	290,00	290,00	2.896.201,00	2.896.201,00	2.896.201,00
01.951.001.052	Perbaikan Gedung dan Bangunan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	17,00	Paket	113.405,82	1.927.899,00	17,00	17,00	17,00	2.981.000,00	2.981.000,00	2.981.000,00
01.951.001.053	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	0,00	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.054	Pengadaan Kendaraan Roda 2	10,00	Unit	26.600,00	266.000,00	10,00	10,00	10,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
01.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan		58.405.251,00				60.215.815,00	62.082.504,00	64.007.061,00
01.994.001	Tanpa Sub Output				58.405.251,00				60.215.815,00	62.082.504,00	64.007.061,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	12,00	Bulan	3.791.727,67	45.500.732,00	12,00	12,00	12,00	46.911.255,00	48.365.504,00	49.864.834,00
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12,00	Bulan	1.075.376,58	12.904.519,00	12,00	12,00	12,00	13.304.560,00	13.717.000,00	14.142.227,00
Total					295.120.288,00	-	-	-	330.507.734,80	337.017.108,16	348.636.800,66

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan		295.120.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.120.288,00
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		231.624.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.624.937,00
01.950.001	Layanan Perencanaan		145.723.160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.723.160,71
01.950.001.101	Penyusunan Rencana Program	Utama	4.342.007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342.007,71
01.950.001.102	Penyusunan Rencana Anggaran	Utama	6.669.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669.558,50
01.950.001.103	Penyusunan Rencana Kerjasama	Utama	2.442.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.007,50
01.950.001.104	Koordinasi Instansi Terkait Mendukung Padi Jagung dan Kedelai	Pendukung	132.269.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.269.587,00
01.950.002	Layanan Keuangan dan Perlengkapan		37.526.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.526.014,00
01.950.002.101	Pengelolaan Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Utama	6.417.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417.007,50
01.950.002.102	Pengelolaan Perbendaharaan	Utama	25.594.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.594.167,50
01.950.002.103	Pengelolaan Perlengkapan	Utama	5.514.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514.839,00
01.950.003	Layanan Umum		11.762.638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762.638,79
01.950.003.101	Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	Utama	3.342.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.007,50
01.950.003.102	Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	Utama	4.213.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213.791,00
01.950.003.103	Pelayanan Hukum, Humas dan Protokol	Utama	4.206.840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.840,29
01.950.004	Layanan Evaluasi dan Pelaporan		36.613.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.613.123,50
01.950.004.101	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Utama	5.542.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542.007,50
01.950.004.102	Pengelolaan Data dan Informasi	Utama	27.729.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.729.108,50
01.950.004.103	Pengelolaan Layanan Rekomendasi	Utama	3.342.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.007,50
01.951	Layanan Internal (Overhead)		5.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.100,00
01.951.001	Tanpa Sub Output		5.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.100,00
01.951.001.007	Peralatan dan Mesin	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.051	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pendukung	2.896.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.201,00
01.951.001.052	Perbaikan Gedung dan Bangunan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Pendukung	1.927.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.899,00
01.951.001.053	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.054	Pengadaan Kendaraan Roda 2	Pendukung	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
01.994	Layanan Perkantoran		58.405.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.405.251,00
01.994.001	Tanpa Sub Output		58.405.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.405.251,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	45.500.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500.732,00
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Utama	12.904.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904.519,00
Total			295.120.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.120.288,00

Jakarta, 11 Juli 2018

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : 06 - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan
4. KEGIATAN : 1767 - Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Balai Besar Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Berkembangnya Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		11.500.000,00
01.01	Jumlah Metode Pengujian Mutu Benih (Metode)	10	
Total			11.500.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Berkembangnya Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura*											11.500.000,00
01.004	Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih								000 - Bukan Tematik		tidak	3.437.479,00
01.004.001	Tanpa Sub Output											3.437.479,00
	051 - Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih											1.663.979,00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									1.663.979,00
	052 - Melaksanakan Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih											1.190.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									1.190.000,00
	053 - Melaksanakan Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih											583.500,00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									583.500,00
01.951	Layanan Internal (Overhead)								000 - Bukan Tematik		tidak	1.560.500,00
01.951.001	Tanpa Sub Output											1.560.500,00
	051 - Perencanaan Kegiatan											115.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									115.000,00
	052 - Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan											320.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									320.000,00
	053 - Pengelolaan Kepegawaian dan Tata Usaha											200.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									200.000,00
	054 - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi											425.500,00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									425.500,00
	055 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran											405.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									405.000,00
	056 - Rehabilisatasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan											95.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									95.000,00
01.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		tidak	6.502.021,00
01.994.001	Tanpa Sub Output											6.502.021,00
	001 - Gaji dan Tunjangan											4.676.625,00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									4.676.625,00
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor											1.825.396,00
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									1.825.396,00
Total												11.500.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Berkembangnya Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				11.500.000,00				12.579.098,00	13.763.947,00	15.065.049,00
01.004	Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih	10	Metode		3.437.479,00				3.781.226,00	4.159.349,00	4.575.283,00
01.004.001	Tanpa Sub Output				3.437.479,00				3.781.226,00	4.159.349,00	4.575.283,00
01.004.001.051	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih	5,00	Paket	332.795,80	1.663.979,00	5,00	5,00	5,00	1.830.376,00	2.013.414,00	2.214.755,00
01.004.001.052	Melaksanakan Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih	10,00	Metode	119.000,00	1.190.000,00	10,00	10,00	10,00	1.309.000,00	1.439.900,00	1.583.890,00
01.004.001.053	Melaksanakan Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih	5,00	Sertifikat	116.700,00	583.500,00	5,00	5,00	5,00	641.850,00	706.035,00	776.638,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan		1.560.500,00				1.645.650,00	1.737.153,00	1.835.577,00
01.951.001	Tanpa Sub Output				1.560.500,00				1.645.650,00	1.737.153,00	1.835.577,00
01.951.001.051	Perencanaan Kegiatan	12,00	rancangan	9.583,33	115.000,00	12,00	12,00	12,00	126.500,00	139.150,00	153.065,00
01.951.001.052	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	12,00	bulan	26.666,67	320.000,00	12,00	12,00	12,00	329.600,00	339.488,00	349.672,00
01.951.001.053	Pengelolaan Kepegawaian dan Tata Usaha	12,00	bulan	16.666,67	200.000,00	12,00	12,00	12,00	206.000,00	212.180,00	218.545,00
01.951.001.054	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	45,00	Laporan	9.455,56	425.500,00	45,00	45,00	45,00	468.050,00	514.855,00	566.340,00
01.951.001.055	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	25,00	Unit	16.200,00	405.000,00	27,00	29,00	31,00	417.555,00	430.499,00	443.844,00
01.951.001.056	Rehabilisatasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	30,00	M2	3.166,67	95.000,00	200,00	450,00	700,00	97.945,00	100.981,00	104.111,00
01.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan		6.502.021,00				7.152.222,00	7.867.445,00	8.654.189,00
01.994.001	Tanpa Sub Output				6.502.021,00				7.152.222,00	7.867.445,00	8.654.189,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	12,00	Bulan	389.718,75	4.676.625,00	12,00	12,00	12,00	5.144.287,00	5.658.716,00	6.224.587,00
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12,00	Bulan	152.116,33	1.825.396,00	12,00	12,00	12,00	2.007.935,00	2.208.729,00	2.429.602,00
Total					11.500.000,00	-	-	-	12.579.098,00	13.763.947,00	15.065.049,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Berkembangnya Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura		11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
01.004	Uji Terap Metode Pengujian Mutu Benih		3.437.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437.479,00
01.004.001	Tanpa Sub Output		3.437.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437.479,00
01.004.001.051	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengujian Mutu Benih	Pendukung	1.663.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.979,00
01.004.001.052	Melaksanakan Penerapan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih	Utama	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
01.004.001.053	Melaksanakan Standarisasi Laboratorium Pengujian Mutu Benih	Pendukung	583.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.500,00
01.951	Layanan Internal (Overhead)		1.560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.500,00
01.951.001	Tanpa Sub Output		1.560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.500,00
01.951.001.051	Perencanaan Kegiatan	Pendukung	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
01.951.001.052	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	Pendukung	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
01.951.001.053	Pengelolaan Kepegawaian dan Tata Usaha	Pendukung	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.951.001.054	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Utama	425.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00
01.951.001.055	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pendukung	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
01.951.001.056	Rehabilisatasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Pendukung	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
01.994	Layanan Perkantoran		6.502.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502.021,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.994.001	Tanpa Sub Output		6.502.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502.021,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	4.676.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.676.625,00
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	1.825.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.396,00
Total			11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00

Jakarta, 11 Juli 2018

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : 06 - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan
4. KEGIATAN : 1768 - Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Tersedianya Informasi dan Model Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Sebagai Rujukan Dalam Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		15.668.846,00
01.01	Jumlah model peramalan OPT	15	
Total			15.668.846,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Tersedianya Informasi dan Model Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Sebagai Rujukan Dalam Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura*											15.668.846,00
01.007	Model Peramalan OPT								000 - Bukan Tematik		tidak	5.661.400,00
01.007.001	tanpa sub output											5.661.400,00
	051 - Menyusun kebijakan program dan anggaran kegiatan pengembangan Peramalan OPT											590.016,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									590.016,00
	052 - Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Pengembangan Informasi Data Peramalan OPT											2.775.006,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									2.775.006,00
	053 - Melaksanakan Pengembangan Teknologi Pengamatan Peramalan dan Pengendalian OPT											2.055.180,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									2.055.180,00
	054 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Peramalan OPT											241.198,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									241.198,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.951	Layanan Internal (Overhead)								000 - Bukan Tematik		tidak	2.085.546,00
01.951.001	Tanpa Sub Output											2.085.546,00
	051 - Pengadaan Alat Pengolah Data											0,00
	052 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran											0,00
	053 - Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan											1.140.871,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									1.140.871,00
	054 - Rencana Anggaran Balai Besar Peramalan OPT											411.700,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									411.700,00
	055 - Pemantauan, Evaluasi Mutu Laboratorium PHP dan Agens Hayati											0,00
	056 - Pemantauan dan evaluasi kegiatan lapang BBPOPT											0,00
	057 - Layanan Manajemen Keuangan											515.200,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									515.200,00
	058 - Layanan Manajemen BMN											17.775,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									17.775,00
01.994	Layanan Perkantoran								000 - Bukan Tematik		tidak	7.921.900,00
01.994.001	Tanpa Sub Output											7.921.900,00
	001 - Gaji dan Tunjangan											5.964.240,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									5.964.240,00
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor											1.957.660,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Karawang									1.957.660,00
Total												15.668.846,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Tersedianya Informasi dan Model Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Sebagai Rujukan Dalam Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				15.668.846,00				15.947.997,00	17.544.991,00	19.299.496,00
01.007	Model Peramalan OPT	15	Model		5.661.400,00				6.071.555,00	6.678.705,00	7.346.582,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01.007.001	tanpa sub output				5.661.400,00				6.071.555,00	6.678.705,00	7.346.582,00
01.007.001.051	Menyusun kebijakan program dan anggaran kegiatan pengembangan Peramalan OPT	3,00	Rancangan	196.672,00	590.016,00	3,00	3,00	3,00	649.017,00	713.919,00	785.311,00
01.007.001.052	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Pengembangan Informasi Data Peramalan OPT	48,00	Data/Informasi	57.812,63	2.775.006,00	48,00	48,00	48,00	3.052.504,00	3.357.754,00	3.693.530,00
01.007.001.053	Melaksanakan Pengembangan Teknologi Pengamatan Peramalan dan Pengendalian OPT	15,00	Model	137.012,00	2.055.180,00	15,00	15,00	15,00	2.104.717,00	2.315.184,00	2.546.708,00
01.007.001.054	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Peramalan OPT	18,00	Laporan	13.399,89	241.198,00	18,00	18,00	18,00	265.317,00	291.848,00	321.033,00
01.951	Layanan Internal (Overhead)	1	Layanan		2.085.546,00				1.342.942,00	1.479.436,00	1.627.379,00
01.951.001	Tanpa Sub Output				2.085.546,00				1.342.942,00	1.479.436,00	1.627.379,00
01.951.001.051	Pengadaan Alat Pengolah Data	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.052	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.053	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	695,00	m2	1.641,54	1.140.871,00	695,00	695,00	695,00	305.800,00	336.380,00	370.018,00
01.951.001.054	Rencana Anggaran Balai Besar Peramalan OPT	4,00	Rancangan	102.925,00	411.700,00	4,00	4,00	4,00	452.870,00	498.157,00	547.972,00
01.951.001.055	Pemantauan, Evaluasi Mutu Laboratorium PHP dan Agens Hayati	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.056	Pemantauan dan evaluasi kegiatan lapang BBPOPT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.057	Layanan Manajemen Keuangan	12,00	Bulan	42.933,33	515.200,00	12,00	12,00	12,00	566.720,00	623.392,00	685.731,00
01.951.001.058	Layanan Manajemen BMN	12,00	Bulan	1.481,25	17.775,00	12,00	12,00	12,00	17.552,00	21.507,00	23.658,00
01.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan		7.921.900,00				8.533.500,00	9.386.850,00	10.325.535,00
01.994.001	Tanpa Sub Output				7.921.900,00				8.533.500,00	9.386.850,00	10.325.535,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	12,00	bulan	497.020,00	5.964.240,00	12,00	12,00	12,00	6.560.694,00	7.216.764,00	7.938.440,00
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12,00	bulan	163.138,33	1.957.660,00	12,00	12,00	12,00	1.972.806,00	2.170.086,00	2.387.095,00
Total					15.668.846,00	-	-	-	15.947.997,00	17.544.991,00	19.299.496,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Tersedianya Informasi dan Model Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Sebagai Rujukan Dalam Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		15.668.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668.846,00
01.007	Model Peramalan OPT		5.661.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661.400,00
01.007.001	tanpa sub output		5.661.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661.400,00
01.007.001.051	Menyusun kebijakan program dan anggaran kegiatan pengembangan Peramalan OPT	Utama	590.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.016,00
01.007.001.052	Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Pengembangan Informasi Data Peramalan OPT	Utama	2.775.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.006,00
01.007.001.053	Melaksanakan Pengembangan Teknologi Pengamatan Peramalan dan Pengendalian OPT	Utama	2.055.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.180,00
01.007.001.054	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Peramalan OPT	Pendukung	241.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.198,00
01.951	Layanan Internal (Overhead)		2.085.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.546,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.951.001	Tanpa Sub Output		2.085.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.546,00
01.951.001.051	Pengadaan Alat Pengolah Data		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.052	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.053	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Pendukung	1.140.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.871,00
01.951.001.054	Rencana Anggaran Balai Besar Peramalan OPT	Utama	411.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.700,00
01.951.001.055	Pemantauan, Evaluasi Mutu Laboratorium PHP dan Agens Hayati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.056	Pemantauan dan evaluasi kegiatan lapang BBPOPT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.951.001.057	Layanan Manajemen Keuangan	Utama	515.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.200,00
01.951.001.058	Layanan Manajemen BMN	Pendukung	17.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,00
01.994	Layanan Perkantoran		7.921.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921.900,00
01.994.001	Tanpa Sub Output		7.921.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921.900,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	Utama	5.964.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964.240,00
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	1.957.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.660,00
Total			15.668.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.668.846,00

Jakarta, 11 Juli 2018

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
2. PROGRAM : 06 - Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan
4. KEGIATAN : 5885 - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Bantuan Sarana Pasca Panen		1.856.132.449,00
01.01	Jumlah Alsintan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	9664	
01.02	Jumlah RMU/Revitalisasi RMU	1146	
02	Meningkatnya nilai tambah produk tanaman pangan bantuan fasilitas pengolahan hasil		8.224.600,00
02.01	Jumlah Penyaluran Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	85	
03	Meningkatnya mutu hasil produk tanaman pangan melalui fasilitas sertifikasi dan uji mutu		3.985.800,00
03.01	Jumlah Pengembangan Standarisasi dan Mutu	60	
04	Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri (domestik) dan luar negeri (ekspor) melalui fasilitas informasi Informasi Harga Tanaman Pangan		4.944.000,00
04.01	Jumlah Informasi Harga Tanaman Pangan	225	
05	Meningkatnya dukungan teknis pada kegiatan PPHTP		11.215.120,00
05.01	Jumlah dokumen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan	12	
Total			1.884.501.969,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Bantuan Sarana Pasca Panen*											1.856.132.449,00
01.851	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan								000 - Bukan Tematik		tidak	854.605.649,00
01.851.001	Tanpa Sub Output											854.605.649,00
	101 - Melakasanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan											10.358.925,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									271.150,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									369.900,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									278.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									320.660,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									314.785,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									452.660,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									143.380,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									236.800,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									124.940,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									468.400,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									791.300,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									104.460,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									691.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									143.300,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									186.600,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									231.860,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									167.700,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									488.900,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									309.080,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									314.080,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									259.160,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									160.300,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									404.450,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									323.700,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									625.300,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									283.600,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									127.480,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									276.300,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									316.920,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									311.660,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									532.900,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									328.200,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan											844.246.724,00
		Pusat	Pusat									737.901.045,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									3.023.900,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									3.990.650,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									2.403.500,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									1.232.100,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									2.304.200,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									4.031.050,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									204.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									5.162.500,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									633.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									6.614.400,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									6.248.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									685.400,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									5.503.200,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									3.327.300,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									1.367.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									4.494.600,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									2.081.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									2.335.600,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									1.898.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									3.292.900,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									2.364.850,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									900.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									7.286.050,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									3.332.350,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									13.996.829,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									3.545.550,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									2.332.850,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									3.488.700,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									785.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									5.338.200,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									2.142.500,00
01.856	**Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU**				Ketahanan Pangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Sarana pasca panen	Revitalisasi penggilingan padi	000 - Bukan Tematik		tidak	1.001.526.800,00
01.856.001	**Tanpa sub Output**											1.001.526.800,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU											1.001.526.800,00
		Pusat	Pusat									526.087.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									16.364.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									6.242.150,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									1.210.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									3.496.700,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									6.745.500,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									28.616.500,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									9.202.500,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									20.070.500,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									843.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									645.100,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									34.995.300,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									47.198.150,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									2.326.700,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									46.838.550,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									16.490.400,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									5.056.250,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									12.427.600,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									1.910.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									22.208.300,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									9.512.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									16.124.150,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									7.054.300,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									665.100,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									26.611.900,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									19.549.750,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									57.539.600,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									16.610.900,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									4.554.350,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									11.322.100,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									6.121.700,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									8.474.700,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									4.043.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									4.369.050,00
02	*Meningkatnya nilai tambah produk tanaman pangan bantuan fasilitas pengolahan hasil*											8.224.600,00
02.852	Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan								000 - Bukan Tematik		tidak	8.224.600,00
02.852.001	Tanpa Sub Output											8.224.600,00
	101 - Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan											429.600,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									30.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									30.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									30.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									30.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									34.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									34.600,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									30.500,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									30.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									30.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									30.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									30.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									30.000,00
	103 - Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pengolahan Tanaman Pangan											7.795.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Selatan									92.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Besar									91.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Bireuen									91.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Barat Daya									91.500,00
		Provinsi Aceh	Kab. Gayo Lues									92.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Aceh Jaya									92.000,00
		Provinsi Aceh	Kab. Pidie Jaya									92.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang									184.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara									91.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Binjai									91.500,00
		Provinsi Jambi	Kab. Merangin									91.500,00
		Provinsi Jambi	Kab. Batanghari									91.500,00
		Provinsi Jambi	Kab. Muaro Jambi									91.500,00
		Provinsi Jambi	Kab. Tebo									183.500,00
		Provinsi Jambi	Kab. Bungo									92.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan									92.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur									92.000,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Selatan									91.500,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Timur									91.500,00
		Provinsi Lampung	Kab. Lampung Tengah									91.500,00
		Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu									91.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Ciamis									91.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Majalengka									275.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Kab. Indramayu									183.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Grobogan									183.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Kab. Brebes									275.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Tulungagung									91.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Jember									91.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Lamongan									91.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sumenep									275.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Kota Malang									183.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Banten	Kab. Pandeglang									91.500,00
		Provinsi Banten	Kab. Lebak									184.500,00
		Provinsi Banten	Kab. Serang									91.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah									183.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur									91.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa									92.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat									92.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Bima									91.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang									184.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru									91.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu									92.000,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Kab. Bulungan									91.500,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow									92.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara									92.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai									91.500,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Poso									183.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba									183.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto									91.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bone									183.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Wajo									183.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja									183.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe									91.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan									91.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari									92.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah									92.000,00
		Provinsi Papua Barat	Kab. Sorong									183.000,00
		Provinsi Papua	Kab. Merauke									91.500,00
		Provinsi Papua	Kab. Jayapura									183.500,00
		Provinsi Papua	Kab. Nabire									183.500,00
		Provinsi Papua	Kab. Keerom									183.500,00
		Provinsi Papua	Kota Jayapura									92.000,00
03	*Meningkatnya mutu hasil produk tanaman pangan melalui fasilitas sertifikasi dan uji mutu*											3.985.800,00
03.853	Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan								000 - Bukan Tematik		tidak	3.985.800,00
03.853.001	Tanpa Sub Output											3.985.800,00
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan											0,00
	102 - Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan											0,00
	103 - Melaksanakan Fasilitasi Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan											2.835.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									65.300,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									106.300,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									53.800,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									33.800,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									44.800,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									115.300,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									19.800,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									82.800,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									52.800,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									326.300,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									176.300,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									60.800,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									206.300,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									84.800,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									104.800,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									105.300,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									100.800,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									108.800,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									31.800,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									83.800,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									69.300,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									68.800,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									74.300,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									176.300,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									164.800,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									88.800,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									74.300,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									38.800,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									36.300,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									39.800,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									39.000,00
	104 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan											1.150.800,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									22.200,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									22.200,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									68.200,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									22.200,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									22.200,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									57.700,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									22.200,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									57.700,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									51.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									67.700,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									57.700,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									57.700,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									58.700,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									57.700,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									57.700,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									22.200,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									57.700,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									57.700,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									29.700,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									57.700,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									40.500,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									22.200,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									22.200,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									57.700,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									35.500,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									22.200,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									22.200,00
04	*Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri (domestik) dan luar negeri (ekspor) melalui fasilitas informasi Informasi Harga Tanaman Pangan*											4.944.000,00
04.854	Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan								000 - Bukan Tematik		tidak	4.944.000,00
04.854.001	Tanpa Sub Output											4.944.000,00
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan											0,00
	102 - Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan											0,00
	103 - Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Informasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan											4.944.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									183.300,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									266.800,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									188.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									99.800,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									193.300,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									222.700,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									405.600,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									547.400,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									89.800,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									577.300,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									124.500,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									75.100,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									143.900,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									119.200,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									314.600,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									114.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									188.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									65.100,00
		Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara									206.400,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									89.800,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									129.200,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									335.600,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									104.500,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									79.800,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									79.800,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
	104 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan											0,00
05	*Meningkatnya dukungan teknis pada kegiatan PPHTP*											11.215.120,00
05.855	Fasilitas Dukungan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan								000 - Bukan Tematik		tidak	11.215.120,00
05.855.001	Pengamanan Susut Hasil Produksi Tanaman Pangan											3.237.555,00
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan											310.500,00
		Pusat	Pusat									310.500,00
	102 - Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan											0,00
	103 - Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pascapanen Tanaman Pangan											1.750.710,00
		Pusat	Pusat									1.750.710,00
	104 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan											1.176.345,00
		Pusat	Pusat									1.176.345,00
05.855.002	Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan											3.102.435,00
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Sarana Pengolahan Tanaman Pangan											0,00
	102 - Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan											1.712.835,00
		Pusat	Pusat									1.712.835,00
	103 - Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan											0,00
	104 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan											1.389.600,00
		Pusat	Pusat									1.389.600,00
05.855.103	Pengembangan Standardisasi dan Mutu Tanaman Pangan											3.116.910,00
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan											1.456.560,00
		Pusat	Pusat									1.456.560,00
	102 - Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan											0,00
	103 - Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan											1.660.350,00
		Pusat	Pusat									1.660.350,00
	104 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan											0,00
05.855.104	Pengembangan Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan											996.195,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
	101 - Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan											248.900,00
		Pusat	Pusat									248.900,00
	102 - Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan											254.625,00
		Pusat	Pusat									254.625,00
	103 - Melaksanakan Koordinasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan											299.520,00
		Pusat	Pusat									299.520,00
	104 - Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan											193.150,00
		Pusat	Pusat									193.150,00
05.855.105	Administrasi dan Ketatausahaan Dit PPHTP											762.025,00
	101 - Melaksanakan Ketatausahaan dan Kepegawaian Dit PPHTP											302.800,00
		Pusat	Pusat									302.800,00
	102 - Melaksanakan Keuangan dan Perlengkapan Dit PPHTP											459.225,00
		Pusat	Pusat									459.225,00
Total												1.884.501.969,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
01	Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Bantuan Sarana Pasca Panen				1.856.132.449,00				1.853.768.480,00	1.854.121.280,00	1.854.882.080,00
01.851	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	9664	Unit		854.605.649,00				852.241.680,00	852.594.480,00	853.355.280,00
01.851.001	Tanpa Sub Output				854.605.649,00				852.241.680,00	852.594.480,00	853.355.280,00
01.851.001.101	Melakasanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	32,00	Dokumen	323.716,41	10.358.925,00	32,00	32,00	32,00	7.223.635,00	7.287.235,00	7.347.035,00
01.851.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	9.664,00	Unit	87.359,97	844.246.724,00	9.667,00	9.668,00	9.670,00	845.018.045,00	845.307.245,00	846.008.245,00
01.856	Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	1146	Unit		1.001.526.800,00				1.001.526.800,00	1.001.526.800,00	1.001.526.800,00
01.856.001	Tanpa sub Output				1.001.526.800,00				1.001.526.800,00	1.001.526.800,00	1.001.526.800,00
01.856.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	1.146,00	Unit	873.932,64	1.001.526.800,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.001.526.800,00	1.001.526.800,00	1.001.526.800,00
02	Meningkatnya nilai tambah produk tanaman pangan bantuan fasilitas pengolahan hasil				8.224.600,00				8.413.500,00	8.502.500,00	8.588.500,00
02.852	Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	85	Unit		8.224.600,00				8.413.500,00	8.502.500,00	8.588.500,00
02.852.001	Tanpa Sub Output				8.224.600,00				8.413.500,00	8.502.500,00	8.588.500,00
02.852.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	14,00	Dokumen	30.685,71	429.600,00	14,00	14,00	14,00	585.000,00	640.000,00	695.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
02.852.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pengolahan Tanaman Pangan	85,00	Unit	91.705,88	7.795.000,00	85,00	85,00	84,00	7.828.500,00	7.862.500,00	7.893.500,00
03	Meningkatnya mutu hasil produk tanaman pangan melalui fasilitas sertifikasi dan uji mutu				3.985.800,00				4.442.000,00	5.319.000,00	4.690.000,00
03.853	Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	60	Sertifikasi/Registrasi		3.985.800,00				4.442.000,00	5.319.000,00	4.690.000,00
03.853.001	Tanpa Sub Output				3.985.800,00				4.442.000,00	5.319.000,00	4.690.000,00
03.853.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.853.001.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.853.001.103	Melaksanakan Fasilitasi Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	60,00	Sertifikasi Jaminan Mutu	47.250,00	2.835.000,00	68,00	71,00	71,00	3.157.000,00	3.974.000,00	3.345.000,00
03.853.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	27,00	Laporan	42.622,22	1.150.800,00	27,00	27,00	26,00	1.285.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
04	Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri (domestik) dan luar negeri (ekspor) melalui fasilitas informasi Informasi Harga Tanaman Pangan				4.944.000,00				5.865.000,00	6.124.000,00	6.296.000,00
04.854	Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	225	Informasi		4.944.000,00				5.865.000,00	6.124.000,00	6.296.000,00
04.854.001	Tanpa Sub Output				4.944.000,00				5.865.000,00	6.124.000,00	6.296.000,00
04.854.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.854.001.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.854.001.103	Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Informasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	225,00	Informasi	21.973,33	4.944.000,00	227,00	232,00	236,00	5.865.000,00	6.124.000,00	6.296.000,00
04.854.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Meningkatnya dukungan teknis pada kegiatan PPHTP				11.215.120,00				10.966.515,00	11.227.995,00	11.547.995,00
05.855	Fasilitas Dukungan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	12	Bulan		11.215.120,00				10.966.515,00	11.227.995,00	11.547.995,00
05.855.001	Pengamanan Susut Hasil Produksi Tanaman Pangan				3.237.555,00				1.698.860,00	1.707.860,00	1.753.860,00
05.855.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1,00	Dokumen	310.500,00	310.500,00	1,00	1,00	1,00	95.500,00	104.500,00	150.500,00
05.855.001.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.855.001.103	Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pascapanen Tanaman Pangan	1,00	Dokumen	1.750.710,00	1.750.710,00	1,00	1,00	1,00	478.260,00	478.260,00	478.260,00
05.855.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1,00	Dokumen	1.176.345,00	1.176.345,00	1,00	1,00	1,00	1.125.100,00	1.125.100,00	1.125.100,00
05.855.002	Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				3.102.435,00				4.265.275,00	4.265.275,00	4.265.275,00
05.855.002.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Sarana Pengolahan Tanaman Pangan	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.855.002.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan	1,00	Dokumen	1.712.835,00	1.712.835,00	1,00	1,00	1,00	3.100.835,00	3.100.835,00	3.100.835,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2018			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2018 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021
05.855.002.103	Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.855.002.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan	1,00	Dokumen	1.389.600,00	1.389.600,00	1,00	1,00	1,00	1.164.440,00	1.164.440,00	1.164.440,00
05.855.103	Pengembangan Standardisasi dan Mutu Tanaman Pangan				3.116.910,00				2.426.145,00	2.526.145,00	2.626.145,00
05.855.103.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1,00	Dokumen	1.456.560,00	1.456.560,00	1,00	1,00	1,00	875.795,00	875.795,00	875.795,00
05.855.103.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.855.103.103	Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	1,00	Dokumen	1.660.350,00	1.660.350,00	1,00	1,00	1,00	1.550.350,00	1.650.350,00	1.750.350,00
05.855.103.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	0,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.855.104	Pengembangan Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan				996.195,00				1.038.195,00	1.089.675,00	1.162.675,00
05.855.104.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1,00	Bulan Layanan	248.900,00	248.900,00	1,00	1,00	1,00	258.900,00	268.900,00	278.900,00
05.855.104.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1,00	Bulan Layanan	254.625,00	254.625,00	1,00	1,00	1,00	264.625,00	274.625,00	284.625,00
05.855.104.103	Melaksanakan Koordinasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1,00	Bulan Layanan	299.520,00	299.520,00	1,00	1,00	1,00	320.520,00	350.000,00	400.000,00
05.855.104.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	1,00	Bulan Layanan	193.150,00	193.150,00	1,00	1,00	1,00	194.150,00	196.150,00	199.150,00
05.855.105	Administrasi dan Ketatausahaan Dit PPHTP				762.025,00				1.538.040,00	1.639.040,00	1.740.040,00
05.855.105.101	Melaksanakan Ketatausahaan dan Kepegawaian Dit PPHTP	1,00	Bulan Layanan	302.800,00	302.800,00	1,00	1,00	1,00	402.800,00	502.800,00	602.800,00
05.855.105.102	Melaksanakan Keuangan dan Perlengkapan Dit PPHTP	1,00	Dokumen	459.225,00	459.225,00	1,00	1,00	1,00	1.135.240,00	1.136.240,00	1.137.240,00
Total					1.884.501.969,00	-	-	-	1.883.455.495,00	1.885.294.775,00	1.886.004.575,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Bantuan Sarana Pasca Panen		1.856.132.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.132.449,00
01.851	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan		854.605.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.605.649,00
01.851.001	Tanpa Sub Output		854.605.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.605.649,00
01.851.001.101	Melakasanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pendukung	10.358.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358.925,00
01.851.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Utama	844.246.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.246.724,00
01.856	Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU		1.001.526.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.526.800,00
01.856.001	Tanpa sub Output		1.001.526.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.526.800,00
01.856.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	Utama	1.001.526.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.526.800,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
02	Meningkatnya nilai tambah produk tanaman pangan bantuan fasilitas pengolahan hasil		8.224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224.600,00
02.852	Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		8.224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224.600,00
02.852.001	Tanpa Sub Output		8.224.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.224.600,00
02.852.001.101	Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pendukung	429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.600,00
02.852.001.103	Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pengolahan Tanaman Pangan	Utama	7.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795.000,00
03	Meningkatnya mutu hasil produk tanaman pangan melalui fasilitas sertifikasi dan uji mutu		3.985.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.800,00
03.853	Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan		3.985.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.800,00
03.853.001	Tanpa Sub Output		3.985.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.800,00
03.853.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.853.001.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.853.001.103	Melaksanakan Fasilitasi Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00
03.853.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	1.150.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.800,00
04	Meningkatnya penguasaan pasar dalam negeri (domestik) dan luar negeri (ekspor) melalui fasilitas informasi Informasi Harga Tanaman Pangan		4.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00
04.854	Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan		4.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00
04.854.001	Tanpa Sub Output		4.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00
04.854.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.854.001.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.854.001.103	Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Informasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	4.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944.000,00
04.854.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Meningkatnya dukungan teknis pada kegiatan PPHTP		11.215.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215.120,00
05.855	Fasilitas Dukungan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		11.215.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215.120,00
05.855.001	Pengamanan Susut Hasil Produksi Tanaman Pangan		3.237.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237.555,00
05.855.001.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Pendukung	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
05.855.001.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.855.001.103	Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pascapanen Tanaman Pangan	Pendukung	1.750.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.710,00
05.855.001.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Pendukung	1.176.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.345,00
05.855.002	Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		3.102.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.435,00
05.855.002.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Sarana Pengolahan Tanaman Pangan	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.855.002.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan	Pendukung	1.712.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.835,00
05.855.002.103	Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.855.002.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Pengolahan Tanaman Pangan	Pendukung	1.389.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.600,00
05.855.103	Pengembangan Standardisasi dan Mutu Tanaman Pangan		3.116.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.910,00
05.855.103.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	1.456.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.560,00
05.855.103.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
05.855.103.103	Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	1.660.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.350,00
05.855.103.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.855.104	Pengembangan Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan		996.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.195,00
05.855.104.101	Menyusun Kebijakan Program dan Anggaran Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
05.855.104.102	Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	254.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.625,00
05.855.104.103	Melaksanakan Koordinasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	299.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.520,00
05.855.104.104	Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	Pendukung	193.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.150,00
05.855.105	Administrasi dan Ketatausahaan Dit PPHTP		762.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.025,00
05.855.105.101	Melaksanakan Ketatausahaan dan Kepegawaian Dit PPHTP	Pendukung	302.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.800,00
05.855.105.102	Melaksanakan Keuangan dan Perlengkapan Dit PPHTP	Pendukung	459.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.225,00
Total			1.884.501.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.501.969,00

Jakarta, 11 Juli 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI KEUANGAN

Nomor : S- 398 /MK.02/2017
: B.193 /M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017

Jakarta, 09 Mei 2017

Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas + CD
Hal : Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

1. **Yth. Para Menteri Kabinet Kerja;**
2. **Yth. Jaksa Agung RI;**
3. **Yth. Kepala Kepolisian RI;**
4. **Yth. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;**
5. **Yth. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.**

di Jakarta

Menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet Paripurna tanggal 04 April 2017 yang membahas Pagu Indikatif RAPBN 2018, serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dengan ini disampaikan **Pagu Indikatif Kementerian Negara/Lembaga** dan **Rancangan Awal RKP Tahun Anggaran 2018.**

Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP Tahun Anggaran 2018 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian /Lembaga (Renja K/L) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Sasaran dan Prioritas pembangunan**
   a. Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
   b. Prioritas Pembangunan Nasional serta Program Prioritas sesuai Rancangan Awal RKP TA 2018, yang telah diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tanggal 1 Februari 2017 sebagaimana ***Lampiran I.***;
   c. Program Prioritas Nasional direncanakan hingga tingkat Proyek Prioritas dengan keluaran yang terukur berserta lokus pelaksanaan (Provinsi, Kabupaten/kota). Untuk itu dilakukan langkah-langkah:
      - Kementerian/Lembaga mengkonfirmasi dan mempersiapkan pelaksanaan Proyek Prioritas.
      - Kementerian/Lembaga memasukan Proyek Prioritas kedalam Rencana Kerja K/L (Renja K/L).
      - Koordinasi dan pembahasan Proyek Prioritas lebih lanjut dilakukan pada Pertemuan Tiga Pihak dan rangkaian Musrenbangnas.
      - Perubahan Proyek Prioritas (keluaran dan lokus) dan output kegiatan prioritas harus mendapat persetujuan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

2. **Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal 2018**
   Tema Kebijakan Fiskal 2018 "Memantapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan" dengan prinsip-prinsip produktif, efisien, berdaya tahan dan risiko terkendali.

3. **Pokok-pokok Kebijakan Belanja K/L Tahun Anggaran 2018** sebagaimana ***Lampiran II***

4. **Rincian Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga TA 2018**
   Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 5 lampiran sebagai berikut :
   a. Rincian Program yang disusun menurut sumber dana, sebagaimana tercantum pada **Lampiran III.a.;**
   b. Rincian Kegiatan Prioritas yang disusun menurut Program, Kegiatan, Output, Target dan Alokasi sebagaimana tercantum pada **Lampiran III.b.;**
   c. Rincian Proyek Prioritas K/L yang disusun menurut Program, Kegiatan, Proyek Prioritas, Target, Indikasi Pendanaan dan Lokasi sebagaimana tercantum pada **Lampiran III.c.;**
   d. Rincian rencana penarikan proyek yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri serta pinjaman dalam negeri, sebagaimana tercantum pada **Lampiran III.d.;**
   e. Rincian rencana penarikan proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sebagaimana tercantum pada **Lampiran III.e.**

   Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018 merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui dan akan dimutakhirkan sesuai hasil pembahasan dalam Pertemuan Tiga Pihak. Besaran pendanaan didalam Pagu Indikatif Belanja K/L merupakan ancar-ancar pendanaan yang dapat digunakan untuk menyusun kegiatan sehingga siap untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2018.

Selanjutnya, masing-masing Kementerian/Lembaga diharapkan menyusun Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Penyusunan Renja K/L berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan dan Penelaahan Renja K/L yang disampaikan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Rancangan Renja K/L tersebut agar disampaikan kepada Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan pada kesempatan pertama, untuk selanjutnya menjadi bahan Pertemuan Tiga Pihak dan agenda lainnya dalam rangka penyusunan RKP Tahun Anggaran 2018 dan RAPBN Tahun Anggaran 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas,	Menteri Keuangan,
Bambang P.S. Brodjonegoro	Sri Mulyani Indrawati

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; dan
4. Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.

PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN AWAL RKP 2018

I. **Pendidikan,** dengan program prioritas :
   1) Pendidikan Vokasi
   2) Peningkatan Kualitas Guru

II. **Kesehatan,** dengan program prioritas :
   3) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
   4) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
   5) Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. **Perumahan dan permukiman,** dengan program prioritas :
   6) Penyediaan Perumahan Layak
   7) Air Bersih dan Sanitasi

IV. **Pengembangan dunia usaha dan pariwisata,** dengan program prioritas :
   8) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata
   9) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
   10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI)
   11) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
   12) Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa

V. **Ketahanan energi,** dengan program prioritas :
   13) Energi baru terbarukan dan Konservasi Energi
   14) Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. **Ketahanan pangan,** dengan program prioritas :
   15) Peningkatan Produksi Pangan
   16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)

VII. **Penanggulangan kemiskinan,** dengan program prioritas :
   17) Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
   18) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
   19) Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

VIII. **Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman,** dengan program prioritas :
   20) Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
   21) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. **Pembangunan wilayah,** dengan program prioritas :
   22) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
   23) Pembangunan Perdesaan
   24) Reforma Agraria
   25) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (termasuk Kebakaran Hutan)
   26) Percepatan Pembangunan Papua

X. **Politik, hukum, pertahanan, & keamanan,** dengan program prioritas :
   27) Penguatan Pertahanan
   28) Stabilitas Politik dan Keamanan
   29) Kepastian Hukum
   30) Reformasi Birokrasi

Prioritas Khusus Pelaksanaan **Asian Games dan Asian Para Games**

**) CD Rancangan Awal RKP TA 2018 terlampir*

POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018

a. Kebijakan umum belanja K/L:

1) Kebijakan belanja pegawai tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13 (baseline);

2) Kebijakan belanja barang dievaluasi berdasarkan realisasi belanja barang TA 2016 :
   - Belanja barang operasional, maksimal sama dengan realisasi belanja barang operasional TA 2016 atau pagu 2017 apabila lebih rendah, dengan melakukan penghematan perjalanan dinas, paket meeting, honor tim, dan belanja bahan.
   - Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pemda agar dibatasi dengan melakukan penajaman evaluasi.

3) Penghematan dari kebijakan belanja barang agar direalokasi untuk belanja yang produktif termasuk menambah volume output kegiatan prioritas atau proyek prioritas.

b. Melakukan penguatan dan perbaikan kualitas belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain dengan:

1) Meningkatkan alokasi belanja modal yang lebih produktif melalui alokasi belanja untuk membiayai kegiatan prioritas atau proyek prioritas;

2) membatasi belanja modal untuk peralatan mesin, kendaraan bermotor, dan pembangunan gedung kantor baru;

3) Mendorong belanja modal yang lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas.

c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja K/L
Langkah-langkah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja K/L:

1) Kementerian/Lembaga harus memiliki sistem untuk memastikan kewajaran harga keluaran kegiatan dan proyek prioritas.
2) Perbaikan kualitas belanja aparatur dilakukan dengan cara Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan batas maksimal belanja aparatur sampai dengan Unit Eselon I yang akan dijaga saat trilateral meeting penyusunan Renja K/L, penelaahan RKAKL, penyusunan DIPA, dan revisi DIPA. Beberapa belanja aparatur yang perlu dibatasi :
   - *Perjalanan Dinas* : pembatasan frekuensi dan jumlah pegawai, optimalisasi Teknologi Informasi untuk monitoring dan evaluasi
   - *Rapat* : pengurangan konsumsi, pemanfaatan waktu yang efektif
   - *Honor tim yang rasional* : honor tim hanya untuk penambahan penugasan yang tidak terkait tusi, pembatasan honor (jumlah keanggotaan)
   - *Go-green* : penghematan ATK dan upaya ramah lingkungan
3) Perbaikan kualitas belanja aparatur dan modal tersebut digunakan untuk menambah volume output kegiatan prioritas atau proyek prioritas.
4) Untuk mengendalikan langkah peningkatan efektifitas dan efisiensi tersebut:
   - Menteri/Pimpinan lembaga memantau capaian anggaran dan output setiap bulan.
   - Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan agar pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran tidak menumpuk diakhir tahun, dan mewajibkan tiap eselon I untuk memanfaatkan sistem pemantauan berbasis on-line seperti SMART.

- Menteri/Pimpinan Lembaga menginformasikan ke masyarakat luas hasil capaian kinerjanya, terutama yang merupakan prioritas Presiden, secara efisien dan efektif.
- Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu :
  i. Menjaga belanja yang dibatasi (perjadin, honor, belanja operasional/aparatur) dialokasikan secara efisien dan efektif oleh K/L
  ii. Bersama instansi terkait lainnya memantau pelaksanaan prioritas nasional dan melaporkan ke Presiden secara berkala.

d. Melakukan sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran Bantuan Sosial dalam rangka mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antara lain melalui:

1) Penambahan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat;

2) Peningkatan sinergi antara program beras keluarga sejahtera (rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH);

3) Peningkatan sinergi antar program-program, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidik Misi), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

e. Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui :

1) Sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

2) Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lampiran III.a.
Surat Bersama Pagu Indikatif K/L dan Rancangan Awal
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018

BA : 018
K/L : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribu rupiah)

PROGRAM DAN SUMBER DANA		RINCIAN ANGGARAN BELANJA		
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	JUMLAH
018.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.060.150.770	405.465.800	1.465.616.570
a.	RM	1.060.150.770	402.286.308	1.462.437.078
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	3.179.492	3.179.492
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	25.428.200	65.186.040	90.614.240
a.	RM	25.428.200	65.186.040	90.614.240
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	-	-
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.06	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	67.652.380	6.648.843.600	6.716.495.980
a.	RM	67.652.380	6.648.341.620	6.715.994.000
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	501.980	501.980
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.07	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	39.412.730	1.062.651.200	1.102.063.930
a.	RM	39.412.730	1.062.651.200	1.102.063.930
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	-	-
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.08	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	93.378.400	1.196.861.182	1.290.239.582
a.	RM	93.378.400	1.195.530.186	1.288.908.586
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	1.330.996	1.330.996
d.	BLU	-	-	-

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018

BA : 018
K/L : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribu rupiah)

PROGRAM DAN SUMBER DANA		RINCIAN ANGGARAN BELANJA		
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	JUMLAH
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	199.639.630	1.857.029.897	2.056.669.527
a.	RM	199.639.630	1.817.900.378	2.017.540.008
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	15.379.937	15.379.937
d.	BLU	-	23.749.582	23.749.582
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	40.553.230	5.768.432.856	5.808.986.086
a.	RM	40.553.230	5.723.144.856	5.763.698.086
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-		-
d.	BLU	-		-
e.	PLN	-	45.288.000	45.288.000
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.12	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	692.264.940	740.354.227	1.432.619.167
a.	RM	692.264.940	415.434.686	1.107.699.626
b.	RMP	-	69.768.000	69.768.000
c.	PNBP	-	18.919.541	18.919.541
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	236.232.000	236.232.000
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.13	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	115.203.520	652.227.020	767.430.540
a.	RM	115.203.520	604.466.097	719.669.617
b.	RMP	-	4.400.000	4.400.000
c.	PNBP	-	4.100.924	4.100.924
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	39.260.000	39.260.000
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.14	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	32.681.690	859.301.000	891.982.690
a.	RM	32.681.690	798.385.600	831.067.290
b.	RMP	-	14.103.000	14.103.000
c.	PNBP	-	-	-
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	46.022.400	46.022.400
f.	HLN	-	790.000	790.000
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.15	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	426.093.340	329.209.640	755.302.980

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018

BA : 018
K/L : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribu rupiah)

PROGRAM DAN SUMBER DANA		RINCIAN ANGGARAN BELANJA		
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	JUMLAH
a.	RM	426.093.340	255.311.733	681.405.073
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	73.897.907	73.897.907
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-
018.16	Program Pendidikan Pertanian	93.220.300	184.036.069	277.256.369
a.	RM	93.220.300	184.036.069	277.256.369
b.	RMP	-	-	-
c.	PNBP	-	-	-
d.	BLU	-	-	-
e.	PLN	-	-	-
f.	HLN	-	-	-
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018

BA : 018
K/L : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribu rupiah)

PROGRAM DAN SUMBER DANA		RINCIAN ANGGARAN BELANJA		
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	JUMLAH
JUMLAH		**2.885.679.130**	**19.769.598.532**	**22.655.277.662**
a.	RM (*)	2.885.679.130	19.172.674.773	22.058.353.903
b.	RMP	-	88.271.000	88.271.000
c.	PNBP	-	117.310.778	117.310.778
d.	BLU	-	23.749.582	23.749.582
e.	PLN	-	366.802.400	366.802.400
f.	HLN	-	790.000	790.000
g.	PHDN	-	-	-
h.	SBSN	-	-	-

Alokasi Rupiah Murni (*) Termasuk :

	(dalam ribu rupiah)
1. Belanja Operasional Pegawai (komponen 001)	2.239.826.200
2. Belanja Operasional Barang (komponen 002)	645.852.930
3. Belanja Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan (komponen 003)	-
4. Belanja Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (komponen 004)	-
5. Belanja Dukungan Operasional Tugas dan Fungsi Unit (komponen 005)	72.316.768
6. Anggaran Pendidikan	199.828.000
7. Anggaran Kesehatan	-

Lampiran : III.b.
Surat Bersama Pagu Indikatif K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PAGU INDIKATIF TAHUN 2018
(JUTA RUPIAH)

BA : 018

K/L : KEMENTERIAN PERTANIAN

Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Pagu
018.01	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian**			**80.240,9**
018.01.1746	Pembinaan Hukum Bidang Pertanian			17.485,8
018.01.1747	Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral			20.773,0
018.01.1751	Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian			9.610,0
018.01.1751.001	*Tersedianya Akses Informasi*	*920*		*9.610,0*
018.01.4992	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian			16.979,9
018.01.4993	Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian			15.392,1
018.06	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**			**6.535.783,4**
018.06.1761	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi			1.249.560,6
018.06.1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia			3.115.216,6
018.06.1762.621	*Fasilitas Penerapan Budidaya Padi*			*1.004.500,0*
018.06.1762.622	*Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung*			*2.110.716,0*
018.06.1763	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan			433.097,0
018.06.1763.631	*Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Tanaman Pangan*			*47.813,0*
018.06.1764	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI			198.680,5
018.06.1764.641	*Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI (Ha)*	*700*	*hektar*	*3.418,0*
018.06.1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan			139.466,6
018.06.5885	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan			1.399.762,0
018.06.5885.851	*Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan*	*368*	*unit*	*401.255,4*
018.07	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura**			**1.062.651,2**
018.07.1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat			819.499,5
018.07.1772	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura			79.629,2
018.07.1773	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura			73.150,0
018.07.5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura			57.622,5
018.07.5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura			32.750,0
018.07.5887.051	*Bangsal Pascapanen*	*75*	*unit*	*17.250,0*
018.07.5887.060	*Sarana Prasarana Pasca Panen*	*2*		*3.000,0*
018.08	**Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan**			**1.196.861,2**
018.08.1777	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar			733.615,8
018.08.1777.001	*Pengembangan Tanaman Tahunan*	*91225*	*hektar*	*733.615,8*
018.08.1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan			19.193,4

Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Pagu
018.08.1779.007	*Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan*	*21*		*2.751,0*
018.08.5888	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah			242.199,0
018.08.5888.004	*Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah*			*5.100,0*
018.08.5888.005	*Pengembangan Tanaman Tebu*			*237.099,0*
018.08.5889	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan			37.020,0
018.08.5889.001	*Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan*	*83*	*unit*	*12.518,0*
018.08.5889.003	*Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan*	*37*	*unit*	*16.220,0*
018.08.5890	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan			164.833,0
018.08.5890.005	*Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan*	*3170*		*164.833,0*
018.09	**Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**			**1.857.029,9**
018.09.1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak			251.113,7
018.09.1783.301	*Pengembangan Padang Penggembalaan (Pastura) di UPT*	*7340*	*Hektar*	*22.340,0*
018.09.1783.308	*Pengembangan Pakan Hijauan Pusat*	*9134*	*Hektar*	*136.250,0*
018.09.1783.328	*Penguatan Pakan Tambahan Untuk Ternak Gangguan Reproduksi*	*14658*	*Ton*	*64.923,7*
018.09.1783.331	*Pengembangan pakan olahan Pusat*	*6200*	*Ton*	*27.600,0*
018.09.1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan			318.471,5
018.09.1784.301	*Pengendalian dan Penanggulangan Rabies*	*5381848*	*dosis*	*37.000,0*
018.09.1784.308	*Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau*	*300000*	*dosis*	*140.026,0*
018.09.1784.329	*Penyidikan dan Pengujian Wabah Penyakit Hewan*	*400000*	*dosis*	*66.000,0*
018.09.1784.350	*Peningkatan Produksi,Obat Hewan dan bahan Biologik*	*6000000*	*dosis*	*35.000,0*
018.09.1784.377	*Tenaga Harian Lepas Pelayanan Kesehatan Hewan*	*1250*	*orang*	*36.000,0*
018.09.1785	Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak			1.129.031,1
018.09.1785.310	*Pengembangan Populasi Sapi Potong*			*704.881,0*
018.09.1785.317	*Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Perbibitan*	*595000*		*94.000,0*
018.09.1785.329	*Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong*	*213*		*203.000,0*
018.09.1785.338	*Peningkatan Kualitas Semen Beku*	*5192000*	*dosis*	*23.541,0*
018.09.1785.340	*Peningkatan Produksi Embrio Ternak*	*800*	*dosis*	*2.700,0*
018.09.1786	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)			87.489,8
018.09.1786.300	*Pengawasan Keamanan Produk Hewan*	*35000*		*22.000,0*
018.09.1786.309	*Fasilitasi Bangunan RPH*	*8*	*unit*	*27.057,0*
018.09.1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan			52.899,0
018.09.5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak			18.024,8
018.09.5891.303	*Fasilitasi Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair*	*45*		*6.500,0*
018.09.5891.306	*Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak*	*32*		*7.524,8*
018.11	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**			**4.914.796,0**
018.11.1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			475.000,0
018.11.1794.001	*Jaringan Irigasi Tertier*	*150000*	*Hektar*	*240.000,0*
018.11.1794.002	*Pembangunan embung*	*500*	*unit*	*55.000,0*
018.11.1794.004	*Irigasi Rawa*	*60000*	*Hektar*	*180.000,0*
018.11.1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian			3.306.284,0
018.11.1795.001	*Perluasan Sawah*	*150000*	*hektar*	*2.850.000,0*
018.11.1795.002	*Validasi data petani penerima*	*500*		*140.000,0*
018.11.1795.004	*Optimasi Lahan*	*210856*	*hektar*	*316.284,0*
018.11.1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			744.512,0
018.11.1796.001	*Alat dan Mesin Pertanian*	*15000*	*Unit*	*744.512,0*

Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Pagu
018.11.3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			140.000,0
018.11.3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			249.000,0
018.11.3994.001	*Asuransi Tanaman Pangan*	*1500000*	*hektar*	*225.000,0*
018.11.3994.002	*Asuransi Usaha Ternak*	*120000*	*ekor*	*24.000,0*
018.12	**Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan**			**740.354,2**
018.12.1798	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian			10.845,0
018.12.1798.205	*Kebijakan Pengembangan Bioteknologi dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*	*20*		*10.431,3*
018.12.1799	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian			7.625,0
018.12.1799.201	*Teknologi Pascapanen (Penanganan dan Pengolahan)*	*1*		*750,0*
018.12.1800	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian			40.535,0
018.12.1800.201	*Peta Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian, Status Hara, Kalender Tanam, dan Pencemaran Lingkungan*	*2*		*1.000,0*
018.12.1800.204	*Diseminasi Inovasi teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian*	*20*		*10.000,0*
018.12.1801	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian			276.335,2
018.12.1801.204	*Model Pengembangan Inovasi Pertanian BioINdustri Spesifik Lokasi*	*15*		*6.000,0*
018.12.1802	Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian			13.295,0
018.12.1802.203	*Teknologi Mekanisasi Pertanian*	*1*		*750,0*
018.12.1804	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura			39.655,0
018.12.1805	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan			26.665,0
018.12.1806	Penelitian dan Pengembangan Peternakan			34.960,0
018.12.1806.202	*Teknologi peternakan dan veteriner*	*34*		*20.400,0*
018.12.1807	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan			61.095,0
018.12.1807.112	*Benih sumber tanaman padi*			*38.500,0*
018.12.1807.113	*Benih sumber tanaman jagung*	*300*		*5.000,0*
018.12.1807.206	*Sekolah Lapang Kedaulatan pangan Mendukung Swasembada Pangan Teringerasi Desa Mandiri Benih*	*25*		*2.095,0*
018.12.1809	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian			229.344,0
018.12.1809.204	*Perjanjian Kerjasama Lisensi Hasil Balitbangtan*	*27000*		*100.046,0*
018.13	**Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian**			**609.939,6**
018.13.1810	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian			68.144,7
018.13.1810.004	*Peningkatan Kompetensi SDM Pelatihan Pertanian*			*68.144,7*
018.13.1812	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian			541.795,0
018.13.1812.001	*Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian*			*541.795,0*
018.14	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**			**859.301,0**
018.14.1814	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan			456.920,0
018.14.1814.108	*Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)*	*906*	*unit*	*208.720,0*
018.14.1814.110	*Lembaga distribusi dan cadangan pangan masyarakat yang difasilitasi*			*248.200,0*
018.14.1815	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan			108.700,0
018.14.1815.106	*Kawasan Mandiri Pangan*	*278*		*31.700,0*
018.14.1815.114	*Penanganan kerawanan pangan*			*77.000,0*
018.14.1816	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			293.681,0
018.14.1816.101	*Pemberdayaan Pekarangan Pangan*	*3671*		*194.563,0*
018.14.1816.106	*Hasil Pengawasan keamanan dan mutu pangan Segar*	*126*		*77.118,0*
018.15	**Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati**			**317.562,7**

Kode	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Pagu
018.15.1818	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan			48.989,0
018.15.1819	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani			9.424,0
018.15.1820	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati			7.014,6
018.15.1821	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian			50.719,1
018.15.1822	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian			100.836,0
018.15.1823	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati			100.580,0
018.16	**Program Pendidikan Pertanian**			**184.036,1**
018.16.5892	Pendidikan Pertanian			184.036,1
018.16.5892.966	*Layanan Pendidikan dan Pelatihan*			*128.664,0*
	JUMLAH			**18.358.556,1**

Lampiran : III.c.
Surat Bersama Pagu Indikatif K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

RINCIAN PROYEK PRIORITAS PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018

BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

(JUTA RUPIAH)

BA : 018

K/L : KEMENTERIAN PERTANIAN

Kode	Program/Kegiatan/Proyek	Target dan Satuan	Pagu	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
018.01	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian**		**9.610,0**				
018.01.1751	Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian		9.610,0				
018.01.1751.001	*Tersedianya Akses Informasi*	*920*	*9.610,0*	*34 Provinsi*	*Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi*	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)*	*Ketahanan Pangan*
018.06	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**		**3.567.703,0**				
018.06.1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia		3.115.216,6				
018.06.1762.002	*Bantuan Saprodi untuk Budidaya Padi*	*1.500.000,000*	*1.000.000,0*	*34 Provinsi*	*Produksi Padi 79.3 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.06.1762.003	*Demfarm Jarwo Super di 15 Provinsi*	*15*	*4.500,0*	*Pusat*	*Produksi Padi 79.3 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.06.1762.004	*Pengembangan Varietas Benih Jagung*	*4*	*5.000,0*	*Pusat*	*Produksi Jagung 23,4 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.06.1762.005	*Produksi Benih Sumber Jagung*	*93*	*1.581,0*	*34 Provinsi*	*Produksi Jagung 23,4 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.06.1762.006	*Bantuan untuk Budidaya Jagung*	*3000000*	*2.104.135,6*	*34 Provinsi*	*Produksi Jagung 23,4 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.06.1763	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan		47.813,0				
018.06.1763.007	*Pembangunan Desa Mandiri Benih*	*200*	*42.000,0*	*34 Provinsi*	*Produksi Padi 79.3 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.06.1763.008	*Produksi benih sumber padi*	*294*	*5.813,0*	*34 Provinsi*	*Produksi Padi 79.3 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.06.1764	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI		3.418,0				
018.06.1764.009	*Bantuan puso untuk sawah padi*	*350*	*1.709,0*	*Pusat*	*Produksi Padi 79.3 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.06.1764.010	*Bantuan puso untuk jagung*	*350*	*1.709,0*	*Pusat*	*Produksi Jagung 23,4 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.06.5885	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		401.255,4				
018.06.5885.011	*Jumlah alat penggilingan padi yang tersalurkan*	*368*	*401.255,4*	*Pusat*	*Sarana pasca panen*	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)*	*Ketahanan Pangan*
018.07	**Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura**		**20.250,0**				
018.07.5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura		20.250,0				
018.07.5887.012	*Jumlah Bangsal Pascapanen*	*75*	*17.250,0*	*34 Provinsi*	*Sarana pasca panen*	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)*	*Ketahanan Pangan*
018.07.5887.013	*Jumlah Cold Storage Hortikultura*	*2*	*3.000,0*	*34 Provinsi*	*Sarana pasca panen*	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)*	*Ketahanan Pangan*
018.08	**Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan**		**1.180.418,8**				
018.08.1777	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar		733.615,8				
018.08.1777.014	*Pengembangan tanaman kelapa*	*3125*	*20.000,0*	*18 Provinsi*	*Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor*	*Pengembangan Ekspor Barang Dan Jasa*	*Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata*
018.08.1777.015	*Pengembangan Tanaman Kopi*	*25000*	*202.593,8*		*Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor*	*Pengembangan Ekspor Barang Dan Jasa*	*Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata*
018.08.1777.016	*Pengembangan Tanaman Kakao*	*55800*	*338.100,0*		*Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor*	*Pengembangan Ekspor Barang Dan Jasa*	*Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata*
018.08.1777.017	*Pengembangan tanaman karet*	*7300*	*172.922,0*		*Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor*	*Pengembangan Ekspor Barang Dan Jasa*	*Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata*
018.08.1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan		2.751,0				
018.08.1779.018	*Penyelesaian Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan*	*21*	*2.751,0*		*Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan*	*Pembangunan Perdesaan*	*Pembangunan wilayah*

Kode	Program/Kegiatan/Proyek	Target dan Satuan	Pagu	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
018.08.5888	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah		242.199,0				
018.08.5888.019	Rawat ratoon tebu	10275	41.326,0	34 Provinsi	Produksi Gula 3,2 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.08.5888.020	Penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan	21	2.600,0	34 Provinsi	Produksi Gula 3,2 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.08.5888.021	Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan	10	2.500,0	34 Provinsi	Produksi Gula 3,2 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.08.5888.022	Pengawalan percepatan peningkatan produksi dan produktivitas tebu rakyat	10	2.500,0	34 Provinsi	Produksi Gula 3,2 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.08.5888.023	Pengawalan penambahan areal untuk pengembangan PG Baru (BUMN, Swasta) dan Peningkatan kapasitas PG Eksisting seluas 08 ribu hektar	10	3.000,0	34 Provinsi	Produksi Gula 3,2 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.08.5888.024	Perluasan Tanaman Tebu	4000	49.900,0	34 Provinsi	Produksi Gula 3,2 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.08.5888.025	Bongkar ratoon	15000	82.013,0	34 Provinsi	Produksi Gula 3,2 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.08.5888.026	Jumlah Bantuan Unit Alsin Tebu	183	58.350,0	34 Provinsi	Alat dan mesin pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.08.5889	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		37.020,0				
018.08.5889.027	Jumlah kelompok tani (KT) penerima alat pasca panen perkebunan	83	20.800,0	34 Provinsi	Sarana pasca panen	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.08.5889.028	Jumlah bantuan alat pengolahan perkebunan	37	16.220,0	34 Provinsi	Sarana pasca panen	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.08.5890	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan		164.833,0				
018.08.5890.029	Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan	3170	164.833,0	34 Provinsi	Produksi Gula 3,2 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09	**Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat**		**1.660.343,5**				
018.09.1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak		251.113,7				
018.09.1783.030	Perluasan hijauan pakan ternak	9124	136.250,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1783.030	Perluasan Hijauan Pakan Ternak	7340	22.340,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1783.031	Produksi pakan ternak olahan	14658	64.923,7	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1783.031	Produksi pakan ternak olahan	6200	27.600,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		314.026,0				
018.09.1784.032	Pemberian obat/hormon untuk menangani gangguan reproduksi ternak	300000	140.026,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1784.033	Penyelidikan dan pengujian sampel penyakit hewan	400000	66.000,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1784.034	Pelayanan kesehatan oleh Tenaga Harian Lepas (THL)	1250	36.000,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1784.035	Penyediaan obat dan vaksin hewan	6000000	35.000,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1784.036	Pengendalian dan penanggulangan PHMSZ	5381648	37.000,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1785	Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak		1.028.122,0				
018.09.1785.037	Produksi semen beku	5192000	23.541,0	Pusat	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1785.038	Produksi embrio benih ternak di BET Cipelang Bogor	800	2.700,0	Kab. Bogor	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1785.039	Bantuan sarana dan prasarana pembibitan dan produksi ternak	213	203.000,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1785.040	Optimalisasi reproduksi ternak	3000000	660.000,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1785.040	Optimalisasi reproduksi ternak	41	36.381,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1785.041	Pemeliharaan dan produksi bibit ternak di BPTU HPT	595000	94.000,0	Pusat	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1785.042	Penguatan UPTD dan BIBD	17	8.500,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.1786	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)		49.057,0				
018.09.1786.043	Jumlah unit usaha produk hewan yang dibangun (unit usaha)	8	27.057,0	Pusat	Sarana pasca panen	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.09.1786.044	Pengawasan keamanan produk hewan	35000	22.000,0	34 Provinsi	Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.09.5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak		18.024,8				
018.09.5891.045	asuransi sapi	2000	4.000,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.09.5891.046	Penguatan sarana/prasarana pengolahan hasil peternakan	45	6.500,0	34 Provinsi	Sarana pasca panen	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.09.5891.047	Penguatan Kelembagaan pemasaran hasil peternakan	32	7.524,8	34 Provinsi	Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**		**4.774.796,0**				

Kode	Program/Kegiatan/Proyek	Target dan Satuan	Pagu	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
018.11.1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian		475.000,0				
018.11.1794.048	Luas sawah yang jaringan irigasi tersiernya dibangun/direhabilitasi	150000	240.000,0	34 Provinsi	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1794.049	Rehabilitasi jaringan irigasi rawa	60000	180.000,0	34 Provinsi	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1794.050	Pembangunan embung	500	55.000,0	34 Provinsi	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian		3.306.284,0				
018.11.1795.051	Jumlah penanaman padi pasca cetak sawah	210056	316.284,0	34 Provinsi	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	6000	114.000,0	Provinsi Aceh	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	2000	38.000,0	Provinsi Sumatera Utara	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	3000	57.000,0	Provinsi Sumatera Barat	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	2500	47.500,0	Provinsi Riau	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	4000	76.000,0	Provinsi Kepulauan Riau	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	5000	95.000,0	Provinsi Bangka Belitung	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	5000	95.000,0	Provinsi Jambi	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	6500	123.500,0	Provinsi Bengkulu	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	7500	142.500,0	Provinsi Sumatera Selatan	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	7000	133.000,0	Provinsi Lampung	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	1500	28.500,0	Provinsi Jawa Barat	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	6500	123.500,0	Provinsi Kalimantan Barat	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	7000	133.000,0	Provinsi Kalimantan Tengah	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	5000	95.000,0	Provinsi Kalimantan Selatan	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	7000	133.000,0	Provinsi Kalimantan Timur	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	7500	142.500,0	Provinsi Kalimantan Utara	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	6000	114.000,0	Provinsi Sulawesi Utara	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.11.1795.052	Jumlah Cetak Sawah	5000	95.000,0	Provinsi Sulawesi Tengah	Perluasan lahan pertanian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan

Kode	Program/Kegiatan/Proyek	Target dan Satuan	Pagu	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
018.12.1807.067	Sekolh Lapang Desa Mandiri Benih	10	10,0	Pusat	Produksi Jagung 23,4 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.12.1809	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian		100.046,0				
018.12.1809.068	Fasilitas Infrastruktur Layanan Sertifikasi	27000	100.046,0	34 Provinsi	Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.13	**Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian**		**609.939,7**				
018.13.1810	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian		68.144,7				
018.13.1810.069	Pelatihan Padi	7530	19.847,0	34 Provinsi	Produksi Padi 79.3 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.13.1810.070	Pelatihan Jagung	3882	10.498,0	34 Provinsi	Produksi Jagung 23,4 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.13.1810.071	Pelatihan Peternakan	15360	26.961,8	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.13.1810.072	Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani	1.35	10.837,9		Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi	Pembangunan Perdesaan	Pembangunan wilayah
018.13.1812	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian		541.795,0				
018.13.1812.072	Penyuluhan padi	37734	131.315,0	34 Provinsi	Produksi Padi 79.3 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.13.1812.073	Penyuluhan padi	14834	186.884,7	34 Provinsi	Produksi Padi 79.3 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.13.1812.074	Penyuluhan jagung	6805	68.767,0	34 Provinsi	Produksi Jagung 23,4 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.13.1812.074	Penyuluhan jagung	2684	43.470,0	34 Provinsi	Produksi Jagung 23,4 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.13.1812.075	Penyuluhan tebu	2474	25.012,0	34 Provinsi	Produksi Gula 3,2 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.13.1812.075	Penyuluhan tebu	976	15.480,0	34 Provinsi	Produksi Gula 3,2 juta ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.13.1812.076	Penyuluhan Peternakan	4330	43.776,3	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.13.1812.076	Penyuluhan Peternakan	1708	27.090,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.14	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**		**837.301,0**				
018.14.1814	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan		456.920,0				
018.14.1814.077	Lumbung pangan masyarakat	2200	183.300,0	34 Provinsi	Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.14.1814.078	FGMP/TTI	906	208.720,0	34 Provinsi	Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.14.1814.079	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	398	64.900,0	Pusat	Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.14.1815	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan		108.700,0				
018.14.1815.080	Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (lokasi)	35	52.500,0	Pusat	Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.14.1815.081	Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA)	35	24.500,0	Pusat	Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.14.1815.082	Kawasan Mandiri Pangan	278	31.700,0	34 Provinsi	Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.14.1816	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		271.681,0				
018.14.1816.083	Desa pemberdayaan pekarangan pangan	3671	194.503,0	34 Provinsi	Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.14.1816.084	Pengawasan keamanan dan mutu pangan	126	77.118,0	Pusat	Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.15	**Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati**		**264.029,0**				
018.15.1818	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan		48.989,0				
018.15.1818.085	Jumlah instalasi yang memadai dan sesuai dengan standar untuk memperkuat sensor/penyaringan media pembawa yang tertular hama penyakit hewan dan tumbuh	10000	48.989,0	34 Provinsi	Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)	Ketahanan Pangan
018.15.1819	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani		9.424,0				
018.15.1819.086	Analisa Resiko Sebagai Referensi Penyusunan Peraturan, Prosedur dan Petunjuk	10	1.234,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan
018.15.1819.087	Peraturan, Prosedur dan Petunjuk sebagai Payung Hukum untuk tindakan pencegahan	19	8.190,0	34 Provinsi	Produksi Daging Sapi 710 ribu ton	Peningkatan Produksi Pangan	Ketahanan Pangan

Kode	Program/Kegiatan/Proyek	Target dan Satuan	Pagu	Lokasi	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional
018.15.1820	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati		4.200,0				
018.15.1820.056	*Analisa Resiko Sebagai Referensi Penyusunan Peraturan, Prosedur dan Petunjuk*	*2*	*200,0*	*34 Provinsi*	*Produksi Padi 79.3 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.15.1820.057	*Peraturan, Prosedur dan Petunjuk sebagai Payung Hukum untuk tindakan pencegahan*	*5*	*4.000,0*	*34 Provinsi*	*Produksi Padi 79.3 juta ton*	*Peningkatan Produksi Pangan*	*Ketahanan Pangan*
018.15.1822	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian		100.836,0				
018.15.1822.088	*Laboratorium yang terakreditasi*	*6*	*400,0*	*34 Provinsi*	*Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi*	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)*	*Ketahanan Pangan*
018.15.1822.089	*Jumlah Teknik dan Metoda serta Validasi Pengujian Laboratorium (Tumbuhan)*	*24*	*10.932,0*	*Provinsi DKI Jakarta*	*Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi*	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)*	*Ketahanan Pangan*
018.15.1822.090	*Fasilitas Layanan Sertifikat Karantina*	*3750*	*89.504,0*	*34 Provinsi*	*Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi*	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)*	*Ketahanan Pangan*
018.15.1823	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati		100.580,0				
018.15.1823.091	*Layanan Sertifikat Ekspor*	*154598*	*89.580,0*	*34 Provinsi*	*Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi*	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)*	*Ketahanan Pangan*
018.15.1823.092	*Peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan di 7 PLBN*	*2091*	*11.000,0*	*Pusat*	*Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas*	*Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal*	*Pembangunan wilayah*
018.16	**Program Pendidikan Pertanian**		**128.664,4**				
018.16.5892	Pendidikan Pertanian		128.664,4				
018.16.5892.093	*Peningkatan kualitas guru dan dosen pendidikan vokasi*	*390*	*6.630,0*	*Pusat*	*PENINGKATAN KUALITAS GURU DAN DOSEN PENDIDIKAN VOKASI*	*Pendidikan Vokasi*	*Pendidikan*
018.16.5892.094	*Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yang melakukan kemitraan*	*2200*	*33.000,0*	*Pusat*	*PENGUATAN KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA/DUNIA INDUSTRI*	*Pendidikan Vokasi*	*Pendidikan*
018.16.5892.095	*Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP*	*20334*	*32.534,4*	*Pusat*	*PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN KERJA*	*Pendidikan Vokasi*	*Pendidikan*
018.16.5892.096	*Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi*	*5*	*1.500,0*	*Pusat*	*PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN KERJA*	*Pendidikan Vokasi*	*Pendidikan*
018.16.5892.097	*Penumbuhan wirausahawan muda pertanian dalam rangka regenerasi petani (kelompok)*	*500*	*35.000,0*	*Pusat*	*PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN KERJA*	*Pendidikan Vokasi*	*Pendidikan*
018.16.5892.098	*STPP yang terpenuhi sarana dan prasarananya*	*7*	*14.000,0*	*Pusat*	*PEMENUHAN SARPRAS PENDIDIKAN VOKASI YANG BERKUALITAS*	*Pendidikan Vokasi*	*Pendidikan*
018.16.5892.099	*SMK-PP yang terpenuhi sarana dan prasarananya (unit)*	*3*	*6.000,0*	*Pusat*	*PEMENUHAN SARPRAS PENDIDIKAN VOKASI YANG BERKUALITAS*	*Pendidikan Vokasi*	*Pendidikan*
JUMLAH			**13.248.027,6**				

LAMPIRAN III.d
Surat Bersama Pagu Indikattif K/L dan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2018

RINCIAN RENCANA PENARIKAN PINJAMAN LUAR NEGERI TA 2018

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 018

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

NAMA LENDER	NOMOR KODE LOAN	NOMOR REGISTER	NAMA PROYEK DALAM NPPLN	PAGU INDIKATIF TA 2018 (RIBU RUPIAH)	
				PLN	RMP
ON GOING				**327.542.400**	**83.871.000**
1 IFAD	L I-835-ID	10823301	Smallholder Livelihood Development In Eastern Indonesia (SOLID)	46.022.400	14.103.000
2 World Bank	8188-ID	10850201	Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination-SMARTD	236.232.000	69.768.000
3 ADB	3440-INO	1RUX78CA	Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) *	45.288.000	-
PIPELINE				**39.260.000**	**4.400.000**
1 IFAD			Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	38.760.000	3.400.000
2 IFAD			Rural Empowerment and Agricultural Development - Scaling up Initiative	500.000	1.000.000
TOTAL PINJAMAN PROYEK (K/L)				**366.802.400**	**88.271.000**

LAMPIRAN III.d
Surat Bersama Pagu Indikatif K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018

RINCIAN RENCANA PENARIKAN HIBAH LUAR NEGERI TA 2018

BAGIAN ANGGARAN (BA) : 018

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

NAMA DONOR	NOMOR KODE HIBAH	NOMOR REGISTER	NAMA PROYEK DALAM NPHLN	PAGU INDIKATIF TA 2018 (RIBU RUPIAH)	
				HLN	RMP
ON GOING				790.000	-
1 IFAD	GIC-835-ID	71697101	Smallholder Livelihood Development In Eastern Indonesia (SOLID)	790.000	-
TOTAL HIBAH PROYEK (K/L)				790.000	-

DOKUMEN KESEPAKATAN

PERTEMUAN TIGA PIHAK (TRILATERAL MEETING) PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L 2018

Tanggal dan Waktu

a. Tanggal : 16 Juni 2017

b. Waktu : 08.00 - selesai

Tempat : Ruang Rapat Dit. Pangan dan Pertanian, Gedung TS 2 A Lt.5, Kementerian PPN/Bappenas

Pimpinan Rapat : Direktur Pangan dan Pertanian, Kemen PPN/BAPPENAS

Peserta Pertemuan

1. **Kementerian PPN/Bappenas**

   a) Nama : Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM.
      Jabatan : Direktur Pangan dan Pertanian

   b) Nama : Dr. Ir. Anwar Sunari, MP
      Jabatan : Kepala Sub Direktorat Perkebunan dan Hortikultura

   c) Nama : Jarot Indarto, SP, MT, MSc, Ph.D
      Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pangan

   d) Nama : Zulfriandi, SE, Ak. MM
      Jabatan : Kepala Sub Direktorat Kelembagaan

   e) Nama : Noor Avianto, SP, M.Agr
      Jabatan : Kepala Sub Direktorat Peternakan

2. **Kementerian Keuangan**

a) Nama : Dra. Anandy Wati, M.P.M.

Jabatan : Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

b) Nama : Erawati, SH, KN, MT

Jabatan : Kepala Subdit Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan

3. **Kementerian Pertanian**

a) Nama : Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M. Sc

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

b) Nama : Dr. Prayudi Syamsuri, SP, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Kebijakan danProgram

CATATAN PEMBAHASAN

Kementerian/ Lembaga : Kementerian Pertanian

No	Pokok Bahasan	Catatan Kementerian Pertanian	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut yang Disepakati
Sasaran Utama Pembangunan					
1.	Sasaran Utama Pembangunan terkait Pertanian	Sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 edisi Revisi, sasaran utama pembangunan pertanian, antara lain: 1. Target produksi 2018 PN Ketahanan Pangan a. Padi : 80,08 juta ton b. Jagung : 23,4 juta ton c. Kedelai : 2,34 juta ton (diusulkan menjadi Prioritas Nasional) d. Gula : 3,3 juta ton e. Daging Sapi : 710 ribu ton karkas f. Cabai : 2,23 juta ton g. Bawang Merah : 1,37 juta ton h. Jeruk : 2,1 juta ton i. Mangga : 2,4 juta ton 2. Target produksi PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata a. Kakao : 916 ribu ton b. Kopi : 765 ribu ton c. Karet : 3,68 juta ton d. Kelapa : 3,45 juta ton	Pada RKP 2018, Agar Kementan tetap menjaga sasaran utama pembangunan pertanian sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dengan sasaran utama: 1. Target produksi 2018 PN Ketahanan Pangan a) Padi : 79,3 juta ton b) Jagung : 23,4 juta ton c) Gula : 3,2 juta ton d) Daging Sapi : 710 ribu ton e) Cabai : 2,23 juta ton f) Bawang Merah : 1,37 juta ton g) Jeruk : 1,76 juta ton h) Mangga : 2,4 juta ton 2. Target produksi PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata a) Kakao : 891,39 ribu ton b) Kopi : 764,93 ribu ton c) Karet : 3,68 juta ton d) Kelapa dalam : 3,45 juta ton Bappenas menyetujui Kedelai masuk dalam Prioritas Nasional.	Kementerian Pertanian agar tetap menjaga sasaran utama pembangunan pertanian sesuai dengan RPJMN 2015–2019 dengan tetap memprioritaskan untuk mencapai target Prioritas Nasional sampai dengan Tahun Anggaran 2019.	Target yang disepakai adalah: 1. Target produksi 2018 PN Ketahanan Pangan a) Padi : 80,08 juta ton b) Jagung : 23,4 juta ton c) Kedelai : 2,34 juta ton d) Gula : 3,3 juta ton e) Daging Sapi : 710 ribu ton f) Cabai : 2,23 juta ton g) Bawang Merah : 1,37 juta ton h) Jeruk : 1,76 juta ton i) Mangga : 2,4 juta ton 2. Target produksi PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata a) Kakao : 916 ribu ton

No	Pokok Bahasan	Catatan Kementerian Pertanian	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut yang Disepakati
					b) Kopi : 765 ribu ton c) Karet : 3,68 juta ton d) Kelapa dalam : 3,45 juta ton Disepakati komoditas prioritas nasional yang belum masuk dalam aplikasi KRISNA agar segera diusulkan untuk di update.
Pagu Indikatif					
1.	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Kementan Tahun 2018 adalah sebesar Rp22.655.277.662.000,-, yang terdiri dari : a. Belanja Non Operasional sebesar Rp19.668.438.531.000,- b. Belanja Operasional sebesar Rp2.986,839.131.000,-. Pagu indikatif untuk Belanja Non Operasional tersebut yang dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional sebesar Rp12.553.652.280.000,-. Sesuai Surat Menteri Pertanian No. B-2313/RC.110/A/06/2017 Tanggal 13 Juni 2017 perihal Pergeseran Anggaran Per Program Dalam Pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2018, perubahan alokasi anggaran antar Program, antara lain:	Pagu Indikatif Kementan Tahun 2018 adalah sebesar Rp22.655,28 miliar, yang terdiri dari : a. Belanja Non Operasional sebesar Rp19.769,60 miliar, b. Belanja Operasional sebesar Rp2.855,68 miliar. Perlu memperhatikan kesepakatan program dengan DPR sesuai Surat Menteri Pertanian No. B-2313/RC.110/A/06/2017Tanggal 13 Juni 2017 perihal Pergeseran Anggaran Per Program Dalam Pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2018. Dalam pengawalan pencapaian target yang melibatkan pihak TNI	- Usul pergeseran anggaran antar program masih dimungkinkan dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang tersedia, serta tetap memperhatikan pencapaian target kegiatan Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2015-2019. - Pergeseran pagu antar sumber pendanaan dan pengurangan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tidak dapat dilakukan.	Mengikuti pagu sesuai dengan Surat Menteri Pertanian No. B-2313/RC.110/A/06/2017Tanggal 13 Juni 2017 perihal Pergeseran Anggaran Per Program Dalam Pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2018

No	Pokok Bahasan	Catatan Kementerian Pertanian	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut yang Disepakati
		Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian dari Rp1.472.430.820.000,-menjadi Rp1.462.092.430.000,- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dari Rp93.134.000.000,-menjadi Rp92.134.000.000,- 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dari Rp6.426.364.350.000,- menjadi Rp6.842.364.351.000,- 4) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dari Rp1.423.406.660.000,- menjadi Rp928.560.980.000,- 5) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan tetap sebesar Rp838.126.468.000,- 6) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat tetap sebesar Rp1.999.373.491.000,- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dari Rp5.915.644.680.000,- menjadi Rp6.210.828.749.000,- 8) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan tetap sebesar Rp1.884.560.880.000,- 9) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian dari	aturan yang memadai. Sesuai dengan Surat Menteri Pertanian tersebut, Kementan menjamin bahwa alokasi anggaran Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan mencukupi untuk mengawal pencapaian target yang telah disepakati. Meskipun demikian Bappenas masih menilai alokasi untuk pengadaan alsintan dan fasilitasi budidaya kedelai terlalu tinggi.		

No	Pokok Bahasan	Catatan Kementerian Pertanian	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut yang Disepakati
		Rp1.000.199.320.000,-menjadi Rp830.199.323.000,- 10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dari Rp472.402.000.000,- menjadi Rp462.402.000.000,- 11) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati dari Rp773.184.990.000,-menjadi Rp748.184.990.000,- 12) Program Pendidikan Pertanian tetap sebesar Rp356.450.000.000,-			
2.	PNBP	Anggaran Belanja PNBP Kementan sebesar Rp117.310.778.000,-. Beberapa catatan terkait alokasi PNBP: - Terdapat perubahan alokasi PNBP Kementan Tahun 2018 menjadi sebesar RP117.456.270.000,- (Kesepakatan dengan Direktur PNBP, DJA, Kemenkeu pada 8 Mei 2017). - Hal tersebut terkait dengan penambahan jenis dan kenaikan besaran tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian dikarenakan penerapan PP 35 Tahun 2016. - Adanya program Pemerintah "Sapi Indukan Wajib Bunting", akan meningkatkan penjualan semen beku kepada dinas lingkup pertanian provinsi yang memiliki program tersebut.	Berdasarkan SB Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 Nomor S-98/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017, Anggaran Belanja PNBP Kementan sebesar Rp117,31 miliar	Terkait dengan usul perubahan alokasi anggaran PNBP dari sebesar Rp117,31 Miliar menjadi sebesar Rp117,46 miliar, selanjutnya Kementerian Pertanian agar menyampaikan surat perubahan alokasi anggaran PNBP kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk ditindaklanjuti.	Disepakati usul perubahan pagu PNBP akan ditampung di Pagu Anggaran
3.	BLU	Anggaran Belanja BLU Kementan sebesar Rp23.749.582.000,-.	Berdasarkan SB Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 Nomor S-	Alokasi anggaran BLU Kementerian Pertanian pada Pagu Indikatif TA 2018 adalah sebesar Rp23,75 Miliar pada Program Pemenuhan Pangan	Disepakati usul perubahan pagu BLU akan ditampung di Pagu

No	Pokok Bahasan	Catatan Kementerian Pertanian	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut yang Disepakati
			98/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017, Anggaran Belanja BLU Kementan sebesar Rp23,75miliar	Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.	Anggaran
4.	PHLN	Alokasi PHLN Kementan sesuai hasil trilateral meeting PHLN dari Rp367.592.400.000,- menjadi Rp329,74 miliar terdiri dari PLN Rp326,74 miliar,- dan HLN Rp3,00 miliar,- Alokasi sesuai trilateral meeting PHLN: - Untuk kegiatan FMSRB (Ditjen PSP) sebesar Rp5,23 miliar - Untuk kegiatan SOLID (BKP) sebesar Rp49,02 miliar dengan rincian PLN Rp46,02 miliar dan HLN Rp3,00 miliar - Untuk kegiatan SMARTD (Balitbangtan) sebesar Rp236,23 miliar - Untuk kegiatan IPDMIP (BPPSDMP) sebesar Rp38,76 miliar - Untuk kegiatan READ-SI (BPPSDMP) sebesar Rp0,5 miliar	Berdasarkan SB Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 Nomor S-98/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017, Alokasi PHLN Kementan sebesar Rp367,59 miliar terdiri dari PLN Rp366,80 miliar dan HLN Rp790 juta	- Perubahan PHLN yang telah disepakati dalam Trilateral Meeting PHLN akan ditindaklanjuti oleh DJPPR melalui surat ke DJA sebagai dasar untuk perubahan pada Pagu Anggaran.	Disepakati sesuai hasil trilateral meeting PHLN dan akan ditampung di Pagu Anggaran
5.	SBSN	-	-	-	
6.	Anggaran Pendidikan	Alokasi Kementan untuk anggaran pendidikan Rp356.450.000.000,- (Termasuk Belanja operasional dan non operasional)	Berdasarkan SB Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 Nomor S-98/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017, Alokasi Kementan untuk anggaran pendidikan Rp 199,83 miliar. Sesuai dengan pembahasan, diusulkan alokasi untuk anggaran pendidikan menjadi Rp. 356,45 M.	Terkait dengan usul perubahan alokasi anggaran pendidikan menjadi sebesar Rp356,45 Miliar, Ditjen Anggaran sependapat dengan Kementerian Pertanian bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam Surat Bersama Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 hanya memperhitungkan kegiatan Prioritas Nasional, namun belum memperhitungkan belanja	Disepakati anggaran pendidikan sebesar Rp356.450.000.000,- (Termasuk Belanja operasional dan non operasional)

No	Pokok Bahasan	Catatan Kementerian Pertanian	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut yang Disepakati
				operasional. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan agar mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan melakukan realokasi anggaran antar program.	
Penelaahan Program					
1.	Proyek Prioritas Nasional Kementan	Dalam rancangan RKP Tahun 2018, Proyek Kementan masuk kedalam 4 (empat) Prioritas Nasional yaitu Ketahanan Pangan, Pendidikan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, dan Pembangunan Wilayah	Dalam rancangan RKP Tahun 2018, Proyek Kementan masuk kedalam 4 (lima) Prioritas Nasional yaitu Ketahanan Pangan, Pendidikan, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata dan Pembangunan Wilayah. Kementan mencanangkan tahun 2018 sebagai tahun benih. Berkaitan dengan hal tersebut, Bappenas mengharapkan agar pembagian tugas pada setiap sektor terkait disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu, diperlukan peraturan perundangan dan CPCL yang jelas sebagai dasar pencanangan tahun benih tersebut. Tahun Benih ini juga diharapkan dapat dikaitkan dengan pemanfaatan desa mandiri benih yang sudah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk perkebunan, kami menyarankan Kementan untuk mempertimbangkan hasil Rapat Terbatas Presiden (khususnya	Dalam menentukan target produksi agar disesuaikan dengan kemampuan Kementerian Pertanian dan APBN yang tersedia, mengingat dari target produksi per masing-masing komoditas tidak seluruhnya dibiayai dari APBN, mengingat sebagian besar adalah swadaya masyarakat.	Pencapaian target-target prioritas nasional ketahanan pangan, pendidikan, pengembangan dunia usaha, dan pembangunan wilayah menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBN.

No	Pokok Bahasan	Catatan Kementerian Pertanian	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut yang Disepakati
			Provinsi di Sulawesi), Musrenbangnas, Pembahasan Desk Papua dan Papua Barat dalam rangka affirmasi, dan hasil telaah kami terhadap komoditas perkebunan. Berkaitan dengan Kegiatan Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Kementan memfokuskan bantuan untuk 5 Provinsi dan 8 kabupaten. Komoditas yang dikembangkan adalah padi organik, jagung, sayuran organik dan sapi. Tujuan dari pengembangan komoditas tersebut adalah untuk ekspor ke negara tetangga. Berkaitan dengan hal ini, Bappenas mengharapkan agar komoditas yang dikembangkan memiliki daya saing yang baik di negara tujuan ekspor. Berkaitan dengan Kegiatan Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Bappenas mengharapkan agar Kementan dapat memberikan dukungan peningkatan produksi komoditas: • Perkebunan (sagu, kopi, kakao, karet, lada/merica, kelapa, vanila) • Hortikultura (buah merah) • Tanaman Pangan (umbi-umbian/ubi jalar)		

No	Pokok Bahasan	Catatan Kementerian Pertanian	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut yang Disepakati
			• Peternakan (sapi dan babi) Dukungan Kementan dapat disesuaikan dengan usulan dari Papua dan Papua Barat ke Kementan melalui e-proposal.		
2.	Proyek Prioritas Bidang Kementan	1. Produksi dan perbanyakan benih/bibit melalui pengembangan *nursery*/kebunbenih/bibit; 2. Penyediaan dan perbanyakan indukan sapi; 3. Pengembangan komoditas substitusi impor (bawang putih dan buah lainnya); 4. Pengembangan alsintan; 5. Pengembangan kawasan (*clustering*) berbasis komoditas strategis; 6. Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan.	-	-	Disepakati prioritas bidang sesuai dengan catatan Kementerian Pertanian
Kerangka Regulasi					
			Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjalankan seluruh kegiatan yang diusulkan berdasarkan kewenangan dan regulasi yang ada.	Kementerian Pertanian dalam melaksanakan seluruh kegiatan agar berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.	Disepakati agar pelaksanaan kegiatan didasarkan atas peraturan yang berlaku
USULAN TAMBAHAN ANGGARAN					
1	Usulan Anggaran	Kementan mengusulkan tambahan anggaran tahun 2018 sebesar Rp3,03 triliun. Usulan tersebut sebagai bagian dari usulan keseluruhan sebesar Rp5,5	Untuk tahun 2018, agar usulan tambahan tersebut ditelaah kembali sesuai dengan proses	Kementan agar mengoptimalkan alokasi anggaran pada Pagu Indikatif 2018 dan usul tambahan pagu akan dicatat sebagai catatan	Disepakati usulan tambahan tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

No	Pokok Bahasan	Catatan Kementerian Pertanian	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian Keuangan	Tindak Lanjut yang Disepakati
		triliun, yang diusulkan untuk APBNP 2017 sebesar Rp2,47 triliun.	peraturan perundangan yang berlaku. Untuk tambahan anggaran tahun 2017, diusulkan untuk tidak dibahas dalam trilateral meeting ini.	dalam pembahasan Trilateral Meeting	

Jakarta, 16 Juni 2017,
Pihak-pihak yang bersepakat:

KementerianPertanian
Kepala Biro Perencanaan,

(Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M. Sc)
NIP. 19640521 199003 1 001

KementerianKeuangan
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

DIREKTUR ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(Dra. Anandy Wati, M.P.M.)
NIP. 19580104 198601 2 001

Kementerian PPN/ BAPPENAS
DirekturPangandanPertanian

(Dr. Ir. Sri Yanti JS)
NIP. 19630408 198811 1 001

LEMBAR CATATAN HASIL PERTEMUAN TIGA PIHAK RENCANA KERJA K/L
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2018

KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN			TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN PERTANIAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	
Sasaran Utama Pembangunan					
1.	Sesuai dengan Dokumen Kesepakatan *Trilateral Meeting* Penyusunan RKP dan Renja K/L 2018, tgl 16 Juni 2017, sasaran produksi komoditas prioritas nasional: a. Padi : 80,08 juta ton b. Jagung : 23,4 juta ton c. Kedelai 2,34 juta ton d. Gula : 3,3 juta ton e. Daging Sapi : 710 ribu ton karkas f. Cabai : 2,23 juta ton g. Bawang Merah : 1,37 juta ton h. Jeruk : 1,76 juta ton i. Mangga : 2,4 juta ton j. Kakao : 916 ribu ton k. Kopi : 765 ribu ton l. Karet : 3,68 juta ton m. Kelapa dalam: 3,45 juta ton.	Sasaran produksi komoditas nasional tersebut tetap.	Kementerian Pertanian agar tetap menjaga sasaran produksi komoditas prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019, dan RKP 2018.	Agar setiap K/L selalu mengarahkan kerangka investasi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional tersebut, sebagai ukuran kinerja kabinet, K/L dan unit kerja.	Disepakati untuk tetap menjamin pencapain sasaran prioritas nasional tersebut.
Alokasi Anggaran					
1.	Alokasi Anggaran	Kementerian Pertanian mengusulkan perubahan	1. Pergeseran Anggaran antar program dalam rangka optimalisasi	3. Kementerian Pertanian c.q. Ditjen Tanaman Pangan perlu segera	

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN			TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN PERTANIAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	
		kegiatan dan anggaran TA 2018 dengan pertimbangan: 1. Kebijakan bantuan benih langsung kepada petani sebagai upaya mengoptimalkan anggaran untuk bantuan benih langsung TA. 2018, dengan dasar Raker DPR bersama Kementerian Pertanian Tanggal 14 Maret 2018. 2. Percepatan hilirisasi melalui peningkatan kegiatan pasca panen komoditas padi.	anggaran untuk bantuan benih langsung dapat diproses lebih lanjut setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPR RI. 2. Terkait hilirisasi kegiatan pasca panen komoditas padi Kementerian Pertanian agar memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak tumpang tindih dengan kegiatan modernisasi Industri perberasan melalui koperasi yang dikoorporasikan yang melibatkan BUMN pangan dan Perbankan	merumuskan dan mengembangkan sistem perbenihan tanaman pangan secara nasional 4. Terkait hilirisasi melalui peningkatan kegiatan pasca panen untuk komoditas padi perlu didukung dengan pengawalan dan penguatan kelembagaan petani/kelompok tani/gapoktan/brigade alsin agar dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan alsintan pasca panen	
	Alokasi anggaran per Program: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PertanianRp1.492.092.430.000,- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	Mengusulkan perubahan alokasi anggaran antar Program: 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan menjadi Rp6.682.058.350.000,- 2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1. Dalam melakukan pergeseran anggaran antar program, Kementerian Pertanian agar menjaga target program kegiatan Prioritas Nasional, yang alokasi anggarannya diupayakan berasal dari kegiatan non PN 2. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor	1. Agar Kementerian Pertanian menyampaikan data rinci per program tentang kondisi terkini dari anggaran prioritas nasional dan anggaran non-prioritas nasional. 2. Agar Kementerian Pertanian melakukan prioritisasi realokasi anggaran yang bersumber dari anggaran non-prioritas nasional.	Disepakati agar Kementerian Pertanian menyampaikan data rinci kondisi anggaran terkini, telaah sumber pendanaan (PN-non PN) dan persyaratan realokasi anggaran antar program sesuai dengan

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN			TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN PERTANIAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	
	PertanianRp97.134.000.000,- 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman PanganRp6.486.964.351.000,- 4) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Rp1.355.960.980.000,- 5) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Rp1.631.801.109.000 6) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Rp2.114.282.476.000,- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Rp6.030.828.749.000,- 8) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Rp2.096.560.880.000,-	menjadi Rp1.255.960.980.000,- 3) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat menjadi Rp2.0119.188.480,-	11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018, usul revisi anggaran dapat diproses lebih lanjut setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPR RI.	3. Agar Kementerian Pertanian melengkapi persyaratan administrasi dan substansi terhadap usulan realokasi anggaran antar program tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, al.: UU APBN 2018 (persetujuan pimpinan DPR), matriks ABCD, matriks semula-menjadi, dll.	peraturan perundangan yang berlaku.

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN			TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN PERTANIAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	
	9) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Rp851.585.747.000,- 10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp527.612.000.000,- 11) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Rp773.184.990.000,- 12) Program Pendidikan Pertanian Rp406.450.000.000,-				
2.	PNBP	-			
3.	PHLN	-			
4.	SBSN	-			
Perubahan output prioritas nasional					
5.		Mengusulkan perubahan output prioritas nasional, utamanya: • Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura tidak ada perubahan output dan anggaran kegiatan Prioritas Nasional (pergeseran	Kementerian Pertanian agar mengupayakan tidak menurunkan volume output kegiatan Prioritas Nasional. Oleh karena itu sasaran dan volume output kegiatan prioritas nasional untuk komoditas padi, jagung dan kedelai agar tetap diamankan.	1. Sesuai dengan PERPRES No. 79/2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 Pasal 2 (2), K/L menggunakan RKP 2018 sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rencana	

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN			TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN PERTANIAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	
		volume dan anggaran terjadi hanya di Kegiatan Dukungan Manajemen). • Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan: o Fasilitasi penerapan budidaya kedelai semula 1 juta Ha menjadi 546ribu Ha o Fasilitasi penerapan budidaya padi semula 1.740.000 Ha menjadi 1.230.000 Ha. o Fasilitasi penerapan budidaya jagung dan serealia lainnya semula 4.000.500 Ha menjadi 2.804.710 Ha. o Fasilitasi Desa Mandiri Benih semula 205 menjadi 208 Ha. o Fasilitasi RMU/Revitalisasi RMU semula 98 unit menjadi 189 unit o Penambahan output baru Fasilitasi	Terkait penurunan Volume output target prioritas nasional komoditas padi, jagung dan kedelai untuk membiayai kegiatan non PN, diperlukan adanya justifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan dari kementerian pertanian dan persetujuan dari Bappenas terkait penurunan target prioritas dimaksud melalui *approval* pada aplikasi KRISNA	Kerja dan Anggaran K/L tahun 2018. 2. Oleh karena itu, sasaran, volume output, dan alokasi anggaran dari prioritas nasional harus tetap diamankan dan/atau ditingkatkan. 3. Kebijakan kerangka investasi pemerintah, utamanya terkait dengan perubahan alokasi anggaran, harus diarahkan pada penambahan dan/atau penguatan sasaran, volume output dan alokasi anggaran prioritas nasional. Kebijakan kerangka investasi pemerintah, utamanya perubahan alokasi anggaran diarahkan dari anggaran non-prioritas nasional menjadi prioritas nasional. 4. Agar Kementerian Pertanian memberikan justifikasi substantif atas implikasi dari perubahan (penambahan dan/atau pengurangan) volume output dan alokasi	

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN			TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN PERTANIAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	
		Penyediaan Benih Bersertifikat sebesar 2.198.000 Ha dengan anggaran Rp697.467.553,00 • Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat: o Hijauan pakan ternak semula 2.197 Ha menjadi 2.159 Ha. o Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan semula 4.980.950 menjadi 4.517.880 dosis o Penanggulangan gangguan reproduksi semula 200.000 menjadi 198.062 ekor. o Optimalisasi reproduksi semula 3.001.800 menjadi 3.000.000 akseptor. o Benih ternak unggul semula 4.576.700 menjadi 4.576.700 dosis. o Bibit ternak unggul semula 583.081		anggaran prioritas nasional terhadap pencapaian sasaran prioritas nasional.	

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN			TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN PERTANIAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	
		menjadi 582.381 ekor.			
Usulan output baru					
6.		Mengusulkan perbaikannomenklatur sub output dan komponen pada output: Fasilitas penyediaan benih bersertifikat (kode: 018.06.1763.633). Agar dapat diakomodir di aplikasi RKAKL.	Terhadap usul perbaikan nomenklatur sub output dan komponen pada output Fasilitas penyediaan benih bersertifikat dapat disepakati sehingga memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya, perbaikan dimaksud agar diinput terlebih dahulu dalam aplikasi KRISNA.	1. Agar Kementerian Pertanian memberikan penjelasan rinci (kerangka logis, indikator *impact/outcome/output/input* dari usulan aktivitas baru, yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran utama pembangunan. 2. Agar Kementerian Pertanian menyampaikan KAK dan RAB, yang mencakup pula kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, dan kelayakan implementasi dari usulan baru tersebut. 3. Agar Kementerian Pertanian mengutamakan sumber anggaran usulan baru tersebut dari anggaran non-prioritas nasional.	Disepakati agar Kementerian Pertanian menyampaikan penjelasan rinci, KAK, RAB dan sumber pendanaan (PN –nonPN) dari usulan baru tersebut.
Tindak Lanjut					
			Proses Revisi Anggaran dapat dilaksanakan setelah data dukung dilengkapi	1. Penelaahan RENJAKL dapat disetujui setelah Kementerian Pertanian menyampaikan seluruh	Disepakati untuk melakukan penelaahan rinci RENJAKL dan

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN			TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN PERTANIAN	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	
			seluruhnya oleh Kementerian Pertanian	persyaratan administrasi dan memberikan penjelasan dari isu-isu dalam catatan pertemuan tiga pihak ini. 2. Proses penyelesaian KRISNA dapat segera dimulai dan diselesaikan paling lambat satu minggu setelah TM	RKAKL setelah Kementerian Pertanian menyampaikan seluruh persyaratan administrasi dan memberikan penjelasan dari isu-isu dalam catatan pertemuan tiga pihak ini.

Catatan (Khususnya untuk hal-hal yang belum disepakati)

1. …..
2. …..

Pihak-pihak yang bersepakat:

Kepala Biro Perencanaan,
Kementrian Pertanian

(Dr. Ir. Kasdi Subagyono, MSc.)
19640521 199003 1 001

Plt. Direktur Anggaran Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman,
Kementrian Keuangan

(Made Arya Wijaya, SE., MSc.)
19650817 198601 1 001

Direktur Pangan dan Pertanian,
Kementrian PPN/BAPPENAS

(Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, M.E.M)
19621115 198611 1 001

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
KOTAK POS 7264 & 7301 / JKS PSM
TELEPON (021) 7806819, 7824669, FAKSIMILE (021) 7806309
WEBSITE : http://www.deptan.go.id/ditjentan

PENJELASAN CATATAN HASIL PERTEMUAN TIGA PIHAK (*TRILATERAL MEETING*) RENCAN KERJA K/L , RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2018 REVISI REFOCUSING PERBENIHAN DITJEN TANAMAN PANGAN

Sesuai dokumen Kesepakatan Trilateral meeting Penyusunan RKP dan Renja K/L 2018 tanggal 16 Juni 2017, bahwa Sasaran Produksi tahun 2018 komoditas Prioritas Nasional padi 80,08 juta ton, jagung 23,4 juta ton, kedelai 2,34 juta ton.

Kebijakan revisi refocusing perbenihan Ditjen Tanaman Pangan tahun 2018 dalam rangka upaya mengoptimalkan anggaran bantuan Pemerintah untuk bantuan bantuan benih gratis kepada petani yang masih membutuhkan benih varietas unggul bermutu dalam rangka meningkatkan produktvitas dan produksi, karena pada tahun 2018 petani tidak lagi mendapat bantuan subsidi benih. Hal tersebut sesuai dengan Hasil Raker Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 14 Maret 2018 dan Percepatan hilirisasi pasca panen padi melalui peningkatan volume alat pasca panen dengan tujuan untuk penurunan kehilangan hasil, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan posisi tawar petani.

Berdasarkan Hasil Raker Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 4 Juni 2018 dan Surat Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang No.AG/10321/DPR RI/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018, APBN Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2018, yang semula Rp 6.486.964.351.000,- menjadi Rp 6.682.058.351.000.

Pada revisi refocusing tersebut, terdapat perubahan output budidaya padi, jagung, kedelai, dan penambahan output fasilitas perbenihan, serta alat pasca panen. Namun alokasi anggaran Prioritas Nasional tidak mengalami penurunan sebagaimana matriks dibawah ini.

NO	Program/Kegiatan/Proyek	SEMULA		MENJADI		Selisih
		Target	Alokasi (Rp. Juta)	Target	Alokasi (Rp. Juta)	
I	**Ditjen Hortikultura**		**1.355.961**		**1.255.961**	**-100.000,00**
II	**Ditjen PKH**		**2.114.282**		**2.019.188**	**-95.094,00**
III	**Ditjen Tanaman Pangan**		**6.486.964**		**6.682.058**	**195.094,00**
1	Budidaya Kedelai	1.000.000	980.688	546.000	546.614	-434.073,37
2	Budidaya Padi	1.740.000	797.116	1.230.000	653.200	-143.915,89
3	Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya	4.000.500	2.701.475	2.804.710	1.923.757	-777.718,04
4	Budidaya Padi Organik	10.000	305.890	10.000	205.553	-100.337,50
5	Bantuan Benih Bersertifikat			2.198.000	697.468	697.467,55
6	Alsintan Pascapanen	98	36.446	1.146	1.001.527	965.081,10

Kementerian Pertanian tetap berupaya menjaga sasaran produksi tahun 2018 komoditas Prioritas Nasional padi 80,08 juta ton, jagung 23,4 juta ton, kedelai 2,34 juta ton.

I. JUSTIFIKASI PENCAPAIAN SASARAN PRODUKSI PADI 80,08 JUTA TON

Output fasilitas penerapan budidaya padi di Direktorat Serealia semula 1.740.000 hektar menjadi 1.230.000 hektar. Namun demikian, secara total sasaran output untuk mencapai sasaran produksi padi 80,08 juta ton tidak mengalami penurunan karena seluas 510.000 hektar dialihkan untuk bantuan benih padi gratis kepada petani dan tambahan benih padi seluas 1.688.000 hektar. Pengelolaan anggaran bantuan benih padi dialihkan dari Direktorat Serealia ke Direktorat Perbenihan sesuai tupoksi dan memperhatikan kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengalokasian bantuan benih padi tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran sektoral karena pada tahun 2018 tidak terdapat alokasi subsidi benih.

Pencapaian sasaran produksi padi sebesar 80,08 juta ton diperoleh dari luas tanam 16,19 juta hektar, dengan rancangan skenario sebagai berikut:

1. Pengembangan produktivitas lahan yang dilaksanakan di Ditjen TP melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan seluas 3.438.000 terdiri dari :
   a. budidaya padi 1.230.000 ha dengan provitas rata-rata 47,18 ku/ha, diperkirakan akan memberikan produksi 5.647.831 ton
   b. bantuan benih padi gratis 2.198.000 ha untuk benih padi inbrida di 32 provinsi dan padi hibrida 11 provinsi dengan provitas rata-rata 52,50 ku/ha, diperkirakan akan memberikan produksi 11.140.619 ton.
2. Pengembangan lahan yang dilaksanakan melalui program di Ditjen PSP seluas 197.700 ha, dengan rata-rata provitas 50,22 ku/ha, maka diperkirakan akan memberikan produksi 958.508 ton.
3. Dukungan fasilitasi sarana alsintan pascapanen berupa *combine harvester, dryer*/pengering, *power thresher* dengan tujuan utama mengurangi susut hasil dalam rangka peningkatan produksi. Disamping itu, mengurangi biaya produksi, meningkatkan mutu hasil produksi padi (panen) untuk meningkatkan harga jual dipetani yang berimplikasi terhadap peningkatan minat petani untuk bertanam padi secara swadaya.

   Untuk mendukung daya saing produk beras, diperlukan hilirasi tanaman pangan dengan melakukan intervensi alat dan mesin (sarana) pasca panen dan penggilingan (rice milling unit/RMU). Basis intervensi yang akan dilakukan adalah alokasi RMU baru dan revitalisasi RMU. Revitalisasi RMU meliputi pengalokasian sarana dryer/pengering, grading, dan/atau packing. Upaya modernisasi RMU difokuskan pada peningkatan kualitas produk dan peningkatan peluang produk beras berbasis

lokal di pasar. Beberapa revitalisasi RMU melalui dryer dapat dibedakan menjadi vertical dryer, dryer UV, dryer mobile, dan fluidace dryer. Kualitas yang dihasilkan dari proses dryer ini sangat menentukan kualitas beras yang dihasilkan setelah terutama berkaitan dengan persentase beras patah. Kadar yang tidak sesuai dengan standar (maks 14%) akan mengakibatkan beras patah yang tinggi.

4. Penanaman padi secara swadaya seluas 12.555.790 ha dengan provitas rata-rata 53,34 ku/ha, diperkirakan akan berkontribusi terhadap produksi sebanyak 64.753.041 ton.

Sehingga diperkirakan akan diperoleh total produksi 82,50 juta ton yang lebih tinggi dibandingkan sasaran RKP 2018 sebesar 80,08 juta ton. Rincian selengkapnya terdapat dalam Tabel di bawah ini.

Skenario Pencapaian Produksi Padi Tahun 2018

No.	Kegiatan	Volume Kegiatan (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (ha)	Produktivitas (ku/ha)	Produksi (ton)
I	**Tambahan Pengembangan**	**197.700**	**197.700**	**190.860**	**50,22**	**958.508**
1	Rehap Jaringan Irigasi Tersier	134.700	134.700	130.039	51,91	675.034
2	Embung	10.000	10.000	9.654	51,71	49.921
3	Cetak sawah PSP 2018	12.000	12.000	11.585	37,50	43.443
4	Optimasi Lahan Rawa	41.000	41.000	39.581	48,03	190.109
II	**Pengembangan Produktivitas**	**3.438.000**	**3.438.000**	**3.319.045**	**50,58**	**16.788.451**
A	**Kegiatan di Dit Serealia**	**1.240.000**	**1.240.000**	**1.197.096**	**47,18**	**5.647.831**
1	Budidaya Padi Lahan Kering (areal baru)	1.000.000	1.000.000	965.400	45,30	4.373.262
2	Budidaya Padi Inbrida Sawah	169.500	169.500	163.635	52,00	850.904
3	Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah	3.000	3.000	2.896	42,00	12.164
4	Pengembangan Budidaya Padi Khusus Lainnya	3.000	3.000	2.896	68,00	19.694
5	Pengembangan Budidaya Padi Pada Lahan Sub Optimal Spesifik Lokasi	50.000	50.000	48.270	65,00	313.755
6	Budidaya Mina Padi	1.500	1.500	1.448	65,00	9.413
7	Pengembangan Desa Pertanian Organik Padi	10.000	10.000	9.654	60,00	57.924
8	Budidaya Padi Lahan Rawa	3.000	3.000	2.896	37,00	10.716
B	**Kegiatan di Dit Perbenihan**	**2.198.000**	**2.198.000**	**2.121.949**	**52,50**	**11.140.619**
1	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi	8.000	8.000	7.723	60,00	46.339
2	Peningkatan Produksi melalui VUB	5.000	5.000	4.827	65,00	31.376
3	Bantuan Benih Padi Inbrida	1.985.000	1.985.000	1.916.319	52,00	9.964.859
4	Bantuan Benih Padi Hibrida	100.000	100.000	96.540	80,00	772.320
5	Bantuan Benih Padi Gogo	100.000	100.000	96.540	33,74	325.726
III	**Dukungan Lainnya**		**12.555.790**	**12.140.095**	**53,34**	**64.753.041**
1	Reguler/swadaya petani		12.555.790	12.140.095	53,34	64.753.041
	TOTAL		**16.191.490**	**15.650.000**	**52,72**	**82.500.000**

Pada lahan-lahan *existing*, petani regular memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian sasaran produksi. Program pemerintah lebih ditujukan untuk pengembangan areal baru, pengenalan varietas unggul dan teknik budidaya baru yang dapat meningkatkan produksi dan provitas.

Melalui kegiatan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) Pajale, petani dipersuasi untuk melakukan percepatan olah tanah dan tanam, mengoptimalkan lahan kering, lahan tadah hujan, lahan rawa, pemanfaatan teknologi budidaya, optimalisasi alsintan dan menjaga kearifan lokal. Sebagai gambaran hasil pelaksanaan UPSUS LTT serta program bantuan pemerintah baik fasilitas budidaya padi, bantuan benih gratis dan program pemerintah lainnya serta swadaya petani, untuk komoditas padi selama 4 tahun terakhir sebagai berikut:

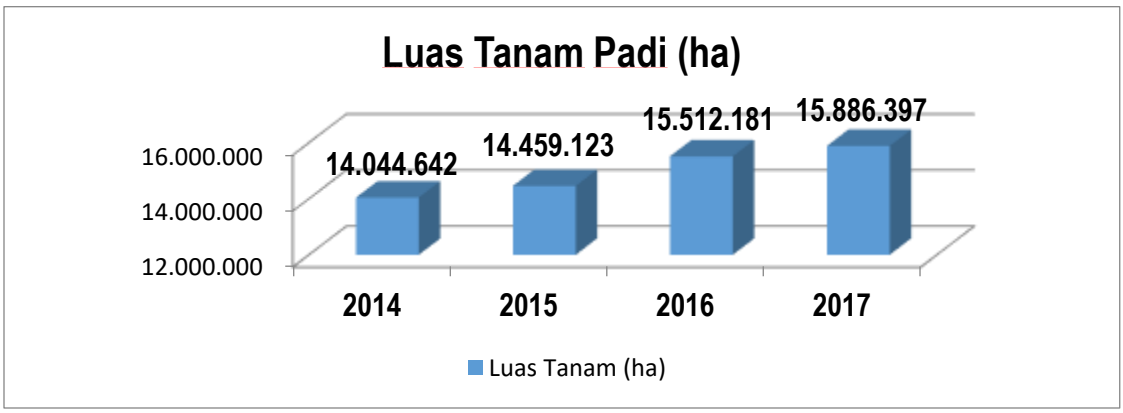
Luas Tanam Padi (ha)
16.000.000
14.000.000
12.000.000
14.044.642
14.459.123
15.512.181
15.886.397
2014
2015
2016
2017
Luas Tanam (ha)

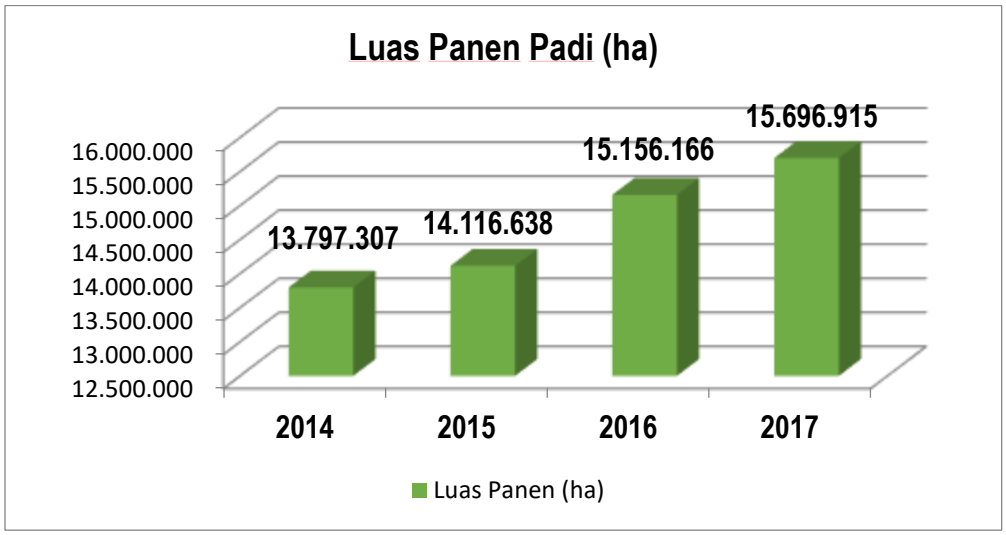
Luas Panen Padi (ha)
16.000.000
15.500.000
15.000.000
14.500.000
14.000.000
13.500.000
13.000.000
12.500.000
13.797.307
14.116.638
15.156.166
15.696.915
2014
2015
2016
2017
Luas Panen (ha)

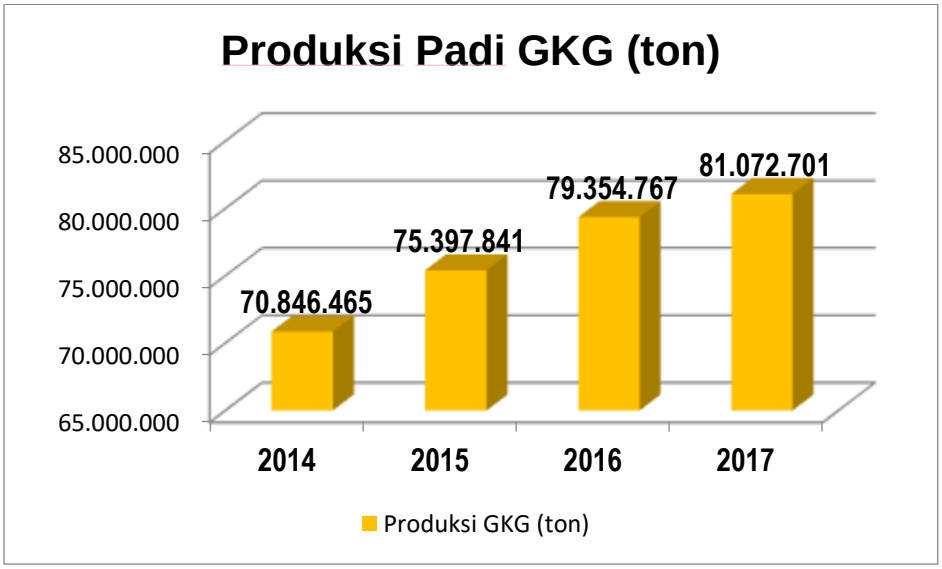
Produksi Padi GKG (ton)
85.000.000
80.000.000
75.000.000
70.000.000
65.000.000
70.846.465
75.397.841
79.354.767
81.072.701
2014
2015
2016
2017
Produksi GKG (ton)

Dengan usulan perubahan tersebut di atas, volume budidaya padi meningkat dari 1,740 juta hektar menjadi 3,438 juta hektar, sebesar 2,198 juta hektar pada output bantuan benih di Direktorat Perbenihan dengan pertimbangan kesesuaian tugas dan fungsi (tusi) serta efektivitas pelaksanaan kegiatan, mengingat Direktorat Serealia memiliki beban kegiatan yang cukup tinggi.

II. JUSTIFIKASI PENCAPAIAN SASARAN PRODUKSI JAGUNG 23,4 JUTA TON

Komoditas prioritas nasional yang paling cepat berkembang dan mengalami peningkatan produksi cukup signifikan adalah komoditas jagung. Produksi jagung tahun 2017 adalah 28,93 juta ton (naik 22,68% dari produksi tahun 2016 sebesar 23,58 juta ton). Perkembangan produksi jagung yang cukup pesat karena meningkatnya pertanaman swadaya jagung oleh masyarakat dan perluasan areal tanam baru melalui program pemerintah. Meningkatnya minat masyarakat karena kebijakan pembatasan impor, kenaikan harga dan kenaikan permintaan pakan.

Program Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) yang mulai dilaksanakan tahun 2017 telah meningkatkan luas tanam pada lahan-lahan baru seperti di lahan ladang, lahan perkebunan Tanaman Belum Menghasilkan/TBM (karet, kelapa,sawit), lahan di bawah tegakan tanaman tahunan (kayu putih, mede), lahan perhutanan sosial, lahan terlantar/belum diusahakan, lahan eks tambang, lahan pekarangan dan lahan sejenis lainnya. Disamping itu program UPSUS LTT Jagung yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 telah berhasil mendorong peningkatan luas tanam jagung.

Sebagai gambaran kinerja produksi, luas tanam dan luas panen jagung selama 4 tahun terakhir sebagai berikut:

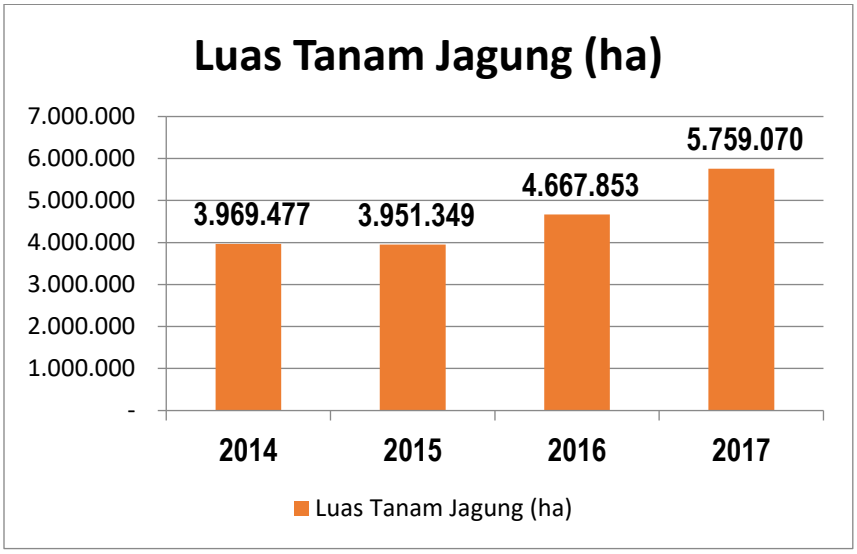

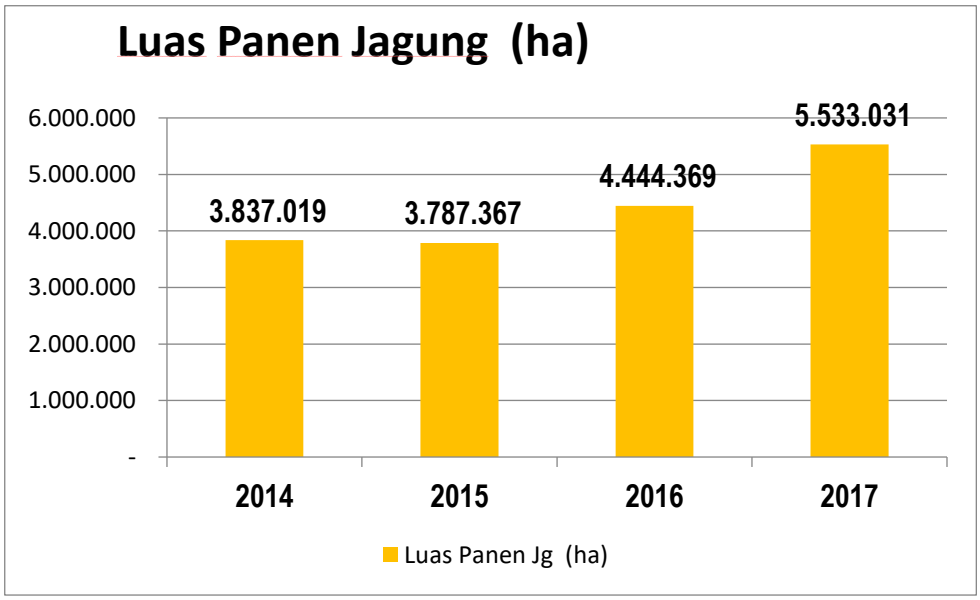
Luas Panen Jagung (ha)
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-
3.837.019
3.787.367
4.444.369
5.533.031
2014
2015
2016
2017
Luas Panen Jg (ha)

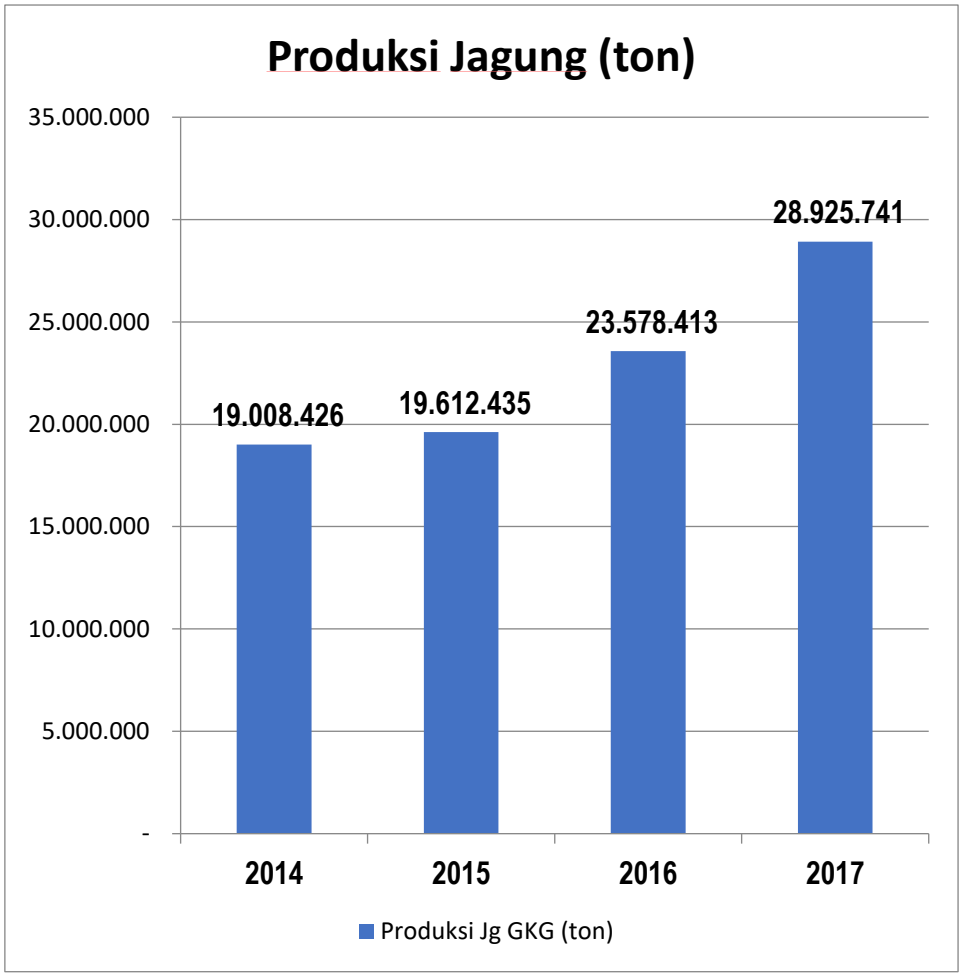
Produksi Jagung (ton)
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-
19.008.426
19.612.435
23.578.413
28.925.741
2014
2015
2016
2017
Produksi Jg GKG (ton)

Dengan dinamika diatas, Kementerian Pertanian mengusulkan perubahan output fasilitas penerapan budidaya jagung di Direktorat Serealia semula 4.000.000 hektar menjadi 2.804.710 hektar dan penambahan alsin pascapanen jagung dari 2.470 unit menjadi 2.919 unit dengan *coverage* area seluas 854.000 hektar per tahun.

Upaya pencapaian sasaran produksi jagung adalah 23,4 juta ton dilaksanakan dengan :

1. Program Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya tahun 2018, menyediakan luas tanam 2.804.710 ha dengan provitas 53,64 ku/ha, sehingga diperkirakan akan diperoleh produksi 14.298.259 ton.
2. Dukungan fasilitasi sarana alsintan pascapanen berupa corn combine harvester, dryer/pengering, corn sheller di 31 Provinsi dengan tujuan utama mengurangi susut hasil (254 ribu ton) dalam rangka peningkatan produksi. Disamping itu, mengurangi biaya produksi, meningkatkan mutu hasil produksi jagung (panen) untuk meningkatkan harga jual dipetani yang berimplikasi terhadap peningkatan minat petani untuk bertanam padi secara swadaya.
3. *Carry over* program 2017 yang dipanen di 2018 seluas 1.455.035 ha dengan provitas 54,23 ku/ha berkontribusi terhadap produksi tahun 2018 sebesar 7.496.110 ton.
4. Penanaman jagung swadaya masyarakat untuk tahun 2018 diperkirakan seluas 344.173 ha dengan provitas 51,70 ku/ha akan diperoleh produksi 1.690.406 ton.

Sehingga diperkirakan akan diperoleh total produksi tahun 2018 sebesar 23.484.775 ton. Penurunan ouput Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya dari 4 juta hektar menjadi 2,8 juta hektar tidak mempengaruhi pencapaian sasaran produksi komoditas prioritas nasional tahun 2018 untuk Jagung sebesar 23,4 juta ton dengan rincian sebagai berikut:

SKENARIO PENCAPAIAN SASARAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2018

No		Uraian	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton PK)
I		**Jagung 2018**	**3.149.973**	**2.992.474**	**53,43**	**15.988.665**
		A. Program Jagung 2018	**2.805.800**	**2.665.510**	**53,64**	**14.298.259**
	1	**Lahan PATB**	**2.529.904**	**2.403.409**	**53,45**	**12.845.544**
		a. Lahan Perhutani/Inhutani	250.000	237.500	52,80	1.254.000
		b. Lahan Perkebunan	300.000	285.000	53,60	1.527.600
		c. Lahan Perhutanan Sosial	200.000	190.000	52,40	995.600
		d. Lahan Petani Lainnya	1.779.904	1.690.909	53,63	9.068.344
	2	**Lahan PLTJ**	**275.896**	**262.101**	**55,43**	**1.452.715**
		a. Eks CPCL 2017 Pusat	39.080	37.126	55,42	205.752
		b. Eks CPCL 2017 TP Provinsi	86.816	82.475	55,30	456.088
		c. Alokasi Permintaan Khusus	150.000	142.500	55,50	790.875
		B. Swadaya Masyarakat April - Sept 2018	**344.173**	**326.964**	**51,70**	**1.690.406**
II		**Carry Over Kegiatan Jagung 2017**	**1.455.035**	**1.382.283**	**54,23**	**7.496.110**
	1	Kegiatan Jagung 2017	1.155.035	1.097.283	54,90	6.024.085
	2	Swadaya Masyarakat musim Tanam Oktober 2017 - Maret 2018	300.000	285.000	51,65	1.472.025
Total			**4.605.008**	**4.374.757**	**53,68**	**23.484.775**

III. JUSTIFIKASI PENCAPAIAN SASARAN PRODUKSI KEDELAI 2,34 JUTA TON

Realisasi tanam program bantuan pemerintah tahun 2017 relatif rendah sebagaimana berikut:

No.	Kegiatan	ALOKASI	Realisasi	% Realisasi
		Ha	Ha	
1	APBN 2017	216.770	172.589	79,62
2	APBNP 2017	500.000	192.044	38,41
	Total	**716.770**	**364.633**	**50,87**

Oleh karena itu diusulkan penurunan output fasilitas penerapan budidaya kedelai semula 1.000.000 hektar menjadi 546.000 hektar. Namun demikian untuk mengurangi dampak penurunan serta meningkatkan minat petani untuk menanam kedelai maka diusulkan penambahan alsintan pascapanen semula 1.872 unit menjadi 2.150 unit.

Pencapaian sasaran produksi kedelai tahun 2018 sebesar 2,34 juta ton tetap diupayakan untuk dicapai melalui :

1. Program Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai tahun 2018, menyediakan luas tanam 546.000 ha dengan provitas 17,55 ku/ha, sehingga diperkirakan akan diperoleh produksi 939.018 ton.
2. *Carry over* program 2017 yang dipanen di 2018 seluas 387.450 ha dengan provitas 16,86 ku/ha berkontribusi terhadap produksi tahun 2018 sebesar 653.106 ton.
3. Dukungan fasilitasi sarana alsintan pascapanen berupa combine harvester multifungsi, power thresher multiguna, pembersih biji kedelai semula 1.872 unit menjadi 2.150 unit dengan tujuan utama mengurangi susut hasil dalam rangka peningkatan produksi. Disamping itu, mengurangi biaya produksi, meningkatkan mutu hasil produksi padi (panen) untuk meningkatkan harga jual dipetani yang berimplikasi terhadap peningkatan minat petani untuk bertanam padi secara swadaya.
4. Penanaman kedelai swadaya masyarakat untuk tahun 2018 diperkirakan seluas 500.000 ha dengan provitas 15,50 ku/ha akan diperoleh produksi 747.875 ton.

Sehingga diperkirakan akan diperoleh total produksi tahun 2018 sebesar 2.340.000 ton. Penurunan output Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai dari 1 juta hektar menjadi 546.000 hektar tidak mempengaruhi pencapaian sasaran produksi komoditas prioritas nasional tahun 2018 untuk kedelai sebesar 2,34 juta ton dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas Ku/Ha	Produksi (Ton)
1	Carry Over Program PAT APBN-P Tahun 2017	204,000	387,450	16.86	653,106
2	Peningkatan Produksi Kedelai	546,000	535,080	17.55	939,018
3	Swadaya Masyarakat	500,000	482,500	15.50	747,875
Jumah		**1,250,000**	**1,405,030**	**16.65**	**2,340,000**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas beberapa upaya yang dilakukan antara lain :

- Penanaman kedelai sebagian di lahan PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) seperti di lahan kering, lahan perhutani, lahan perkebunan, lahan terlantar, tumpang sari untuk mengantisipasi persaingan penggunaan lahan untuk padi dan jagung.
- Pemberian paket saprodi bantuan pemerintah yang lebih lengkap dibanding bantuan padi, jagung sehingga meningkatkan minat petani
- Peningkatan produktivitas melalui penggunaan varietas unggul
- Mendorong Dinas Pertanian Kab/Kota beserta jajarannya (PPL) agar mengoptimalkan cpcl yang telah terverifikasi seluas 454 ribu ha (dari hasil refocusing semula 1 juta ha menjadi 546 ribu ha) menjadi lahan intensif swadaya petani kedelai
- Perbaikan dalam penyediaan benih kedelai bersertifikat terutama di luar jawa (Perbaikan system perbenihan)
- Program bantuan pemerintah Desa Mandiri Benih (DMB) di tahun 2018 yang diafokuskan pada benih kedelai
- Meningkatkan minat petani untuk menanam kedelai dengan mengupayakan kebijakan harga kedelai lokal dan kebijakan impor yang lebih berpihak pada petani.
- Meningkatkan aspek pengolahan dan pemasaran produk kedelai lokal, yang relatif lebih sehat (Kedelai Non GMO) dibanding kedelai impor sehingga meningkatkan nilai tambah petani

Dengan adanya usulan revisi refocusing tersebut diatas, Kementerian Pertanian tetap menjaga pencapaian sasaran produksi tahun 2018 sesuai RKP :

- Sasaran Produksi padi 80,08 juta ton,
- Sasaran Produksi jagung 23,4 juta ton,
- Sasaran Produksi kedelai 2,34 juta ton.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Ir. Maman Suherman, MM
NIP.196009081987031003

PRIORITAS NASIONAL REVISI DITJEN TANAMAN PANGAN TAHUN 2018

(JUTA RUPIAH)

Kode	Program/Kegiatan/Proyek	SEMULA		MENJADI	
		Target	Alokasi (Rp. Juta)	Target	Alokasi (Rp. Juta)
018.06	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**		**4.877.969**		**5.084.473**
018.06.1761	**Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi**		**980.688**		**546.614**
018.06.1761.611	Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	1.000.000	980.688	546.000	546.614
018.06.1762	**Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia**		3.804.482		**2.782.510**
018.06.1762.621	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	1.740.000	797.116	1.230.000	653.200
018.06.1762.622	Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan	4.000.500	2.701.475	2.804.710	1.923.757
018.06.1762.625	Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik	10.000	305.890	10.000	205.553
018.06.1763	**Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan**		56.354		**753.822**
018.06.1763.639	Fasilitas Desa Mandiri Benih	205	41.620	208	41.620
018.06.1763.635	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Padi	294	9.638	294	9.638
018.06.1763.636	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Jagung	93	1.649	93	1.649
018.06.1763.637	Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Kedelai	205	3.448	205	3.448
018.06.1763.633	Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat			2.198.000	697.468
018.06.5885	**Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan**		36.446		**1.001.527**
018.06.5885.856	Fasilitas RMU/ Revitalisasi RMU	98	36.446	1.146	1.001.527

ALOKASI BANTUAN BENIH PADI IBRIDA DAN HIBRIDA (DIREKTORAT PERBENIHAN)
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI	PENGADAAN DAERAH		PENGADAAN PUSAT						TOTAL ALOKASI DAERAH + PUSAT	
		PADI INBRIDA		PADI INBRIDA		PADI HIBRIDA		JUMLAH			
		Luas Areal	Kebutuhan benih	Luas Areal	Kebutuhan benih	Luas Areal	Kebutuhan benih	Luas Areal	Kebutuhan benih	Luas Areal	Kebutuhan benih
		(Ha)	(KG)	(Ha)	(KG)	(Ha)	(KG)	(Ha)	(KG)	(Ha)	(KG)
1	ACEH	100.000	2.500.000			5.000	75.000	5.000	75.000	105.000	2.575.000
2	SUMUT			50.000	1.250.000	10.000	150.000	60.000	1.400.000	60.000	1.400.000
3	SUMBAR	55.000	1.375.000			-	-	-	-	55.000	1.375.000
4	RIAU	7.000	175.000			-	-	-	-	7.000	175.000
5	JAMBI	27.350	683.750			-	-	-	-	27.350	683.750
6	SUMSEL	100.000	2.500.000			10.000	150.000	10.000	150.000	110.000	2.650.000
7	BENGKULU	15.000	375.000			-	-	-	-	15.000	375.000
8	LAMPUNG	80.000	2.000.000			10.000	150.000	10.000	150.000	90.000	2.150.000
9	BABEL	1.500	37.500			-	-	-	-	1.500	37.500
10	JABAR		-	250.000	6.250.000	10.000	150.000	260.000	6.400.000	260.000	6.400.000
11	JATENG	200.000	5.000.000			15.000	225.000	15.000	225.000	215.000	5.225.000
12	DIY	15.000	375.000			5.000	75.000	5.000	75.000	20.000	450.000
13	JATIM	99.250	2.481.250	90.000	2.250.000	15.000	225.000	105.000	2.475.000	204.250	4.956.250
14	BANTEN	40.000	1.000.000			5.000	75.000	5.000	75.000	45.000	1.075.000
15	KALBAR	47.000	1.175.000		-	-	-	-	-	47.000	1.175.000
16	KALTENG	20.000	500.000			-	-	-	-	20.000	500.000
17	KALSEL	56.500	1.412.500			-	-	-	-	56.500	1.412.500
18	KALTIM	9.500	237.500			-	-	-	-	9.500	237.500
19	KALTARA	2.000	50.000			-	-	-	-	2.000	50.000
20	SULUT	16.500	412.500			-	-	-	-	16.500	412.500
21	SULTENG	26.900	672.500			-	-	-	-	26.900	672.500
22	SULSEL	150.000	3.750.000			10.000	150.000	10.000	150.000	160.000	3.900.000
23	SULTRA	15.500	387.500			-	-	-	-	15.500	387.500
24	GORONTALO	8.000	200.000			-	-	-	-	8.000	200.000
25	SULBAR			13.500	337.500	-	-	13.500	337.500	13.500	337.500
26	BALI	8.000	200.000			-	-	-	-	8.000	200.000
27	NTB			41.500	1.037.500	5.000	75.000	46.500	1.112.500	46.500	1.112.500
28	NTT	30.000	750.000			-	-	-	-	30.000	750.000
29	MALUKU	2.000	50.000			-	-	-	-	2.000	50.000
30	MALUT	2.500	62.500			-	-	-	-	2.500	62.500
31	PAPUA	5.000	125.000			-	-	-	-	5.000	125.000
32	PAPUA BARAT	500	12.500			-	-	-	-	500	12.500
33	Pusat			513.000	12.825.000					513.000	12.825.000
	JUMLAH	**1.140.000**	**28.500.000**	**445.000**	**11.125.000**	**100.000**	**1.500.000**	**545.000**	**12.625.000**	**2.198.000**	**53.950.000**

Alaokasi Vertical Dryer dan Corn Combine			
NO.	PROVINSI & KABUPATEN/ KOTA	Corn Combine	Vertical Dryer
	DITJEN TP	842	1.034
I.	PUSAT *)	842	444
II.	TP PROVINSI	-	588
1	ACEH	-	19
2	SUMUT	-	17
3	SUMBAR	-	2
4	RIAU	-	19
5	JAMBI	-	6
6	SUMSEL	-	40
7	BENGKULU	-	6
8	LAMPUNG	-	17
9	DKI JAKARTA	-	-
10	JABAR	-	34
11	JATENG	-	47
12	DI YOGYAKARTA	-	3
13	JATIM	-	46
14	KALBAR	-	37
15	KALTENG	-	10
16	KALSEL	-	22
17	KALTIM	-	9
18	SULUT	-	35
19	SULTENG	-	24
20	SULSEL	-	73
21	SULTRA	-	21
22	BALI	-	6
23	NTB	-	4
24	NTT	-	5
25	MALUKU	-	7
26	PAPUA	-	7
27	MALUT	-	14
28	BANTEN	-	14
29	BABEL	-	-
30	GORONTALO	-	3
31	KEPRI	-	-
32	PAPUA BARAT	-	12
33	SULBAR	-	26
34	KALTARA	-	3

Catatan *) : Pengadaan Pusat akan didistribusikan ke daerah sesuai dengan hasil CPCL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor	: AG/ 10324 /DPR RI/VI/2018	8 Juni 2018
Sifat	: Penting	
Derajat	: Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI tentang Pergeseran Anggaran Tahun 2018.	

YTH. MENTERI PERTANIAN RI
JAKARTA

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Pimpinan Komisi IV DPR RI Nomor 59 /Kom.IV.DPR RI/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 hal Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI tentang pergeseran Anggaran Tahun 2018. Dalam suratnya Pimpinan Komisi IV DPR RI menyampaikan keputusan Rapat Kerja tanggal 4 Juni 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan DPR RI meneruskan Keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dimaksud kepada Saudara untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA DPR RI/ KORINBANG,

DR. H. AGUS HERMANTO

Tembusan :
1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan Badan Anggaran DPR RI;
3. Pimpinan Komisi IV DPR RI;
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Sekretaris Jenderal DPR RI.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat Ke-	:	05
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 4 Juni 2018
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	:	Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2018
Ketua Rapat	:	Edhy Prabowo, MM., MBA.
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo
Hadir	:	A. 38 Anggota dari 51 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP. (Menteri Pertanian);
2. Ir. Syukur Iwantoro, MS., MBA (Sekretaris Jenderal);
3. Justan Ridwan Siahaan, AK.MACC,CA. (Inspektur Jenderal);
4. Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);
5. Dr. Ir. H. Sumarjo Gatot Irianto, M.S, D.A.A. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan);
6. Ir. Bambang, MM. (Direktur Jenderal Perkebunan);
7. Drh. I Ketut Diarmita, MP. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
8. Dr. Ir. Suwandi (Direktur Jenderal Hortikultura);
9. Dr. Ir. Momon Rusmono, MS. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian);
10. Dr. Ir. Muhammad Syakir, MS. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian); dan
12. Ir. Banun Harpini, M.Sc. (Kepala Badan Karantina Pertanian) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian membahas RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2018, pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian dapat meningkatkan kualitas kinerja sehingga Opini WTP dapat dipertahankan.

2. Komisi IV DPR RI menerima laporan atas realisasi APBN Kementerian Pertanian Tahun 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp4.981.808.858.003,- atau 20,88% dari Pagu APBN Tahun 2018 sebesar Rp23.864.457.712.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian dapat meningkatkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2018.

3. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan pergeseran pada APBN Kementerian Pertanian Tahun 2018 sebagai berikut:
   a. Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang semula sebesar Rp6.486.964.351.000,- menjadi Rp6.682.058.351.000,-;
   b. Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang semula sebesar Rp1.355.960.980.000,- menjadi Rp1.255.960.980.000,-; dan
   c. Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semula sebesar Rp2.114.282.476.000,- menjadi Rp2.019.188.476.000,-.

4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif APBN Kementerian Pertanian dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2019 sebesar Rp21.067.641.815.000,-, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
   a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.424.152.891.000,-;
   b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp92.408.464.000,-;
   c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp6.012.019.254.000,-;
   d. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.004.931.454.000,-;
   e. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1.100.218.315.000,-;
   f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp1.903.121.296.000,-;
   g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp4.952.538.742.000,-;
   h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp1.756.556.595.000,-
   i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp1.322.190.657.000,-;
   j. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp668.688.925.000,-; dan
   k. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp830.815.222.000,-.

   Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah akan membahas lebih detail dan memperjuangkan tambahan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas usulan Pagu Subsidi Pupuk pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp34.801.875.644.240,- atau setara 10.550.000 ton.

6. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas usulan Pagu Subsidi Benih pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.020.800.000.000,-.

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk terus memantau ketersediaan pasokan dan harga komoditas pangan agar tidak terjadi gejolak kenaikan harga dan kurangnya ketersediaan pasokan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

MENTERI PERTANIAN,	KOMISI IV DPR RI KETUA RAPAT,
DR. IR. ANDI AMRAN SULAIMAN, MP.	**EDHY PRABOWO, MM., MBA.**

A-335

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM		APBN 2018	
				SEMULA	MENJADI
1	2	3		4	5
018.06 DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				**2,114,282,476,000**	**2,019,188,476,000**
	04 FUNGSI EKONOMI			**2,114,282,476,000**	**2,019,188,476,000**
		018.06.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	2,114,282,476,000	2,019,188,476,000
018.08 DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN				**6,030,828,749,000**	**6,030,828,749,000**
	04 FUNGSI EKONOMI			**6,030,828,749,000**	**6,030,828,749,000**
		018.08.11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	6,030,828,749,000	6,030,828,749,000
018.09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN				**2,096,560,880,000**	**2,096,560,880,000**
	04 FUNGSI EKONOMI			**2,096,560,880,000**	**2,096,560,880,000**
		018.09.12	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	2,096,560,880,000	2,096,560,880,000
018.10 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN				**1,258,035,747,000**	**1,258,035,747,000**
	04 FUNGSI EKONOMI			**851,585,747,000**	**851,585,747,000**
		018.10.13	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	851,585,747,000	851,585,747,000
	10 FUNGSI PENDIDIKAN			**406,450,000,000**	**406,450,000,000**
		018.10.13	Program Pendidikan Pertanian	406,450,000,000	406,450,000,000
018.11 BADAN KETAHANAN PANGAN				**527,612,000,000**	**527,612,000,000**
	04 FUNGSI EKONOMI			**527,612,000,000**	**527,612,000,000**
		018.11.14	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	527,612,000,000	527,612,000,000

RINCIAN PERUBAHAN APBN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018
PER FUNGSI DAN PER PROGRAM

BAGIAN ANGGARAN (BA)
KEMENTERIAN/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM		APBN 2018	
				SEMULA	MENJADI
1	2	3		4	5
KEMENTERIAN PERTANIAN (BA.018)				**23,864,457,712,000**	**23,864,457,712,000**
018.01 SEKRETARIAT JENDERAL				**1,492,092,430,000**	**1,492,092,430,000**
	04 FUNGSI EKONOMI			**1,492,092,430,000**	**1,492,092,430,000**
		018.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1,492,092,430,000	1,492,092,430,000
018.02 INSPEKTORAT JENDERAL				**97,134,000,000**	**97,134,000,000**
	04 FUNGSI EKONOMI			**97,134,000,000**	**97,134,000,000**
		018.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	97,134,000,000	97,134,000,000
018.03 DITJEN TANAMAN PANGAN				**6,486,964,351,000**	**6,682,058,351,000**
	04 FUNGSI EKONOMI			**6,486,964,351,000**	**6,682,058,351,000**
		018.03.06	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	6,486,964,351,000	6,682,058,351,000
018.04 DITJEN HORTIKULTURA				**1,355,960,980,000**	**1,255,960,980,000**
	04 FUNGSI EKONOMI			**1,355,960,980,000**	**1,255,960,980,000**
		018.04.07	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1,355,960,980,000	1,255,960,980,000
018.05 DITJEN PERKEBUNAN				**1,631,801,109,000**	**1,631,801,109,000**
	04 FUNGSI EKONOMI			**1,631,801,109,000**	**1,631,801,109,000**
		018.05.08	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1,631,801,109,000	1,631,801,109,000